



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
[RPJM]
KABUPATEN BENER MERIAH 2012 – 2017**

**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2012**



BUPATI BENER MERIAH

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 62 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2012-2017

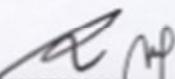
EISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);



6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2011, tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2012-2017.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

|
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah;
- b. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bener Meriah, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah;
- f. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
- h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bener Meriah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bener Meriah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;

- i. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah untuk Priode 1 (satu) Tahun;
- j. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah rencana strategis 5 (lima) tahunan SKPD yang mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- k. Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk priode 1 (satu) tahun;
- l. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir priode perencanaan;
- m. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
- n. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
- o. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
- p. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Pasal 2

- (1) RPJM Kabupaten Bener Meriah memuat Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Bener Meriah, berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) Sistematika RPJM Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
 - d. Bab IV : Analisis Isu-isu Strategis
 - e. Bab V : Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - f. Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan
 - g. Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
 - h. Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
 - i. Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
 - j. Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
 - k. Bab XI : Penutup
- (3) Rincian Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini;

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Bener Meriah melaksanakan program dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Bener Meriah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja SKPK Bener Meriah;

BAB II PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah melakukan pengendalian dan Evaluasi terhadap RPJM Kabupaten Bener Meriah setiap tahun.
- (2) Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah dapat melakukan penyesuaian RPJM Kabupaten Bener Meriah paling lambat 3 (Tiga) Tahun setelah ditetapkan.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebijakan Perencanaan pembangunan Kabupaten Bener Meriah
 - b. Pelaksanaan rencana Pembangunan Kabupaten Bener Meriah.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bener Meriah yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun ini ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 07 Februari 2013 M
26 Rabi'ul Awal 1434 H



Diundangkan di Redelong
pada tanggal 08 Februari 2013 M
27 Rabi'ul Awal 1434 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

T. ISLAH



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel dan Gambar.....	iv
Bab I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	1
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
1.5 Maksud dan Tujuan	4
1.5.1 Maksud	4
1.5.2 Tujuan	5
Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	6
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	6
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	6
2.1.1.1 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi.....	6
2.1.1.2 Topografi.....	7
2.1.1.3 Geologi.....	8
2.1.1.4 Hidrologi	8
2.1.1.1 Air Permukaan	10
2.1.1.2 Air Tanah.....	11
2.1.1.5 Klimatologi	12
2.1.1.6 Penggunaan Lahan.....	12
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah.....	15
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana	16
2.1.4 Demografi.....	17
2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial	19
2.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi.....	19
2.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	19
2.2.1.2 PDRB Per Kapita	22
2.2.1.3 Inflasi/Deflasi	23
2.2.1.4 Pengembangan Wilayah Transmigrasi	23
2.2.1.5 Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	24
2.2.1.6 Angka Kriminalitas	25
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	25
2.2.2.1 Pendidikan	25
2.2.2.2 Kesehatan`	25
2.2.2.2.1 Angka Kematian.....	25
2.2.2.2.2 Angka Harapan Hidup.....	26
2.2.2.2.3 Status Gizi Prevalensi Balita Kekurangan Gizi	26
2.2.2.3 Sosial	27
2.3 Aspek Pelayanan Umum	28

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	28
2.3.1.1 Pendidikan	28
2.3.1.1.1 APK, APM dan APS.....	28
2.3.1.1.2 Rasio Antara Guru Dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar	29
2.3.1.2 Kesehatan	30
2.3.1.3 Koperasi dan UMKM	32
2.3.1.4 Jalan	32
2.3.2 Fokus Layanan Pilihan.....	33
2.3.2.1 Jumlah Investor Berskala Nasional (Pmdn/Pma).....	33
2.3.2.2 Kondisi Sosial-Keberagamaan.....	33
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	35
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	35
2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	35
2.4.1.2 Nilai Per Kapita Anggaran Daerah	35
2.4.1.3 Nilai Tukar Petani	36
2.4.2 Ketenagakerjaan	36
2.4.3 Kepegawaian.....	37
 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN.....	38
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	38
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBK	39
3.1.1.1. Pendapatan Daerah	39
3.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40
3.1.1.1.2. Dana Transfer.....	40
3.1.1.2. Belanja Daerah.....	41
3.1.1.3. Neraca Daerah	44
3.1.1.3.1. Aset.....	47
3.1.1.3.2. Kewajiban	48
3.1.1.3.3. Ekuitas Dana	48
3.1.1.3.4. Rasio likuiditas	48
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	49
3.2.1. Kerangka Pendanaan	50
3.2.1.1. Analisis pengeluaran periodik prioritas utama.....	50
3.2.1.2. Proyeksi Keuangan Daerah.....	50
3.2.1.3. Proyeksi Pendapatan Daerah.....	50
3.2.1.4. Proyeksi Belanja Daerah	51
 BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN	52

4.1.	Permasalahan dan Tantangan Kabupaten Bener Meriah.....	52
4.1.1.	Pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan masih rendah.....	52
4.1.2.	Pelaksanaan pembangunan kurang efektif dan efisien.....	52
4.1.3.	Pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam belum maksimal	52
4.1.4.	Tingkat kemiskinan masih tinggi.....	53
4.1.5.	Keterlibatan peran swasta dalam pembangunan masih rendah.....	53
4.1.6.	Sektor Koperasi dan UMKM belum berkembang dengan baik	54
4.1.7.	Pertumbuhan ekonomi belum merata	54
4.1.8.	Kualitas sumberdaya manusia masih rendah	55
4.1.9	Infrastruktur dan tata ruang belum optimal	55
4.2	Isu Strategis Pembangunan Bener Meriah.....	56
4.2.1	Isu strategis pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan	56
4.2.2	Isu strategis pelaksanaan pembangunan	56
4.2.3	Isu strategis pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam	56
4.2.4	Isu strategis kemiskinan	57
4.2.5	Isu strategis keterlibatan peran swasta dalam pembangunan.....	57
4.2.6	Isu strategis sektor Koperasi dan UMKM	57
4.2.7	Isu strategis pertumbuhan ekonomi	57
4.2.8	Isu strategis kualitas sumber daya manusia	57
4.2.9	Isu strategis bidang infrastruktur dan tata ruang.....	57
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	58
	5.1. Visi.....	58
	5.2 Misi.....	58
	5.3 Tujuan dan Sasaran.....	62
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	64
	6.1. Strategi Umum.....	64
	6.2. Strategi dan Arah Kebijakan	64
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	75
	7.1. Kebijakan Umum.....	75
	7.2 Program Pembangunan	75
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	135
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	204
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	223
	10.1 Pedoman Transisi.....	224
	10.2 Kaidah Pelaksanaan	224
BAB XI	PENUTUP	226

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Topografi Bener Meriah.....	7
Tabel 2.2	Potensi sumber daya air berdasarkan wilayah sungai.....	9
Tabel 2.3	Data teknis PLTM dan PLTA di Bener Meriah	10
Tabel 2.4	Jenis penggunaan lahan Bener Meriah tahun 2010 dan 2012	12
Tabel 2.5	Data produksi komoditi padi sawah	13
Tabel 2.6	Perkiraan produksi dan kebutuhan beras 2011 – 2017	14
Tabel 2.7	Luas Areal Dan Produksi Komoditi Kopi, Sawit, Kakao dan Tebu Tahun 2007 – 2011	14
Tabel 2.8	Perkembangan demografi Bener Meriah 2005 – 2009	18
Tabel 2.9	Data Kependudukan Bener Meriah Tahun 2009 – 2012	18
Tabel 2.10	PDRB Bener Meriah tahun 2007 – 2011	19
Tabel 2.11	Peranan pertumbuhan sektoral dan struktur ekonomi Bener Meriah tahun 2009-2011	20
Tabel 2.12	Pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian Bener Meriah tahun 2009 – 2011	21
Tabel 2.13	PDRB per kapita Bener Meriah tahun 2008 – 2011.....	22
Tabel 2.14	Pendapatan regional per kapita Bener Meriah tahun 2008 – 2011	
Tabel 2.15	Indikator inflasi indeks harga implisit PDRB Bener Meriah menurut sektor tahun 2007 – 2011	23
Tabel 2.16	Pembangunan Transmigrasi di Bener Meriah	24
Tabel 2.17	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Bener Meriah Tahun 2005-2010	24
Tabel 2.18	Jumlah Perkara Sejak Tahun 2008 – 2012	25
Tabel 2.19	Angka melek huruf dewasa dan angka rata-rata lama sekolah Bener Meriah tahun 2005-2009	25
Tabel 2.20	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran.....	26
Tabel 2.21	Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu Melahirkan di Bener Meriah Tahun 2006 – 2012	26
Tabel 2.22	Angka harapan hidup Bener Meriah Tahun 2007 – 2010.....	26
Tabel 2.23	Prevalensi Gizi Balita Kekurangan Gizi.....	27
Tabel 2.24	Data PMKS Bener Meriah	27
Tabel 2.25	Data Penyandang Cacat Kabupaten Bener Meriah	28
Tabel 2.26	APK, APM dan APS Pendidikan Dasar dan Menengah di Bener Meriah Tahun 2007-2011.....	28
Tabel 2.27	Rasio Siswa : Guru Bener Meriah SD / MI Tahun 2012.....	29
Tabel 2.28	Rasio Siswa Terhadap Guru Bener Meriah SMP/MTS Tahun 2012	30
Tabel 2.29	Data Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007-2010	31
Tabel 2.30	Data Keberagaan Koperasi Kabupaten Bener Meriah	32
Tabel 2.31	Panjang jalan Kabupaten Bener Meriah	32
Tabel 2.32	Jumlah sarana ibadah	33
Tabel 2.33	Penerimaan zakat dan jumlah muzakki kabupaten bener meriah 2007-2012....	34
Tabel 2.34	Nilai Tukar Petani.....	36
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah 2007–2011	39
Tabel 3.2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2007–2011.....	40

Tabel 3.3	Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2007–2011.....	40
Tabel 3.4	Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007 – 2011	42
Tabel 3.5	Surplus / Defisit Anggaran Tahun 2007 – 2011	44
Tabel 3.6	Pembiayaan Dan SILPA Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007 – 2011.....	44
Tabel 3.7	Neraca Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 – 2011.....	46
Tabel 3.8	Rasio Likuiditas Tahun 2010 – 2011.....	48
Tabel 3.9	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2013 – 2017.....	51
Tabel 3.10	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2013 – 2017	51
Tabel 6.1	SWOT dalam menentukan Strategi	65
Tabel 6.2.	Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 1: Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera dilandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT	66
Tabel 6.3.	Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.....	69
Tabel 6.4.	Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 3: Mengembangkan Tata Kelola Pertanian Yang Terpadu	70
Tabel 6.5.	Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 4: Mengembangkan Aktivitas Sektor Agroindustri	71
Tabel 6.6.	Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 5: Meningkatkan Akses dan Jaringan Perdagangan Global.....	72
Tabel 6.7.	Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 6: Mengembangkan Kemandirian dan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Energi.....	73
Tabel 6.8.	Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 7 : Mengembangkan Pemeliharaan dan Pemanfaatan Hutan Yang Berkelanjutan.....	74
Tabel 7.1.	Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera dilandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.....	76
Tabel 7.2.	Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	100
Tabel 7.3.	Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan Misi 3 : Mengembangkan tata kelola pertanian yang terpadu	107
Tabel 7.4.	Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan Misi 4 : Mengembangkan aktivitas sektor agroindustri	113
Tabel 7.5.	Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan Misi 5 : Meningkatkan akses dan jaringan perdagangan global	119
Tabel 7.6.	Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan Misi 6: Mengembangkan kemandirian dan usaha pemanfaatan sumber daya energi.....	124
Tabel 7.7.	Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan Misi 7: Mengembangkan pemeliharaan dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan.....	131

Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas dan Rencana Pendanaan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 – 2017.....	136
Tabel 9.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017 Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Yang Berkualitas Dan Sejahtera Dilandaskan Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Allah SWT.....	205
Tabel 9.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017 Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.....	211
Tabel 9.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017 Misi 3 : Mengembangkan tata kelola pertanian yang terpadu	213
Tabel 9.4	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017 Misi 4 : Mengembangkan aktivitas sektor agroindustry	216
Tabel 9.5	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017 Misi 5 : Meningkatkan akses dan jaringan perdagangan global.....	211
Tabel 9.6	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017 Misi 6 : Mengembangkan Kemandirian dan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Energi.....	217
Tabel 9.7	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017 Misi 7 : Mengembangkan Pemeliharaan dan Pemanfaatan Hutan Yang Berkelanjutan	221

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administratif Bener Meriah.....	7
Gambar 2.2	Peta topografi Bener Meriah	8
Gambar 2.3	Peta Daerah Aliran Sungai Bener Meriah	9
Gambar 2.4	Profil Rasio Elektrifikasi 2005-2011	11
Gambar 2.5	Peta cekungan air tanah di Bener Meriah	11
Gambar 2.6	Peta Penggunaan Lahan Existing	13
Gambar 2.7	Peta Rawan Bencana	17
Gambar 2.8	Data Kependudukan Bener Meriah, 2009 – 2012	18
Gambar 2.9	Perkembangan IPM Bener Meriah 2006 – 2010.....	19
Gambar 2.10	Laju pertumbuhan PDRB Bener Meriah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tahun 2008–2011.....	21
Gambar 2.11	Rasio jumlah penduduk terhadap nilai anggaran daerah.....	36
Gambar 2.12	Informasi ketenagakerjaan Kabupaten Bener Meriah	37
Gambar 2.13	Rasio jumlah PNS terhadap jumlah Penduduk Kabupaten Bener Meriah.	37
Gambar 3.3	Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah 2007 – 2011	
Gambar 3.4	Belanja Operasional Kabupaten Bener Meriah 2007 – 2011.....	
Gambar 3.5	Trend Realisasi Belanja operasional Daerah 2007 – 2011	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menjelaskan mengenai Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Permendagri tersebut mengamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, Permendagri tersebut menjelaskan tentang dokumen perencanaan yang harus disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu lima tahun.

RPJM Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 – 2017 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan dokumen RPJM ini berpedoman pada RPJM Provinsi Aceh serta RPJM Nasional. Di samping itu, RPJM Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 – 2017 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor - faktor pendorong, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu, dinamika perubahan yang terjadi secara nasional maupun global, serta isu-isu strategis yang berkembang. RPJM ini menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang dilaksanakan setiap tahun.

Mengingat peran dan fungsi RPJM Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 – 2017 sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, pengusaha dan masyarakat, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan se-optimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan. Berdasarkan alasan inilah maka penyusunan RPJM Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 – 2017 dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang *holistik* dan berkesinambungan. Muatan dalam RPJM Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 – 2017 berisi arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan yang terintegrasi dengan baik disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat *indikatif*.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Beberapa peraturan dan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bener Meriah 2013-2017 adalah sebagai berikut:

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
13. Undang-Undang No. 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
14. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran;
15. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
18. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang RPJM Aceh 2012 – 2017.
29. Qanun Bener Meriah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bener Meriah tahun 2012 - 2032;
30. Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 415/488/SK/2012 Tentang Pembentukan tim rancangan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Bener Meriah tahun 2012 – 2017;

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya dan dana yang tersedia. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangatlah erat dan menentukan. Dalam hal ini hubungan hasil evaluasi dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bener Meriah ini dengan Kebijakan Pembangunan Nasional maupun Rencana Pembangunan Aceh diharapkan tetap *sinergi* dan saling berkaitan satu sama lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Hasil Penyesuaian RPJM Kabupaten Bener Meriah ini menjadi pedoman dalam rangka penyesuaian dokumen-dokumen perencanaan lainnya seperti:

1. Rencana pembangunan lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bener Meriah (SKPK) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (RENSTRA) SKPK;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten Bener Meriah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bener Meriah (RKP) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan SKPK, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bener Meriah (Renja-SKPK) adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.

Dengan demikian diharapkan akan terciptanya sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan wilayah baik bersifat jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, sehingga terwujudnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

RPJM Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 – 2017 disusun berdasarkan parameter, indikator dan sistematika sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
- BAB IV : Analisis Isu-isu Strategis Pembangunan
- BAB V : Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
- BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
- BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
- Bab XI : Penutup

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1 Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 – 2017 disusun dengan maksud “Menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pemerintah kabupaten, DPRK, dan masyarakat dalam menentukan strategi dan arah pembangunan daerah jangka menengah serta program dan kegiatan prioritas sesuai dengan potensi dan kondisi rill yang dijabarkan dalam RKP setiap tahunnya”.

1.5.2 Tujuan

RPJM Kabupaten Bener Meriah disusun dengan Tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan gambaran umum kondisi Bener Meriah, analisis isu-isu strategis, penyajian visi, misi, tujuan , sasaran dan strategi serta arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan, penetapan indikator kinerja daerah dan pedoman transisi serta kaidah pelaksanaannya.
2. Menjamin terwujudnya *integrasi, sinkronisasi* dan *sinergisitas* berdasarkan fungsi pemerintah kabupaten sesuai dengan wilayah, ruang dan waktu.
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mencapai kabupaten yang madani.
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kondisi umum Kabupaten Bener Meriah digambarkan dalam beberapa aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan sosial, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Sub bab aspek geografi dan demografi membahas mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana dan demografi.

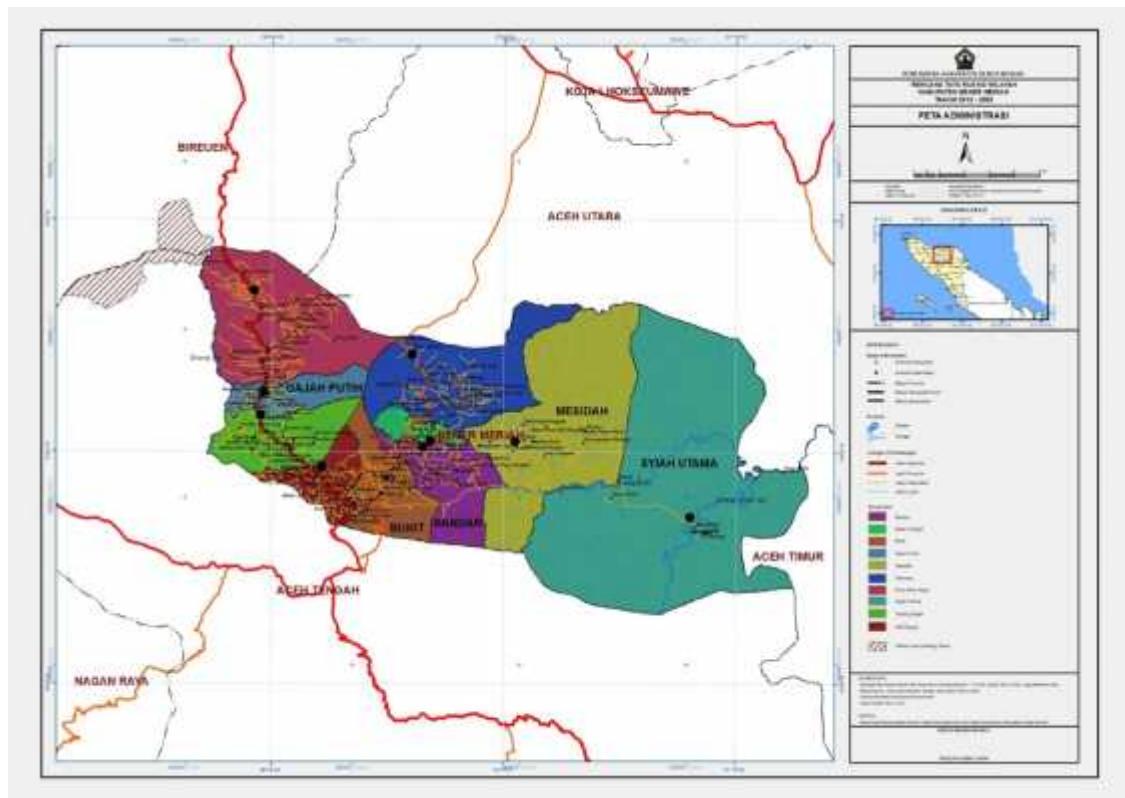
2.1.1 KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Bener Meriah memiliki posisi strategis berada di tengah-tengah Provinsi Aceh dengan Ibukota Redelong. Posisi geografis terletak pada $4^{\circ}33'50''$ - $4^{\circ}54'50''$ Lintang Utara dan $96^{\circ}40'75''$ - $97^{\circ}17'53''$ Bujur Timur. Batas wilayah Bener Meriah, Meliputi:

- a. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara;
- b. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur;
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Timur; dan
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Tengah.

Dengan ketinggian rata-rata 100 – 2500 m dpl. Bener Meriah memiliki luas wilayah darat $1.972,71 \text{ km}^2$ atau $197.271,31 \text{ Ha}$. Pada tahun 2010, secara administratif Bener Meriah memiliki 10 kecamatan yang terdiri dari 27 mukim dan 234 desa. Peta administratif Bener Meriah dapat dilihat pada Gambar 2.1.



(Sumber : Draft RTRW Bener Meriah 2012 – 2032)

Gambar 2.1 Peta Administratif Bener Meriah

2.1.1.2 Topografi

Bener Meriah memiliki klasifikasi kelerengan yang terbagi atas kelas kelerengan yaitu: 0 -8%, 8-15%, 15-25%, 25-40% dan >40%. Berdasarkan gambaran klasifikasi kelerengan tersebut, wilayah Bener Meriah tampak didominasi oleh lahan berkelerengan > 40% dengan luasan yang mencapai 89,588,16 Ha atau sebesar 40,81% dari total luas wilayah kabupaten (Tabel 2.1). Adapun pola sebaran topografi Bener Meriah dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Tabel 2.1 Topografi Bener Meriah

Kecamatan	Kelerengan					Total
	0 – 8°	8 – 15°	15 – 25°	25 – 40°	> 40°	
Bandar	16,01	2.624,29	1.408,20	1.233,71	5.018,34	10.300,55
Bener Kelipah	-	739,07	607,21	555,67	767,22	2.669,17
Bukit	261,15	3.033,35	873,89	566,16	4.787,67	9.522,22
Gajah Putih	-	256,07	1.089,98	1.024,88	3.570,86	5.941,79
Mesidah	-	579,78	6.964,41	8.265,00	18.206,28	34.015,47
Permata	-	3.855,55	3.683,96	4.639,96	7.231,62	19.414,04
Pintu Rime Gayo	-	6.811,19	6.020,73	3.909,27	7.307,65	24.048,84
Syiah Utama	-	2.893,89	9.681,24	17.382,37	38.510,33	68.467,83
Timang Gajah	-	1.439,25	2.385,53	2.716,84	3.498,58	10.040,20
Wih Pesam	-	1.936,47	2.606,55	747,84	689,61	5.980,47
Total	277,16	24.171,91	35.321,70	41.041,70	89.588,16	190.400,63 *)

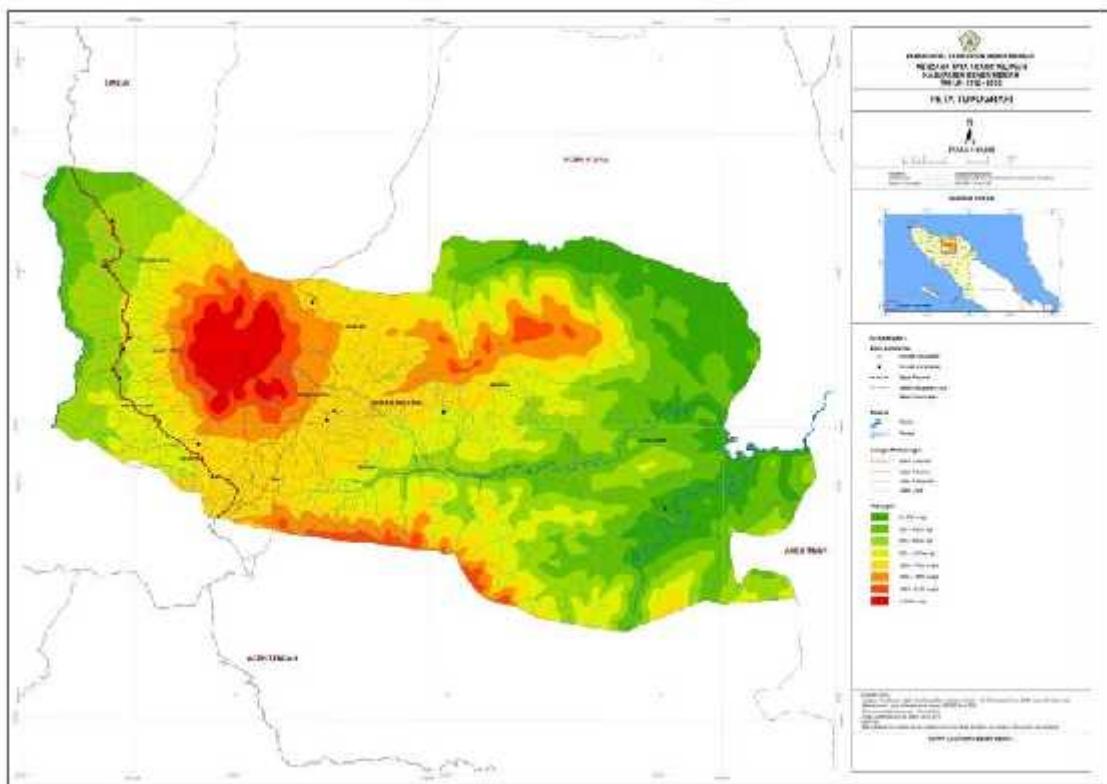
Sumber : Draft RTRW Bener Meriah 2012 – 2032

Catatan: Ada perbedaan persepsi terhadap luas wilayah Bener Meriah, BPS Bener Meriah dan Pemda Bener Meriah

2.1.1.3 Geologi

Kondisi Geologi Bener Meriah terdiri dari beberapa bebatuan dengan jenis batuan sedimen, batuan vulkanis, dan aluvial. Dominasi batuan sedimen ini hampir merata pada bagian selatan wilayah Bener Meriah, yang merupakan dataran tinggi atau berfungsi sebagai kawasan areal penggunaan lain. Sedimen ini juga terbagi oleh jenis yang diantaranya, sedimen kapur dan glaukosit dengan material halus, kemudian sedimen sedikit kandungan kapur dan material kasar konglomerat, batu pasir dan mika.

Jenis batuan yang terdapat di Bener Meriah dapat dikelompokkan menjadi batuan beku dan batuan metamorfik atau malihan, batuan sedimen dan gunung api tua, batu gamping, batuan gunung api muda, serta endapan aluvium. Batuan sedimen terutama terdapat di daerah lembah. Jenis batuan ini mempengaruhi jenis tanah yang ada.



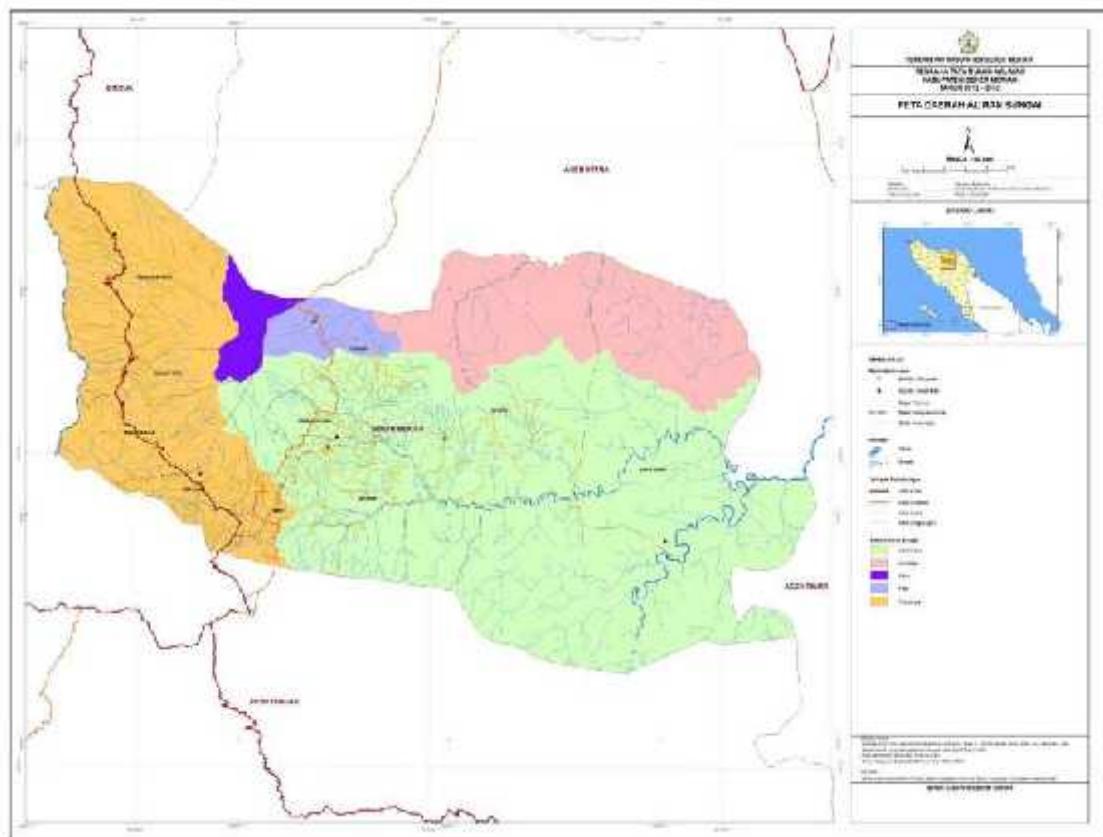
Sumber : Draft RTRW Bener Meriah 2012 – 2032

Gambar 2.2 Peta topografi Bener Meriah

2.1.1.4 Hidrologi

2.1.1.4.1 Air Permukaan

Di Bener Meriah terdapat beberapa sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Sungai besar diantaranya Sungai Jambo Aye yang airnya mengalir sampai ke Jambo Aye, Arakundo, Peureulak, Idi Rayeuk, Simpang Ulim, Peudawa Puntong, Julok Rayeuk dan Peudawa Rayeuk. Sungai Peusangan mengalir ke Pase, Peusangan, Peudada, Keureuto, Peuto, Mane, Krueng Geukeuh, Samalanga, Sawang dan Piadah. Sungai Kanis. Selain itu ada pula sungai-sungai kecil yang ada di Bener Meriah. Gambar 2.3 berikut ini merupakan gambaran Daerah Aliran Sungai yang ada di Bener Meriah.



(Sumber : Draft RTRW Bener Meriah 2012 – 2032

Gambar 2.3 Peta Daerah Aliran Sungai Bener Meriah

Peta aliran sungai tersebut memiliki potensi sumber daya air yang melimpah, seperti yang tercantum pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2 Potensi sumber daya air berdasarkan wilayah sungai

No	Wilayah Sungai	Panjang (km)	Luas DAS (km ²)	Debit Rata-Rata (m ³ / detik)
1	Jambo Aye	1.514,05	21.185,0	30,45
2	Peusangan	1.836,0	21.185,0	17,78
3	Bidin	141,115	4,76	22,5
4	Kanis	21,943	3,82	11,6
5	Pepantang	13,10	0,97	10,61
6	Wih Delung	12,701	0,071	0,45
7	Jamur Uluh	13,126	0,50	2,88
8	Enang – Enang	10,68	0,06	2,9
9	Lampahan	8,9	0,009	0,8
10	Rongka	6,8	0,019	2,4
11	Wih Kulus	15,8	0,04	1,19
Jumlah		166.489,16	35.059	103,56

Sumber : Dinas Pengairan 2012

Sampai dengan tahun 2012 beberapa potensi sungai tersebut sudah dimanfaatkan dalam pengembangan pembangkit listrik baik PLTA (skala besar) maupun PLTM untuk skala

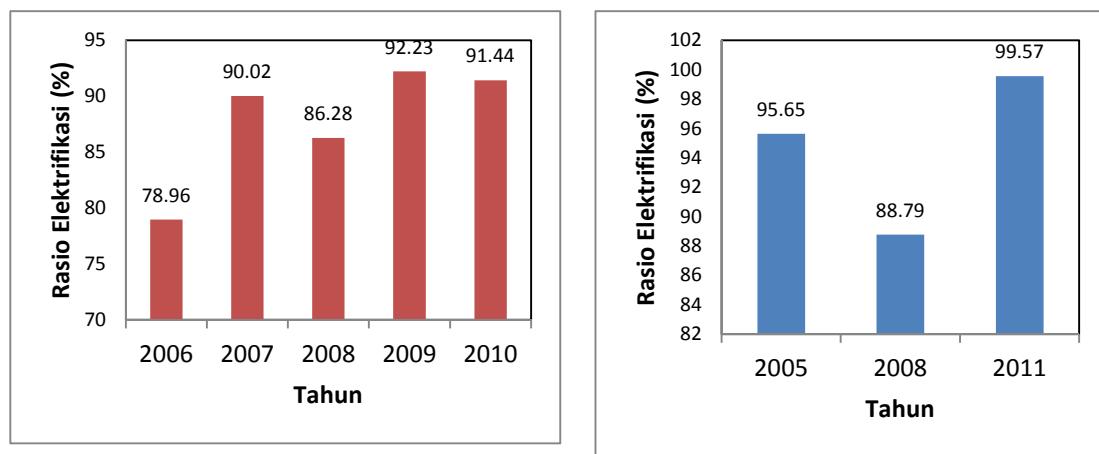
menengah. Berikut keterangan teknis pengembangan PLTM dan PLTA di Bener Meriah sampai dengan tahun 2012 (Tabel 2.3).

Tabel 2.3 Data teknis PLTM dan PLTA di Bener Meriah

Pengembangan Pembangkit Listrik	Est. Kapasitas (MW)	Pengembang	Status Pengerjaan	Proses				
				Perizinan		Pembebasan Lahan	Pelaksanaan Konstruksi	Perkiraan Beroperasi
				Izin Lokasi	Izin UKL / UPL / AMDAL			
PLTM Mangku Sosial	6,6	PT. Ilthabi Energia Tenaga Hidro	Negosiasi PPA, Pembebasan Lahan, Persiapan Base camp dan konstruksi	2011 – 2012	2011	Maret – September 2012	Oktober 2012	2014
PLTM Tembolon	2 x 2,56	PT. Global Anugrah Energi (PT Global Parasindo Jaya)	Pengajuan Izin Lokasi dan Izin UKL UPL	2012 – Proses Permohonan	2012 – Proses Permohonan	Oktober – Desember 2012	Quartal I 2013	2014 – 2015
PLTM Kanis 1	9,9	PT. Velcan Ilthabi Hydro Power	Identifikasi Project Area	2012	2011	Oktober – Desember 2012	Quartal II 2013	2015
PLTM Kanis 2	9,9	PT. Velcan Ilthabi Hydro Power	Identifikasi Project Area dan penetapan kawasan hutan yang terkena dampak pembangunan	2012	2011	2013	2014	2016
PLTA Jambo Aye	40 – 50	PT. Velcan Ilthabi Hydro Power	Pengukuran dan Pendataan Teknis	2012 – Proses Permohonan	2013	2013	2014	2018
PLTA Peusangan 4	83,4	PT. Ingako Energi	Pelaksanaan Review Studi Kelayakan	Belum	2011	Belum	2014	2018

Sumber : PD. Gayo Energi 2012, Disperindag 2012

Di sisi lain, konsumsi energi listrik di Bener Meriah, yang dinyatakan dalam rasio elektrifikasi (baik berdasarkan jumlah rumah tangga maupun desa teraliri listrik) masih perlu terus ditingkatkan untuk mencapai angka 100%. Gambar 2.4 berikut ini memperlihatkan data rasio elektrifikasi tersebut.

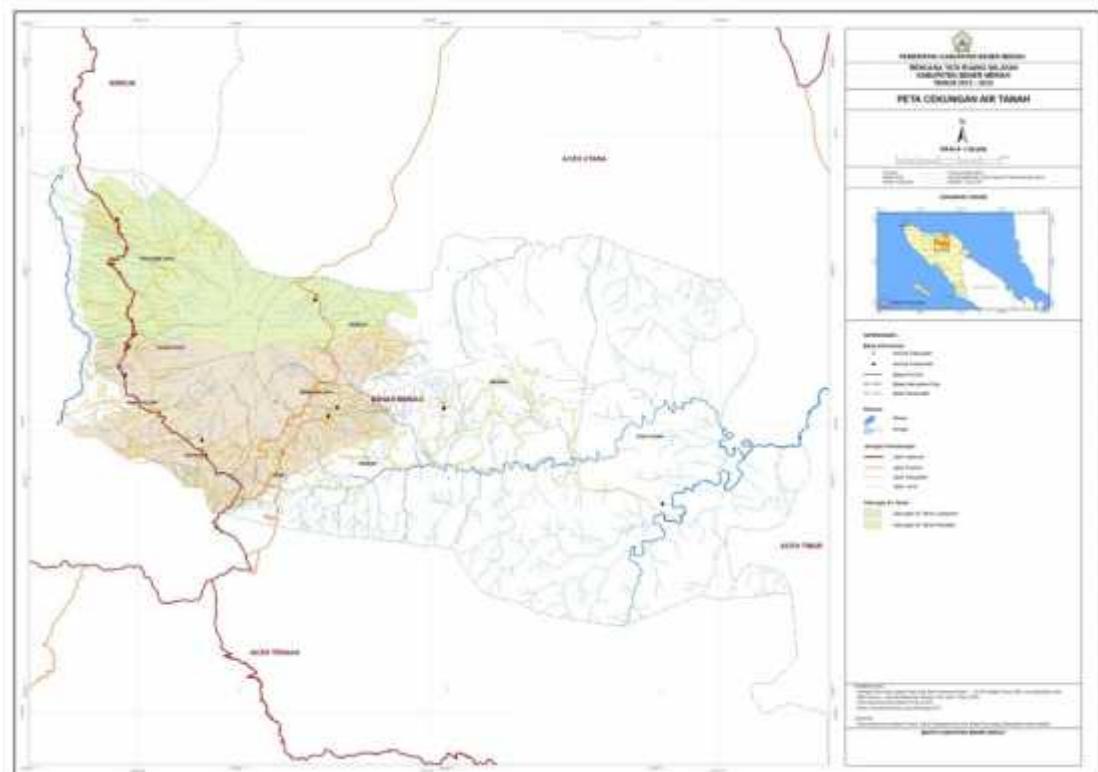


a. Berdasar rumah tangga berlistrik b. Berdasarkan desa berlistrik

Gambar 2.4 Profil Rasio Elektrifikasi 2005-2011

2.1.1.2 Air Tanah

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung dan fungsi air tanah. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan melalui pemetaan tingkat kriteria zona kerentanan air tanah. Pola sebaran cekungan air tanah yang berada di Bener Meriah dapat dilihat pada Gambar 2.5 di bawah ini.



Gambar 2.5 Cekungan Air Tanah (CAT)

2.1.1.5 Klimatologi

Data curah hujan Bener Meriah sesuai data dari Provinsi Aceh masuk dalam kategori mewakili dataran tinggi di mana curah hujan cenderung tinggi mencapai 13.327 mm/tahun dengan rata-rata 1.105,60 mm/bulan. Namun data Dinas Pertanian Bener Meriah Curah hujan rata-rata tertinggi terjadi pada Bulan Oktober 66,8 mm/hari dan Desember 9,14 mm/hari, sementara curah hujan terendah rata-rata terjadi pada Bulan Maret sampai Mei 1,08 mm/hari.

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Pada tahun 2012 luas keseluruhan lahan Bener Meriah adalah 191.969 Ha dengan perincian hutan 104.814 Ha atau 55,50% dari luas total penggunaan lahan. Luas lahan pertanian sawah adalah 3.259 Ha atau 1,73% dan lahan ladang/kebun seluas 43.765 Ha atau 22,80%. Selebihnya merupakan lahan penggunaan lainnya seluas 31.758 Ha mencapai 16,54% dari luas total Bener Meriah (Tabel 2.4).

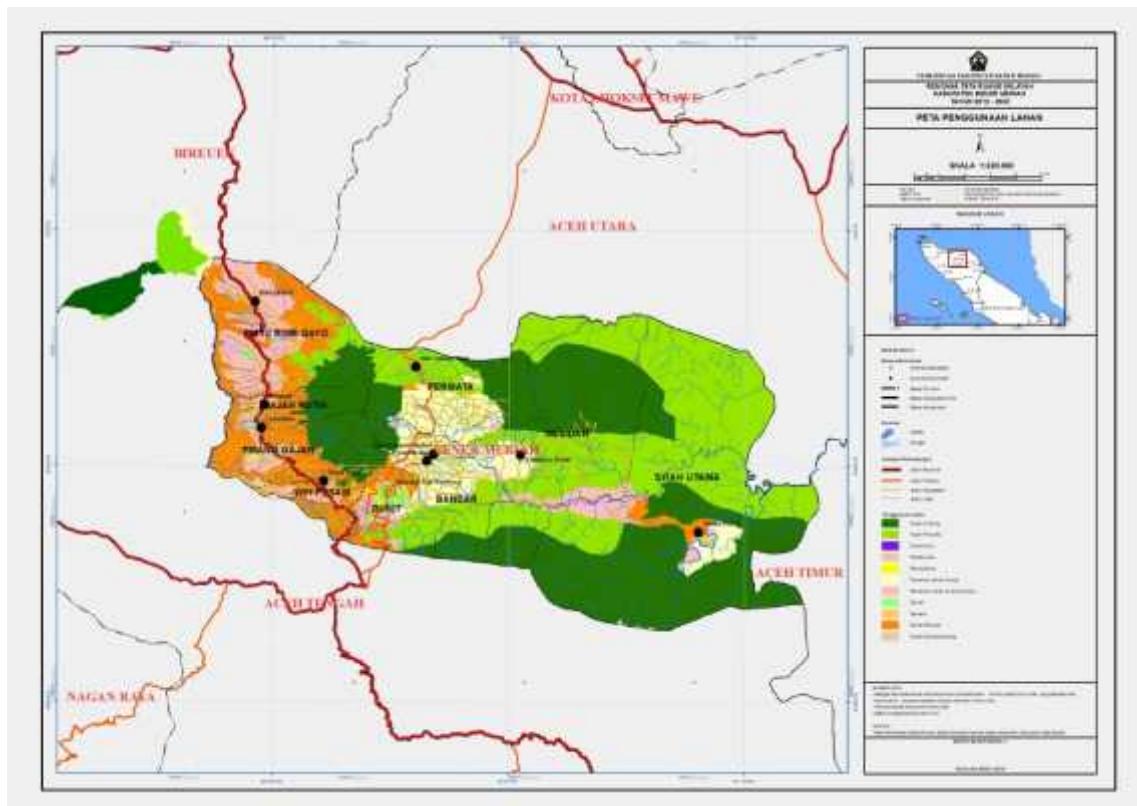
Karakteristik lahan di Bener Meriah masih didominasi oleh hutan. Adanya program perluasan lahan pertanian dan transmigrasi tahun 2010-2012 menyebabkan lahan hutan di Bener Meriah berkurang sebanyak 30.170 Ha. Konversi lahan hutan di dominasi dari pengalihan hutan produksi. Pada tahun 2010, luas hutan produksi masih 70.348 Ha, namun berkurang dari 51.338 Ha menjadi 19.010 Ha pada tahun 2012. Dengan demikian terjadi pertambahan luasan hutan lindung dari 64.636 Ha pada tahun 2010 menjadi 85.804 Ha pada tahun 2012. Luas sawah bertambah 0,7% seiring dengan upaya ekstensifikasi peningkatan produksi bahan pangan pokok berupa kegiatan percetakan sawah baru. Penambahan penggunaan lahan menjadi kebun/ladang paling tajam, mencapai 21% di mana terjadi antara tahun 2010-2012.

Tabel 2.4 Jenis penggunaan lahan Bener Meriah tahun 2010 dan 2012

Penggunaan Lahan	2010 *)		2012		Selisih **)	
	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
Persawahan	2.308,00	1,20	3.259,00	1,70	951,00	0,50
Bangunan / Perkarangan	1.399,70	0,73	8.373,00	4,36	6.973,30	3,63
Kebun / Ladang	3.138,60	1,63	43.765,00	22,80	40.626,40	21,16
Hutan Lindung	64.636,00	33,67	85.804,00	44,70	21.168,00	11,03
Hutan Produksi	70.348,00	36,65	19.010,00	9,90	-51.338,00	-26,74
Lain – lain	50.138,70	26,12	31.758,00	16,54	-18.380,70	-9,57
Jumlah	191.969,00	100	191.969,00	100	-	-

*) Data BPS Bener Meriah, DDA 2011, **) Diolah

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan , Dinas Pengairan, BPS 2012



Sumber : Draft RTRW Bener Meriah 2012 – 2032

Gambar 2.6. Peta Penggunaan Lahan Existing

Dari luas lahan yang existing persawahan tersebut diatas menunjukan peningkatan yang sangat signifikan, namun perkembangan produktifitas hasil padi yang dihasilkan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan Bener Meriah, tabel berikut menunjukan produktifitas hasil padi serta kebutuhan beras di Bener Meriah.

Tabel 2.5 Data Produksi Komoditi Padi Sawah

No	Keterangan	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Tanam (ha)	2.540	2.770	2.895	4.129	4.135
2	Panen (ha)	3.840	2.750	2.881	3.980	4.018
3	Produksi (ton)	126.720	9.088	9.551	17.136	17.625
4	Produktifitas (ton/ha)	3,30	3,30	3,32	4,31	4,39

Sumber : DISTAN TP

Tabel 2.6 Perkiraan produksi dan kebutuhan beras 2011 – 2017

No	Tahun	Perkiraan							
		Jumlah penduduk	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produktifitas (ton/ha)	produksi padi (ton)	Produksi Beras (ton)	Kebutuhan Beras (ton) *)	Kekurangan (ton)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2011	126.043	4.129	4.129	4,3	17.755	9.981,00	17.538,88	7.557,88
2	2012	129.925	4.129	4.129	4,5	18.581	10.445,23	18.079,06	7.633,83
3	2013	133.927	4.129	4.129	4,8	19.819	11.141,58	18.635,94	7.494,36
4	2014	138.052	4.129	4.129	5,0	20.645	11.605,81	19.209,94	7.604,12
5	2015	142.308	4.129	4.129	5,5	22.710	12.766,40	19.802,16	7.035,76
6	2016	146.691	4.129	4.129	6,0	24.774	13.926,98	20.412,05	6.485,08
7	2017	151.209	4.129	4.129	6,5	26.839	15.087,56	21.040,73	5.953,17

*) Angka pertumbuhan penduduk : 3,08 % , NBM : 139,15 kg/thn

Sumber : DISTAN TP

Untuk komoditi perkebunan cenderung mengalami peningkatan produksi setiap tahunnya, pada tabel berikut mengambarkan produksi beberapa komoditi yang ada di Bener Meriah .

Tabel 2.7 Luas Areal Dan Produksi Komoditi Kopi, Sawit, Kakao dan Tebu Tahun 2007 - 2011

No	Komoditi	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kopi					
	Luas Areal (ha)	39.490,01	39.490,01	43.764,49	43.764,70	45.316,04
	Produksi (ton)	25.305,03	13.189,57	15.973,83	18.660,30	21.404,05
2	Sawit					
	Luas Areal (ha)	51,45	51,45	1.051,45	1.299,95	1.300,00
	Produksi (ton)	393,03	393,03	393,03	393,03	600,00
3	Kakao					
	Luas Areal (ha)	237,13	237,13	237,13	933,13	1.300,00
	Produksi (ton)	44,59	44,59	44,59	860,40	860,40
4	Tebu					
	Luas Areal (ha)	221,70	236,70	236,70	1.391,20	1.441,20
	Produksi (ton)	1.121,40	125,40	125,40	4.258,10	4.258,10

Sumber : Disbunhut Bener Meriah

Kopi merupakan komoditi unggulan di Bener Meriah, dimana lebih dari 70% petani merupakan petani kopi, serta telah diakui dunia dengan pengakuan indikasi geografis, untuk luas areal perkebunan cenderung meningkat dari tahun ke tahunnya, namun pasca konflik tahun 2005 luas areal perkebunan kopi terlantar cenderung meningkat, hal ini disebab migrasi penduduk serta berkembangannya penyakit tanaman dan banyak tanaman kopi tua, pada tahun 2012 luas kebun terlantar mencapai 3.020,13 ha atau 5,86%.

2.1.2 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Bener Meriah mempunyai beragam kekayaan sumber daya alam antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan umum yang memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Bener Meriah. Penentuan sistem perkotaan di Bener Meriah mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut ini:

1. Kebijaksanaan RTRWN dan RTRWP Aceh.
2. Jumlah penduduk, aksesibilitas dan fasilitas pelayanan yang ada dan pengembangannya.
3. Pola pergerakan penduduk dalam pemenuhan fasilitas pelayanan.

Fungsi dan peran kawasan perkotaan di masing-masing ibukota kecamatan atau pusat-pusat pengembangan pada dasarnya sebagai berikut:

1. Fungsi tempat pasar (*market-place function*) bagi barang dan jasa konsumsi dan investasi. Selain itu juga sebagai tempat pemasaran dan pengolahan hasil pertanian.
2. Fungsi transaksi finansial berupa kemudahan kredit untuk investasi pada wilayah-wilayah pengembangan.
3. Fungsi penyediaan pelayanan pengembangan pertanian.
4. Fungsi pelayanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, komunikasi, keamanan, ibadah, rekreasi, administratif, dan lain-lain.

Kelengkapan dalam penyediaan prasarana dan sarana baik sosial maupun ekonomi pada dasarnya bergantung pada hierarki kota yang bersangkutan. Selain itu juga terdapat fungsi kota sebagai pusat administrasi pemerintahan yang mempunyai sifat pelayanan hierarkis menurut status administrasi (ibukota kabupaten, dan ibukota kecamatan). Penentuan fungsi kota ini didasari oleh kelengkapan fasilitas pusat pelayanannya yang akan dikembangkan di tiap kota. Adapun fungsi yang lain didasari oleh alasan tertentu, yaitu:

1. Fungsi pusat pelayanan sosial dan ekonomi bagi wilayah belakang dari keberadaan kota tersebut sebagai pusat pengumpul atau simpul kegiatan perdagangan.
2. Fungsi pusat komunikasi dan hubungan dilihat dari keberadaan transportasi utama dan akses ke jaringan transportasi utama.

Jika fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi interaksi langsung antara wilayah pedesaan dengan pusat regional. Hal ini akan menimbulkan ketidakefisienan, seperti tingginya ongkos transportasi, rendahnya kapasitas dan pemenuhan kebutuhan pelayanan, dan lain-lain yang pada akhirnya akan menghambat perkembangan wilayah-wilayah yang jauh dari pusat itu sendiri.

Sistem perkotaan yang membentuk pola struktur ruang di Bener Meriah selain berdasarkan analisa kondisi perkotaan sekarang ini, juga mengacu pada struktur ruang yang lebih makro, yakni pola struktur wilayah Provinsi Aceh. Pola struktur ruang yang dibentuk berdasarkan sistem perkotaan dan pusat pelayanan di Bener Meriah adalah:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Kriteria PKL adalah pusat pelayanan yang berfungsi dalam pelayanan pemerintahan, perdagangan dan jasa serta transportasi untuk skala pelayanan kabupaten. Wilayah PKL di Bener Meriah ditetapkan di **Simpang Tiga Redelong**, Kecamatan Bukit.

2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)

Melihat perkembangan yang ada saat ini, ada beberapa Kecamatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan menjadi PKLp karena memiliki sarana dan prasarana yang memungkinkan fungsi dan pelayanannya sebagai PKLp seperti tersedianya RSUD tipe C, terminal, fasilitas perkantoran, fasilitas perumahan, fasilitas pendidikan, fasilitas olah raga dan rekreasi serta fasilitas perdagangan dan jasa. Dengan ditingkatkan menjadi PKLp diharapkan dapat mendorong perkembangan wilayahnya. Kecamatan tersebut diarahkan pengembangannya ke fungsi perkotaan dengan fungsi yang dikembangkan antara lain adalah kawasan pendidikan, perdagangan dan jasa, kesehatan, permukiman perkotaan, rekreasi dan olah raga serta perkantoran. Kecamatan yang dipromosikan antara lain: Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) **Pondok Baru** di Kecamatan Bandar yang melayani beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Syiah Utama, Kecamatan Permata, Kecamatan Mesidah, Kecamatan Bener Kelipah dan Kecamatan Bandar.

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Kriteria PPK adalah pusat pelayanan yang berfungsi dalam pelayanan pemerintahan, perdagangan dan jasa serta transportasi dengan skala pelayanan kecamatan. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di wilayah Bener Meriah ditetapkan di:

- a) PPK Blang Rakal;
- b) PPK Reronga;
- c) PPK Lampahan;
- d) PPK Simpang Balek;
- e) PPK Bener Kelipah Utara;
- f) PPK Wih Tenang Uken;
- g) PPK Sosial; dan
- h) PPK Samar Kilang.

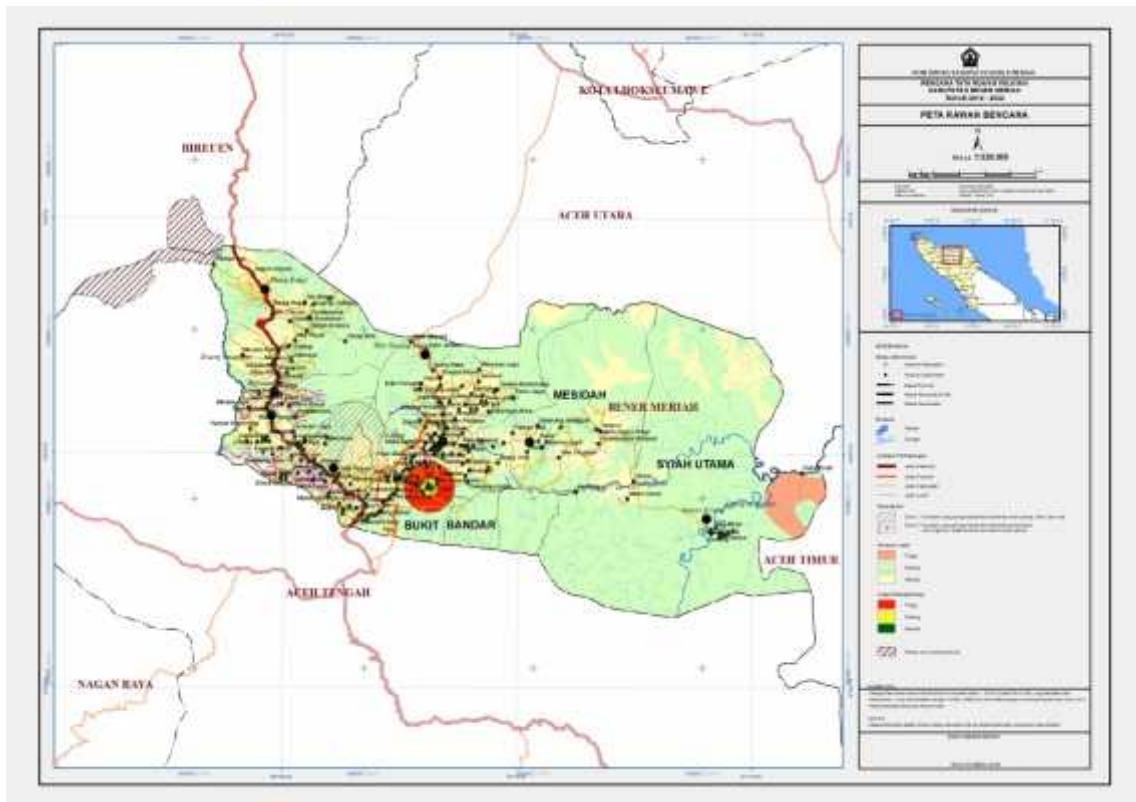
2.1.3 WILAYAH RAWAN BENCANA

Bener Meriah merupakan salah satu wilayah perbukitan dan pegunungan sehingga banyak dijumpai lahan miring ataupun bergelombang. Potensi bencana tanah longsor di Bener Meriah terjadi di sekitar kawasan pegunungan atau bukit yang dipengaruhi oleh kemiringan lereng yang curam pada tanah yang basah dan bebatuan yang lapuk, curah hujan yang tinggi, gempa bumi atau letusan gunung berapi yang menyebabkan lapisan bumi paling atas dan bebatuan berlapis terlepas dari bagian utama gunung atau bukit. Tanda-tanda terjadinya longsor dapat ditandai dengan beberapa parameter antara lain keretakan pada tanah, runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar, perubahan cuaca secara ekstrim dan adanya penurunan kualitas *landscape* dan ekosistem.

Puting beliung terjadi hampir merata di seluruh daerah dalam Provinsi Aceh tidak terkecuali di Bener Meriah walaupun dalam intensitas yang rendah. Gunung api aktif yang berada di Bener Meriah adalah Gunung Burni Telong dan Gunung Geuredong. Gunung ini terletak pada bagian selatan kabupaten atau di sebelah timur Kota Simpang Tiga Redelong (Ibukota Kabupaten). Aktifitas gunung tersebut berdasarkan penelitian menunjukkan peningkatan setelah gempa dan gelombang Tsunami yang menimpas Provinsi Aceh tanggal 26 Desember 2004 silam.

Potensi bencana gas beracun diindikasikan berada pada kawasan yang berdekatan dengan gunung berapi aktif. Dengan demikian, kawasan dengan potensi rawan bahaya gas beracun relatif sama dengan kawasan rawan letusan gunung berapi. Kawasan potensi rawan bahaya gas beracun di Bener Meriah berada di sekitar Gunung Geureedong dan Gunung Burni Telong.

Selain itu, bencana yang disebabkan bukan dari faktor alam juga sering kali terjadi di Bener Meriah, seperti bencana konflik dan wabah penyakit. Kejadian bencana-bencana tersebut memberikan dampak negatif terhadap hasil pembangunan yang sudah dicapai atau sedang berlangsung.



Sumber. RTRW Bener Meriah 2012 – 2032

Gambar 2.7 Peta Rawan Bencana

2.1.4 DEMOGRAFI

Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010, penduduk di Bener Meriah berjumlah 122.277 jiwa terdiri dari 62.059 jiwa laki-laki (50,75% dari total penduduk) dan 60.218 jiwa perempuan (49,25% dari total penduduk). Komposisi antara penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang dari tahun 2000–2010.

Dilihat dari distribusinya jumlah penduduk paling banyak di Kecamatan Bandar, yaitu sebesar 22.046 jiwa atau sebesar 18,03% dari total penduduk di Bener Meriah. Kecamatan Syiah Utama memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit, yaitu sebesar 1.298 jiwa atau sebesar 1,06% dari total penduduk.

Tabel 2.8 Perkembangan demografi Bener Meriah 2005 – 2009

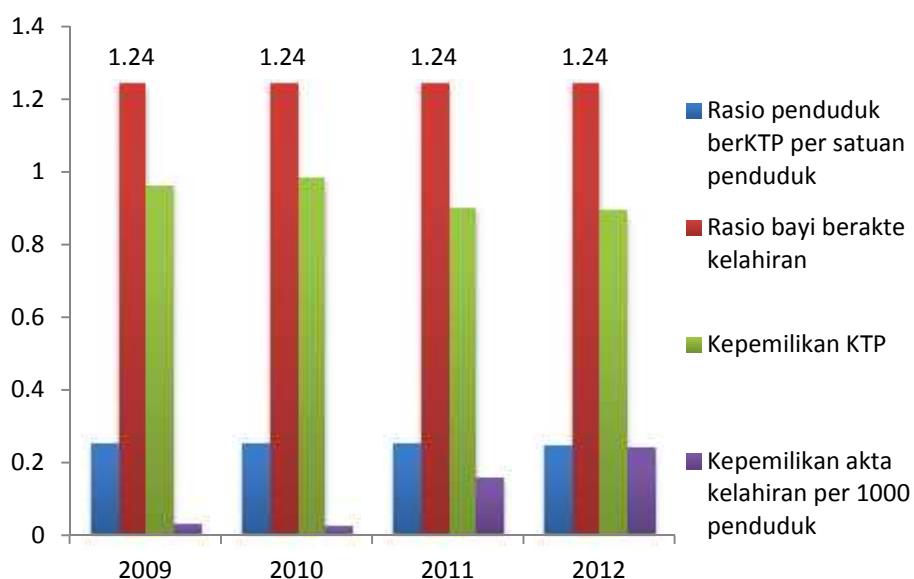
INDIKATOR	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kepadatan (jiwa/km ²)	56	60	63	65	66	64
Laju pertumbuhan	0,86	6.64	4,83	2,73	1,86	

Sumber: <http://benermeriahkab.bps.go.id>

Pada tahun 2010 kepadatan penduduk di Bener meriah sebesar 64 jiwa/Km² (Tabel 2.5). Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi tercatat di Kecamatan Wih Pesam dan Bandar. Kepadatan penduduk Kecamatan Wih Pesam dan Bandar masing-masing adalah 300 jiwa/km² dan 250 jiwa/km². Kondisi ini dimungkinkan karena kedua kecamatan tersebut memiliki akses serta sarana dan prasarana wilayah yang memadai. Sebaliknya, Kecamatan Syiah Utama dengan luas wilayah sekitar 40,42% dari wilayah Bener Meriah memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu hanya sekitar 2 jiwa/km². Pada tahun 2012, rasio penduduk berKTP per satuan penduduk tercatat 0.248 %, kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 23.80 % seperti yang terlihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.9 Data Kependudukan Bener Meriah Tahun 2009 – 2012

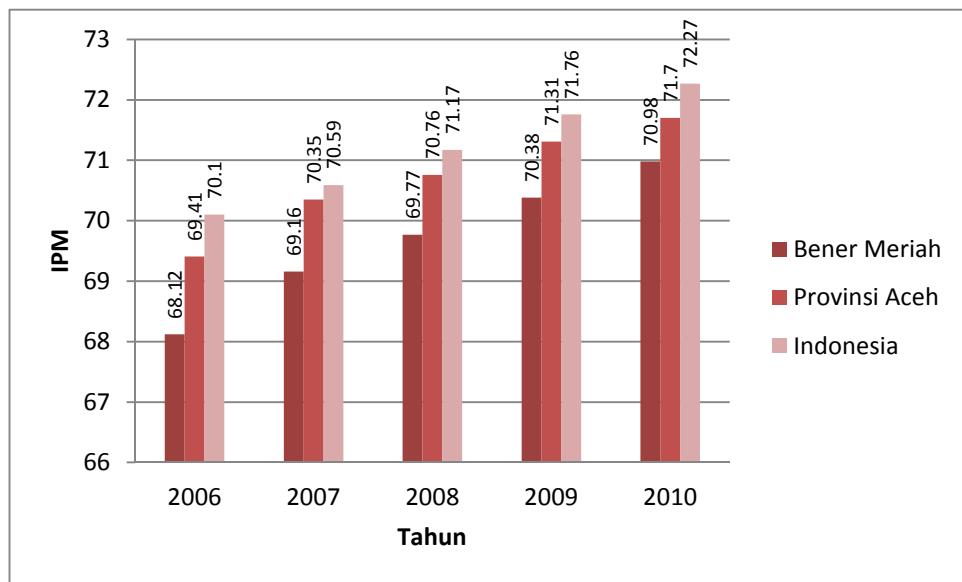
INDIKATOR	2009	2010	2011	2012
Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk	0.252	0.25	0.249	0.248
Rasio Bayi ber Akte Kelahiran	1.24	1.24	1.24	1.24
Kepemilikan KTP	0.96	0.98	0.9	0.89
Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk	2.72%	2.25%	15.80%	23.80%



Gambar 2.8 Data Kependudukan Bener Meriah, 2009 - 2012

Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index (IPM/HDI), IPM/HDI adalah satuan untuk mengukur kesuksesan pembangunan suatu wilayah. IPM/HDI adalah angka yang diolah berdasarkan tiga dimensi: yaitu panjang usia (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan

standar hidup (*standard of living*) suatu wilayah. IPM Bener Meriah tahun 2011 adalah 70,98. Data tahun 2006-2010 menunjukkan peningkatan yang konstan. Namun angka ini masih di bawah rata-rata Aceh dan Nasional (Gambar 2.7).



Gambar 2.9 Perkembangan IPM Bener Meriah 2006 – 2010

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL

2.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

2.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan penerapan kebijakan pembangunan ekonomi. Keberhasilan tujuan otonomi daerah untuk memperkuat perekonomian Bener Meriah nampaknya terlihat dari PDRB Bener Meriah berdasarkan harga konstan dan harga berlaku yang terus meningkat. Atas dasar harga konstan, PDRB Bener Meriah menunjukkan peningkatan rata-rata 4,5% per tahun dalam lima tahun terakhir. Nilai PDRB Bener Meriah atas dasar harga konstan tahun 2011 hampir mencapai 800 miliar rupiah (Tabel 2.7).

Tabel 2.10 PDRB Bener Meriah tahun 2007 – 2011

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	Nilai (Rp Juta)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp Juta)	Pertumbuhan (%)
2007	1.146.666,69	12,48	661.863,19	4,24
2008	1.343.963,43	17,31	690.306,66	4,30
2009	1.572.898,48	17,04	721.644,27	4,54
2010	1.780.389,79	13,19	756.359,92	4,81
2011*	1.985.889,85	11,54	794.975,57	5,11

* Angka Sementara. Sumber : BPS Bener Meriah 2012

Besaran nilai PDRB merupakan rata-rata tingkat pertumbuhan sektor yang bekontribusi. Apabila sebuah sektor mempunyai kontribusi besar dan pertumbuhannya

lambat, maka akan menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor memiliki kontribusi yang besar terhadap totalitas perekonomian dan mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi, maka sektor tersebut akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi secara total.

Seluruh sektor ekonomi di Bener Meriah dari tahun 2009 sampai dengan 2011 mengalami pertumbuhan positif. Data pada Tabel 2.8 menunjukkan bahwa sektor pertanian sangat dominan kontribusinya di Bener Meriah. Walaupun pada periode tahun 2009-2011, pertumbuhan sektor ini tidak terlalu tinggi, namun berkontribusi hampir setengah struktur ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan penggerak utama sektor ekonomi Bener Meriah. Oleh karena itu, strategi pembangunan sektor pertanian harus mampu mengubah pola pertanian subsistem ke pola pertanian komersial yang terspesialisasi.

Tabel 2.11 Peranan pertumbuhan sektoral dan struktur ekonomi Bener Meriah tahun 2009-2011

No	Sektor	Peranan pertumbuhan sektoral terhadap PDRB (%)			Struktur ekonomi (%)			
		2009	2010	2011*	2008	2009	2010	2011*
1	Primer				55,12	53,41	51,82	50,88
	Pertanian	1,17	1,59	3,12	54,35	52,6	50,98	50,02
	Pertambangan & Penggalian	9,74	8,47	7,98	0,77	0,81	0,84	0,86
2	Sekunder				11,85	12,38	12,78	12,84
	Industri Pengolahan	6,61	6,55	10,47	3,43	3,5	3,56	3,74
	Listrik & Air Minum	29,42	16,21	13,33	0,6	0,75	0,83	0,89
	Bangunan & Konstruksi	8,70	8,21	2,86	7,82	8,13	8,39	8,21
3	Tersier				33,03	34,21	35,4	36,28
	Perdagangan, Hotel & Restoran	8,03	8,99	9,92	9,45	9,76	10,15	10,62
	Pengangkutan & Komunikasi	8,37	8,36	6,75	4,04	4,19	4,33	4,4
	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	10,08	9,47	4,53	1,65	1,74	1,82	1,81
	Jasa-jasa	8,27	8,09	7,03	17,89	18,52	19,1	19,45
Rata-rata/Total		4,54	4,81	5,11	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara. Sumber : BPS Bener Meriah 2012

Sektor kedua terbesar yang berkontribusi terhadap struktur ekonomi adalah sektor bangunan dan konstruksi, yang menyumbang hampir seperlima dari total. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran juga menunjukkan peningkatan yang hampir mencapai 10% per tahun. Sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi pada tahun 2009-2011 adalah sektor listrik dan air minum, sebesar 29,42%, walaupun peranannya dalam sektor ekonomi sangat kecil. Dukungan situasi daerah yang kondusif dan aman sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Bener meriah, terutama sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan pembangunan seperti sektor bangunan/konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa.

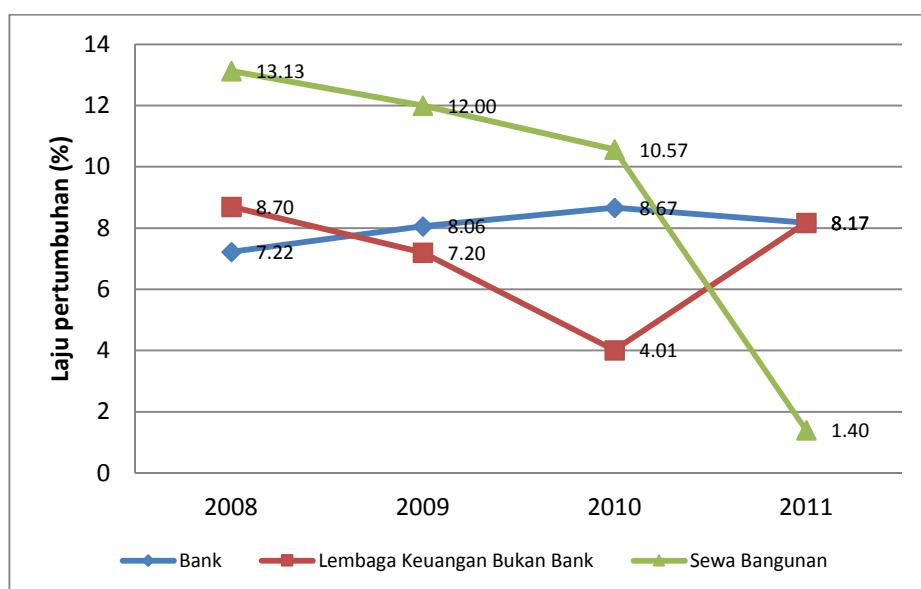
Tabel 2.12 Pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian Bener Meriah tahun 2009 – 2011

No	Sub Sektor	Pertumbuhan (%)		
		2009	2010	2011
1	Tanaman Bahan Makanan	9,60	9,21	0,62
2	Tanaman Perkebunan	8,26	6,26	5,39
3	Peternakan	8,25	4,45	0,35
4	Kehutanan	-19,33	-18,23	0,24
5	Perikanan	6,31	2,63	0,02
Sektor Pertanian		1,17	1,59	3,12

Sumber: BPS Bener Meriah 2012

Pertumbuhan sektor pertanian ini dipengaruhi oleh pertumbuhan masing-masing sub sektornya. Pertumbuhan tertinggi sektor pertanian pada tahun 2011 terjadi pada sub sektor perkebunan sebesar 5,39%, sementara sub sektor perikanan hanya tumbuh sebesar 0,02% (Tabel 2.9). Peningkatan yang tinggi pada sub sektor perkebunan sangat ditunjang oleh perkebunan kopi yang merupakan produk andalan Bener Meriah. Sektor tanamanan bahan makanan dan peternakan menunjukkan penurunan yang tajam dalam tiga tahun terakhir.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mengalami pertumbuhan sebesar 4,53% pada tahun 2011. Pertumbuhan sektor ini mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang pertumbuhannya mencapai 9,47%. Sub sektor bank tumbuh sebesar 8,17% di mana angka ini mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya yaitu 8,67%. Sub sektor Bank merupakan sub sektor yang mengalami peningkatan cukup signifikan di tahun sebelumnya yang mencapai 8,67%, tetapi pada tahun 2011 sub sektor hanya tumbuh sebesar 8,17%. Jika dibandingkan dengan sub sektor lainnya, sub sektor bank selalu mengalami peningkatan yang stabil, sehingga diharapkan di periode berikutnya akan memberikan dampak yang lebih baik bagi perekonomian Bener Meriah secara keseluruhan. Sub sektor lembaga keuangan bukan bank dan sub sektor sewa bangunan tumbuh masing-masing sebesar 8,17% dan 1,4% (Gambar 2.8). Dukungan yang disumbangkan oleh sektor moneter turut mempercepat pertumbuhan di sektor riil.



Gambar 2.10 Laju pertumbuhan PDRB Bener Meriah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tahun 2008–2011

2.2.1.2 PDRB Per Kapita

Perekonomian suatu daerah baru dapat dinyatakan berkembang apabila rata-rata pendapatan per kapita menunjukkan kecenderungan meningkat dalam jangka panjang. PDRB per kapita menunjukkan besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Perhitungan PDRB per kapita dapat dilakukan dengan membagi total PDRB terhadap jumlah penduduk. Bila ditinjau dari PDRB atas dasar harga berlaku, besarnya PDRB per kapita mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 2.10).

Tabel 2.13 PDRB per kapita Bener Meriah tahun 2008 – 2011

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	Nilai (Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2008	11.941.051,72	15,73	6.133.387,77	2,90
2009	13.741.425,08	15,08	6.304.552,26	2,79
2010	14.560.299,89	5,96	6.182.627,06	-1,89
2011*	15.877.465,30	9,05	6.355.940,01	2,80

* Angka Sementara, Sumber : BPS Bener Meriah 2012

PDRB per kapita Bener Meriah berdasarkan harga berlaku tumbuh sekitar 11,5% per tahun dalam empat tahun terakhir. Namun demikian, ada perlambatan pertumbuhan pada tahun 2010, dimana PDRB per kapita hanya tumbuh sekitar 6%. Peningkatan kembali terlihat pada tahun 2011, yaitu sekitar 9,05% pada tahun 2011. PDRB per kapita atas dasar harga konstan tumbuh sekitar 1,65% per tahun dalam empat tahun terakhir. Nilai PDRB ini menunjukkan pertumbuhan negatif pada tahun 2010. Nilai PDRB per kapita berdasarkan harga konstan pada tahun 2011 adalah sekitar 6,35 juta rupiah.

Indikator lain yang dapat memberikan keterangan mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan regional per kapita (Tabel 2.11). Sama halnya dengan PDRB per kapita, pada tahun 2008 berdasarkan harga berlaku, terjadi peningkatan pendapatan sebesar 15,73% yaitu sebesar 11,31 juta rupiah. Sepanjang periode tahun 2008 hingga 2011, peningkatan pendapatan regional per kapita di Bener Meriah terus terjadi. Pada tahun 2009, pendapatan regional per kapita Bener Meriah mencapai 13,02 juta rupiah atau meningkat sebesar 15,08%. Pada tahun 2010 pendapatan regional per kapita tumbuh 5,65%, dan pada tahun 2011 pertumbuhannya sebesar 9,37% atau senilai dengan 15,04 juta rupiah.

Tabel 2.14 Pendapatan regional per kapita Bener Meriah tahun 2008 – 2011

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	Nilai (Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2008	11.314.317,71	15,73	5.804.314,32	2,90
2009	13.020.197,28	15,08	5.966.295,36	2,79
2010	13.755.405,35	5,65	5.843.624,67	-2,05
2011*	15.044.126,05	9,37	5.963.338,84	2,05

* Angka sementara. Sumber: BPS Bener Meriah 2012

Kemudian bila dihitung berdasarkan harga konstan, pendapatan regional per kapita Bener Meriah juga mengalami kenaikan sebesar 2,90% di tahun 2008. Tahun 2009, pertumbuhan pendapatan regional per kapita menjadi 2,79% atau setara dengan 5,96 juta rupiah per tahun. Pada tahun 2010, pendapatan regional per kapita mengalami penurunan sebesar 2,05% (5,84 juta rupiah). Namun demikian pada tahun 2011 pendapatan regional per

kapita penduduk Bener Meriah mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,05% yang setara dengan 5,96 juta rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.2.1.3 Inflasi/Deflasi

Inflasi/deflasi merupakan gambaran tentang terjadinya perubahan harga. Apabila tingkat inflasi naik, dapat dipastikan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Fluktuasi harga yang terjadi akan berpengaruh pada daya beli konsumen sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Indeks ini dapat juga diturunkan dari PDRB yang disebut sebagai PDRB deflator atau yang dikenal dengan indeks implisit. Indeks ini merupakan perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan.

Rata-rata inflasi indeks harga implisit PDRB pada tahun 2011 adalah sebesar 8,2%, sedikit turun dibandingkan pada tahun 2010 yang menunjukkan angka 9,6% (Tabel 2.21). Inflasi tertinggi di tahun 2011 terjadi pada sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yaitu sebesar 19,45%, diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi 11,86%. Sektor dengan inflasi terendah pada tahun 2011 adalah sektor industri pengolahan yaitu sebesar 0,17%. Hal ini wajar karena sector ini memberikan kontribusi sangat kecil terhadap struktur ekonomi.

Tabel 2.15 Indikator inflasi indeks harga implisit PDRB Bener Meriah menurut sektor

SEKTOR	Inflasi Indeks Harga Implisit PDRB (%)				
	2007	2008	2009	2010	2011
1. Pertanian	2,25	9,82	4,89	5,96	3,71
2. Pertambangan dan penggalian	14,84	8,96	4,59	7,99	5,36
3. Industri pengolahan	8,81	8,68	1,93	4,89	0,17
4. Listrik dan air minum	14,76	13,89	3,2	13,34	8,49
5. Bangunan/kontruksi	41,54	28,2	42,21	9,17	9,20
6. Perdagangan, hotel dan restoran	8,06	14,42	13,02	11,09	9,35
7. Pengangkutan dan komunikasi	27,15	17,62	17,99	16,34	11,86
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	11,49	31,41	33,83	12,8	19,45
9. Jasa-jasa	4,43	4,42	4,36	5,13	6,24
Rata-rata	14,8	15,3	14,0	9,6	8,2

Sumber : BPS Bener Meriah 2012

2.2.1.4 Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk (kota) ke daerah lain (desa) di dalam wilayah Indonesia. Tujuan resmi program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya. Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari Pemerintah Pusat, melainkan berdasarkan Kerjasama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Penduduk setempat semakin diberi kesempatan besar untuk menjadi

Transmigran Penduduk Setempat (TPS), proporsinya hingga mencapai 50:50 dengan Transmigran Penduduk Asal (TPA).

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Bener Meriah tahun 2012, Bener Meriah memiliki 2 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) dengan jumlah KK sebanyak 200 KK yang terdiri dari 825 jiwa (Tabel 2.13).

Tabel 2.16 Pembangunan Transmigrasi di Bener Meriah

Kecamatan	Jumlah UPT	Jumlah Penempatan	
		KK	Jiwa
Syiah Utama	1	100	
Pintu Rime Gayo	1	100	
Jumlah	2	200	825

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2012

2.2.1.5 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Bener Meriah pada tahun 2010 bertambah sebesar 26,25% atau sejumlah 32.100 orang, di mana pada tahun 2009, jumlah orang miskinnya adalah 23%. Angka ini jauh di atas angka kemiskinan Provinsi Aceh dan nasional yang masing sebesar 19,95% dan 13,33% pada tahun yang sama. Tabel 2.14 berikut menjelaskan perkembangan tingkat kemiskinan di Bener Meriah dari tahun 2005-2010

Tabel 2.17 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Bener Meriah Tahun 2005-2010

Uraian	Tahun					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Angka Kemiskinan (%)	28,92	26,68	23,68	25,66	23,02	26,30
Jumlah Penduduk Miskin	30.700	30.200	28.100	31.280	28.580	32.160
Jumlah Penduduk	106.150	113.19	118.660	121.900	124.170	122.280

Sumber: BPS Bener Meriah 2011

2.2.1.6 Angka Kriminalitas

Menurut Data Kepolisian Resort Bener Meriah Tahun 2012 bahwa jumlah kasus yang dilaporkan dari tahun 2007 sampai tahun 2011 terus bertambah. Tindak kejahatan tahun 2007 berjumlah 63 kasus, tahun 2008 bertambah dari tahun sebelumnya menjadi 152 kasus, 269 kasus di tahun 2009, lalu melonjak drastis di tahun 2010 sebanyak 302 kasus namun tahun 2011 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 286 kasus namun hanya 269 kasus yang terselesaikan. Selain pelanggaran lalulintas dan kecelakaan lalulintas Kasus pencurian cenderung meningkat dan merupakan kasus tertinggi di Bener meriah, dan kasus KDRT dan kasus pemeriksaan memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah daerah dari data kasus KDRT dan Pemeriksaan cenderung meningkat dan angka yang tinggi, Berikut Tabel 2.15 tentang jumlah kasus pidana dan perdata yang ada di Bener Meriah.

Tabel 2.18 Jumlah Perkara Sejak Tahun 2008 – 2012

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Pertahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
KDRT	13	5	34	29	13
Pemerkosaan Anak	7	3	12	8	4
Trafficking	0	1	1	1	0
Pembunuhan	2	0	0	0	1
Perampokan	0	0	11	0	0
Pencurian	33	39	59	70	71
Laka Lantas	8	9	22	19	15
Pelanggaran Lalu Lintas	872	1482	2526	2546	1436
Lain-lain	107	69	185	179	111

Sumber: Polres Bener Meriah

2.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

2.2.2.1 Pendidikan

Angka melek huruf di Bener Meriah tahun 2010 adalah 98,50% (Tabel 2.16). Angka ini sedikit di atas rata-rata Propinsi Aceh yang sebesar 96,88%. Angka rata-rata lama sekolah terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010, Angka rata-rata lama sekolah di Bener Meriah adalah 8,87 tahun, sedikit di bawah nilai Propinsi Aceh yang sebesar 8,81 tahun. Namun angka ini masih lebih tinggi dari rata-rata angka melek huruf nasional 7,92 tahun.

Tabel 2.19 Angka melek huruf dewasa dan angka rata-rata lama sekolah Bener Meriah tahun 2005-2009

Indikator	Wilayah	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
Angka melek huruf dewasa (%)	Bener Meriah	95,56	97,19	97,09	98,61	98,50
	Aceh	94,27	94,51	95,94	96,39	96,88
Rata-rata lama sekolah (tahun)	Bener Meriah	8,10	8,49	8,49	8,53	8,77
	Aceh	8,50	8,50	8,50	8,63	8,81

Sumber : BPS Bener Meriah 2012

2.2.2.2 Kesehatan`

Status kesehatan masyarakat dapat digambarkan melalui beberapa indikator utama, yaitu: angka kematian, umur harapan hidup, status gizi, angka kesakitan,kondisi lingkungan dan juga pola perilaku.

2.2.2.4.1 Angka Kematian

Angka kematian difokuskan pada tiga indikator kematian utama, yaitu: Angka Kematian Bayi (AKB),Angka Kematian Balita (AKABA) dan Angka Kematian Ibu (AKI).

Angka kematian bayi

Angka Kematian Bayi di Bener Meriah tahun 2008 per 1000 kelahiran berjumlah 38,3 jiwa, dan pada tahun 2009 menurun menjadi 37,88 jiwa, angka ini masih diatas rata – rata provinsi dan nasional, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.17 berikut.

Tabel 2.20 Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran

No	Uraian	2008	2009
1	Nasional	32,2	31,42
2	Aceh	34,2	33,69
3	Bener Meriah	38,3	37,88

Sumber : BPS bener Meriah 2012

Angka kematian balita angka kematian ibu melahirkan

Angka kematian balita di Bener Meriah cenderung meningkat setiap tahunnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.18 berikut.

Tabel 2.21 Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu Melahirkan
di Bener Meriah Tahun 2006 – 2012

No	Indikator	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Angka Kematian Balita (Bayi dan Balita)	32	21	60	32	56
2	Angka Kematian Ibu Melahirkan	2	9	3	6	7

Sumber Dinas Kesehatan Bener Meriah 2012

2.2.2.4.2 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa itu. Angka ini adalah indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam bidang kesehatan terutama untuk menilai status derajat kesehatan serta digunakan juga dalam menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka harapan hidup di bener meriah pada tahun 2008 adalah 67,41 tahun artinya bahwa rata – rata perkiraan usia masyarakat hidup di bener meriah tahun 2008 adalah 67,4 tahun. Derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari usia harapan hidup yang semakin meningkat yaitu di atas 67 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.19 berikut.

Tabel 2.22 Angka harapan hidup Bener Meriah Tahun 2007 – 2010

Provinsi	2007	2008	2009	2010
Bener Meriah	67,31	67,41	67,52	67,63
Aceh	68,40	68,50	68,60	68,70
Nasional	68,7	69,00	69,21	69,43

Sumber : BPS 2011

2.2.2.4.3 Status Gizi Prevalensi Balita Kekurangan Gizi

Prevalensi balita kurang gizi di bener meriah pada tahun 2008 berjumlah 1,5 %, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 4,1 %, angka ini dibawah rata – rata provinsi dan

nasional, namun pada tahun 2011 meningkat menjadi 3,51 %, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.20 berikut.

Tabel 2.23 Prevalensi Gizi Balita Kekurangan Gizi

No	Uraian	2008	2010	2011
1	Nasional	8,1		
2	Aceh	15,6		
3	Bener Meriah	1,5	4,1	3,51

Sumber : BPS 2011

2.2.2.3 Sosial

Dari data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diperoleh dari Dinas Sosial Bener Meriah, menunjukkan masih tingginya masyarakat rawan sosial di Bener Meriah, diantaranya jumlah keluarga miskin yang mencapai 1.002 KK, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut.

Tabel 2.24 Data PMKS Bener Meriah

No	Nama	2011										Bener Meriah
		Weh Pesam	Bukit	Timang Gajah	Gajah Putih	Bener Kelipah	Bandar	Mesidah	Permata	Pintu Rime	Siyah utama	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Wanita Rawan Sosial Ekonomi		150	-	165		241	14	165	450	3	1188
	1). Anak jalanan		4	-	-		-	-	-	-	-	4
	2). Anak yatim		-	270	130		384	-	380	233	-	1397
	3). Anak piatu		-	34	4		-	-	40	50	-	128
	4). Anak yatim piatu		-	-	4		-	-	15	20	-	39
	5). Gepeng (gembel dan pengemis)	13	-	-	-		5	-	-	-	-	18
	6). Jumlah penderita HIV/AIDS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0
	7). Jumlah pecandu narkoba	-	1	-	-		1	-	-	-	-	2
	8). Sarana rehabilitasi sosial	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0
	9). Fakir miskin	534	1200	1141	423		1271	215	620	1000	110	6514
	10). bayi terlantar	-	-	-	-		-	-	1	-	-	1
	11). Anak terlantar	13	59	39	-		11	15	1	-	4	142
	12). Lanjut usia terlantar	39	-	-	1		-	-	155	2	-	197
	13). Pemukiman pedesaan	-	1	4	-		-	-	-	-	-	4
	14). Penyandang cacat	67	150	146	16		115	115	53	-	8	670
	15). Penyandang tuna netra	3	6	-	1		-	-	4	-	-	14
	16). Penyandang tuna rungu	2	-	16	6		-	-	5	-	-	29
	17). Penyandang tuna wicara	4	-	15	3		-	-	1	-	-	23
	18). Penyandang tuna wicara-rungu	5	17	15	-		-	-	13	-	-	50
	19). Penyandang tuna daksa	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0
	20). penyandang tuna grahitा	3	-	-	-		-	-	-	-	-	3
	21). penyandang cacat jiwa	21	-	42	15		-	-	1	-	-	79
	22). Penyandang cacat ganda	23	5	14	1		-	-	1	-	-	43
	23). Pengungsi dan cacat ganda	-	50	-	61		-	-	-	-	-	111
	24). Tuna susila	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0
	25).bekas narapidana	16	7	6	10		11	5	15	-	9	79
	26). pengidap HIV/AIDS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0
	27). Korban penyalah gunaan NAPZA	9	-	-	-		-	1	-	1	-	11
2	jumlah panti asuhan	-	10	-	-		-	-	-	-	-	10
	1). Panti sosial asuhan anak	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0
	2). Panti sosial petirahan anak	-	-	-	1		-	-	-	-	-	1
	3). Panti sosial bina remaja	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0
	4). Panti sosial Tresna wirda	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0
	5). Panti sosial bina netra	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0
	6). Panti sosial Bina daksa	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0
	7). Panti sosial bina grahitā	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0
	8). Panti sosial bina laras	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0
	9). Panti sosial bina rungu wicara	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0
3	potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)											0
	a. Karang taruna	11	-	8	8		13	-	7	15	-	62
	b. Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM)	27	-	1	1		1	-	20	69	-	119
	c. Organisasi sosial	2	-	-	-		-	-	-	2	-	4
4	kemiskinan											0
	a. Batas kemiskinan										1002	1002
	1). Batas kemiskinan pedesaan									1002		1002
	2). Batas kemiskinan perkotaan									-		0
5	keluarga miskin									1043		1043

Sumber: Dinas Sosial Bener Meriah 2012

Tabel 2.25 Data Penyandang Cacat Kabupaten Bener Meriah

No.	Kecamatan	Jumlah Penyandang Cacat	Produktif	% Produktif
1	Weh Pesam	116	33	28,45
2	Syiah Utama	11	7	63,64
3	Bandar	172	73	42,44
4	Bener Kelipah	53	7	13,21
5	Mesidah	9	5	55,56
6	Permata	77	50	64,94
7	Timang Gajah	146	116	79,45
8	Pintu Rime Gayo	75	45	60,00
9	Gajah Putih	48	5	10,42
10	Bukit	118	53	44,92
Jumlah		825	394	47,76

Sumber: Dinas Sosial Bener Meriah 2012

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB

2.3.1.1 Pendidikan

2.3.1.4.1 APK, APM dan APS

Pembangunan pendidikan Bener Meriah telah menghasilkan kemajuan terkait pemerataan akses. Hal ini terlihat dari baiknya pencapaian indikator-indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) periode 2007-2011 untuk jenjang pendidikan dasar. Namun demikian, ada fluktuasi yang terjadi pada periode tertentu. Sebagai contoh, APS SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C tahun 2010 juga turun sekitar 6,3% dibandingkan tahun 2009. Selain itu, APS SMP/MTs/SMPLB/Paket B, pada tahun 2011 turun sekitar 6,5% dibandingkan tahun sebelumnya (Tabel 2.22). Selain itu, diperkirakan terdapat 2% siswa kelompok usia sekolah dasar yang belajar pada pendidikan non formal dan Dayah Tradisional.

Tabel 2.26 APK, APM dan APS Pendidikan Dasar dan Menengah di Bener Meriah Tahun 2007-2011

Uraian	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
APK	SD/MI/SDLB/Paket A	109,33	113,75	110,64	105,10
	SMP/MTs /SMPLB/Paket B	95,29	92,40	89,67	91,73
	SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	87,18	84,85	76,70	82,56
APM	SD/MI/SDLB/Paket A	97,93	99,46	97,29	97,02
	SMP/MTs /SMPLB/Paket B	84,71	88,08	79,73	80,64
	SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	66,03	76,46	64,89	63,20
APS	SD/MI/SDLB/Paket A	99,74	99,46	99,00	98,95
	SMP/MTs /SMPLB/Paket B	97,65	97,35	93,69	93,73
	SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	73,72	77,10	73,37	67,69

Sumber : BPS dan Dinas Pendidikan 2012

Dalam mengantisipasi pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun, maka indikator-indikator yang terkait akses pendidikan SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C masih perlu ditingkatkan. Selain itu, pendidikan anak usia dini harus mendapatkan perhatian yang serius karena pembentukan karakter perlu dilakukan sejak dini. Selain itu pendidikan non-formal untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat juga masih perlu ditingkatkan.

2.3.1.4.2 Rasio antara guru dan murid jenjang pendidikan dasar

Secara umum, jumlah guru di Bener Meriah untuk jenjang pendidikan dasar sudah sangat memadai. Secara rata-rata, seorang guru pada jenjang pendidikan SD/MI di Bener Meriah melayani 8 orang siswa. Rasio tertinggi terjadi di Kecamatan Bener Kelipah (1 : 5,3) dan Kecamatan Bukit (1 : 6). Rasio ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rasio guru terhadap jumlah murid SD/MI di Provinsi Aceh yang sebesar 1 : 11 (rata-rata satu orang guru melayani sekitar 11 siswa). Standar nasional pendidikan mensyaratkan rasio 1 : 17 untuk SD/MI (Tabel 2.23).

Tabel 2.27 Rasio Siswa : Guru Bener Meriah SD / MI Tahun 2012

Kecamatan	Jumlah			Total Guru	Total Siswa	Rasio
	Guru negeri	Guru swasta & Guru tidak tetap	Siswa Negeri			
Pintu Rime Gayo	85	96	1376	155	181	1531 1 : 8,5
Permata	86	134	1912	107	220	2019 1 : 9,2
Syah Utama	23	37	529		60	529 1 : 8,8
Bandar	184	119	2746		303	2746 1 : 9,1
Bukit	215	93	1849		308	1849 1 : 6,0
Wih Pesam	192	113	2545	8	305	2553 1 : 8,4
Timang Gajah	133	111	2179		244	2175 1 : 8,9
Gajah Putih	55	54	949		109	943 1 : 8,7
Bener Kelipah	23	23	242		46	242 1 : 5,3
Mesidah	10	26	292	21	36	313 1 : 8,7
Bener Meriah	1006	806	14619	291	1812	14910 1 : 8,2

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga 2012

Rasio guru terhadap siswa tingkat SMP/MTS di Bener Meriah sebesar 1 : 6,7 dimana satu orang guru melayani hampir 7 orang siswa. Rasio terendah teramat di kecamatan Gajah Putih (1 : 9,1), sementara rasio tertinggi tercatat di Kecamatan Bener Kelipah dan Mesidah (1 : 2,7) (Tabel 2.23). Rasio untuk Provinsi Aceh adalah 1 : 10. Rasio yang ditetapkan adalah 1 : 17 untuk SMP/MTs.

Data pada Tabel 2.23 dan Tabel 2.24 menunjukkan bahwa jumlah guru untuk jenjang pendidikan dasar di Bener Meriah sudah berlebih. Dengan demikian, rekrutmen guru perlu dibatasi, kecuali untuk bidang-bidang khusus tertentu. Selain itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas guru untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Tabel 2.28 Rasio Siswa Terhadap Guru Bener Meriah SMP/MTS Tahun 2012

Kecamatan	Jumlah				Total Guru	Total Siswa	Ratio
	Guru negeri	Guru swasta & guru tidak tetap	Siswa Negeri	Siswa swasta			
Pintu Rime Gayo	49	105	527	285	154	812	1 : 5,3
Permata	37	84	568	176	121	744	1 : 6,1
Syiah Utama	6	8	84		14	84	1 : 6,0
Bandar	116	80	1375	113	196	1488	1 : 7,6
Bukit	129	68	1316	225	197	1541	1 : 7,8
Wih Pesam	122	41	994	79	163	1073	1 : 6,6
Timang Gajah	84	68	927	386	152	1313	1 : 8,6
Gajah Putih	24	13	336		37	336	1 : 9,1
Bener Kelipah	28	46		203	74	203	1 : 2,7
Mesidah	15	18	89		33	89	1 : 2,7
Bener Meriah	610	531	6216	1467	1141	7683	1 : 6,7

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 2012

2.3.1.2 Kesehatan

Ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam hal sarana seperti puskesmas, saat ini di Kabupaten Bener Meriah terdapat 10 buah puskesmas di 7 kecamatan, 5 diantaranya adalah puskesmas perawatan, sedangkan sisanya adalah puskesmas non perawatan (Tabel 2.25). Selain itu terdapat 2 buah rumah sakit yaitu RSUD Bener Meriah dan Rumah sakit kontainer yang merupakan pusat layanan kesehatan sekunder. Secara administrasi, tampak bahwa bener meriah telah memiliki sarana yang cukup akan tetapi adanya sarana ini belum menunjukkan adanya pemerataan layanan kesehatan karena luas dan demografi wilayah bener meriah yang sulit dijangkau. Ditambah lagi jumlah tenaga medis baik di rumah sakit maupun di puskesmas masih sangat kurang. Rumah sakit, dalam hal ini, perlu ditingkatkan kelasnya agar mampu memberikan layanan yang lebih beragam sehingga masyarakat Bener Meriah tidak perlu keluar daerah untuk mencari pengobatan.

Salah satu indikator meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah adalah meningkatnya indikator layanan kesehatan seperti pelayanan kunjungan dan status gizi, serta sarana kesehatan yang ada mampu mencakup seluruh wilayah yang ada di Bener Meriah. Penurunan beberapa indikator derajat kesehatan akan ditanggulangi dengan beberapa program dari Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dengan penambahan dan pemerataan tenaga medis maupun anggaran perlindungan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.29 Data Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007-2010

INDIKATOR	Tahun					Satuan
	2007	2008	2009	2010	2011	
Sarana Pelayanan Kesehatan						
Rasio posyandu per 100 balita	-	-	3,67	3,67 (1,67)*	1,64	Per 100 balita
Jumlah posyandu	207	194	-	100	233	unit
Rasio puskesmas per 100.000 penduduk	-	-	-	8,00 (7,07)*	8,00	per 100.000 penduduk
Rasio pustu per 100.000 penduduk	33	38	-	27,02	26,38	per 100.000 penduduk
Rasio polindes per 100.000 penduduk	104	116	-	74,35	73,56	per 100.000 penduduk
Jumlah puskesmas	9	9	9	10	10	unit
Rasio rumah sakit per satuan penduduk	-	-	-	-	-	-
Tenaga Kesehatan						
Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	-	-	-	22,4 (23,83)*	37,58	per 100.000 penduduk
Rasio perawat per 100.000 penduduk	-	-	-	148,21 (167,05)*	206,3	per 100.000 penduduk
Rasio bidan per 100.000 penduduk	-	-	-	207,65 (198,47)*	290,2	per 100.000 penduduk
Pelayanan kesehatan						
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (target 90%)	42,55	95	91	76,8	98,73	%
Cakupan imunisasi Desa/kelurahan (Universal Child Immunization = UCI) (target 85%)	22	58,62	-	64,8	81,12	%
Cakupan kunjungan bayi (minimal 4 kali)	69,66	98,30	-	87,7	81,39	%
Kunjungan Ibu Hamil (K1) target 95%	90,02	81	-	87,0	96	%
Kunjungan Ibu Hamil (K4) target 95%	73,79	72,64	-	77,4	90,93	%
Ibu Hamil Mendapat Tablet Fe3 target 85%	12,73	45,52	-	72,38	74,88	%
Cakupan Imunisasi Campak Bayi	-	-	82,29	89,4	86,84	%
KB Aktif	-	-	-	-	70,44	%
Balita yang mendapatkan Vitamin A	89	96,62	71,32	85,95	94,96	%
Prevalence balita gizi kurang – gizi buruk	-	-	-	-	3,51	%
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	-	-	-	100	100	%
Persentase Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	-	-	-	-	5,5	%
Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	-	-	-	38,6	%
Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk	-	-	-	-	4,41	Per 1000 penduduk
Cakupan Desa Siaga Aktif	-	-	-	-	12,6	%

Profile Kesehatan Aceh 2007 - 2011, bankdata.depkes.go.id

*Data dalam kurung adalah perbandingan data aceh

2.3.1.3 Koperasi dan UMKM

Perkembangan koperasi di Bener Meriah masih di dominasi oleh koperasi wanita (KOPWAN) 14,75 % dan koperasi serba usaha (KSU) 45,08%, namun untuk koperasi pertanian dan perkebunan hanya 12,70 % untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah

Tabel 2.30 Keberagaaan Koperasi Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012

No	Jenis Koperasi	Jumlah						SHU	
		Koperasi			Anggota	Modal (Jt)			
		Aktif	Tidak Aktif	Total		Sendiri	Luar		
1	KUD	2	10	12	317	26.367	16.396.146	16.422.513	
2	KPN/KPR-RI	1	2	3	75	-	-	-	
3	KSP/KJKS	1	2	3	188	143.053	147.331	290.384	
4	KOPOTREN/KOPSEK	3	11	14	374	69.000	37.000	106.000	
5	KOPKAR	-	3	3	75	-	-	-	
6	KSU	62	48	110	13.087	1.503.373	2.790.943	4.294.316	
7	KOPWAN	19	17	36	1.179	430.546	571.664	1.002.210	
8	KOPPAS	1	2	3	96	35.090	1.960.000	1.995.090	
9	PRIMKOP TNI/POLRI	2	-	2	1.332	1.196.290	78.980	1.275.270	
10	KOP. PERTANIAN	8	15	23	1.947	52.000	1.620.031	1.672.031	
11	KOP. PERKEBUNAN	2	6	8	231	20.000	660.000	680.000	
12	KOP. PETERNAKAN	1	-	1	25	-	-	-	
13	KOP. PERTAMBANGAN	-	1	1	25	-	-	-	
14	KOP. ANGKUTAN	1	-	1	25	14.000	-	14.000	
15	KOP. LAINNYA	11	13	24	2.896	173.200	1.750.920	1.924.120	
BENER MERIAH		114	130	244	21.872	3.662.919	26.013.015	29.675.934	
								1.019.406	

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2013

Untuk perkembangan UMKM masih minim, dimana pada tahun 2012 terdata hanya 180 unit dan UMKM masih bergerak di usaha perdagangan, hal ini juga masih belum berkembangnya sentra bisnis dan belum tersedianya sentra informasi bisnis, sentra bisnis masih bertumpu di Simpang Tiga Redelong dan Pondok Baru serta Lampahan.

2.3.1.4 Jalan

Perkembangan panjang jalan di Bener Meriah dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan, baik panjang jalan maupun kondisi jalan yang membaik, pada tahun 2010 panjang jalan meningkat 6,27 % dan pada tahun 2011 meningkat 9,25% serta peningkatan kondisi jalan yang membaik, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31 Panjang Jalan Kabupaten Bener Meriah

No	Uraian	Tahun					
		2009		2010		2011	
		(km)	%	(km)	%	(km)	%
1	Panjang Jalan	792,15		843,43		921,43	
2	Kondisi jalan						
	Baik	555,7	70,15%	651,38	77,23%	679,57	73,75%
	Sedang	188,08	23,74%	184,05	21,82%	220,86	23,97%
	Rusak	24,37	3,08%	3	0,36%	21	2,28%
	Rusak Berat	24	3,03%	5	0,59%	0	0,00%

Sumber : BMCK Bener Meriah

2.3.2 FOKUS LAYANAN PILIHAN

2.3.2.1 Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)

Perusahaan PMDN yang ada di Bener Meriah berjumlah 4 buah. Hal ini menunjukkan bahwa minat investor untuk menanamkan modalnya di Bener Meriah sangat minim. Namun realisasi investasi masih rendah akibat terkendalanya beberapa faktor diantaranya masih minimnya infrastruktur seperti ketersediaan sumber daya energi listrik, tingginya Upah Minimum Provinsi (UMP) serta permasalahan pertanahan.

2.3.2.2 Pembangunan Sosial-Keberagamaan

Komposisi keberagamaan masyarakat Kabupaten Bener Meriah mayoritas menganut agama Islam, dan sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi Aceh, pemerintah kabupaten Bener Meriah juga berkeinginan untuk mewujudkan pelaksanaan syariat Islam yang paripurna di segala bidang. Selama ini pemerintah Bener Meriah belum mewujudkan pembangunan di bidang ini secara lebih rasional dan terukur capaiannya. Adat istiadat masyarakat Gayo yang identik dengan nilai-nilai Islami merupakan modal dasar pembangunan keagamaan masyarakat kabupaten Bener Meriah. Pembangunan keagamaan ini tidak dapat hanya bertumpu pada sejumlah regulasi yang telah dihasilkan oleh pemerintah Provinsi Aceh, atau rutinitas perayaan hari besar Islam termasuk safari dakwah yang selama ini turut diupayakan oleh pemerintah daerah, sehingga penting mempertimbangkan kekayaan budaya untuk penguatannya kedepan. Lebih satu dekade pelaksanaan syariat Islam di Aceh, oleh pemerintah kabupaten Bener Meriah belum pernah dievaluasi secara ketat dan dikaji efektivitas pembangunannya. Berapa besar belanja publik yang telah dikeluarkan yang kemudian dapat dibandingkan dengan pembangunan keagamaan yang telah dicapai.

Aspek kedua yang menggambarkan kondisi keagamaan adalah mengenai kualitas dan penggunaan kuantitas sarana dan prasarana ibadah. Saat ini di kabupaten Bener Meriah terdapat sejumlah sarana ibadah yang tersebar di setiap desa dan kecamatan, sebagaimana table berikut.

Tabel 2.32 Jumlah Sarana Ibadah Kabupaten Bener Meriah

Sarana Ibadah	Mesjid	Meunasah	Majelis Taklim	Waqaf	TKA/TPA	Pesantren	Madrasah Diniyah Swasta
Jumlah	119	217	250	417	183	19	15

Sumber: Badan Baitul Maal Kabupaten Bener Meriah; 2013

Jumlah ini cukup memadai dengan sebaran rata-rata rumah ibadah di setiap desa dan kecamatan. Akan tetapi jumlah tersebut belum sebanding dengan harapan. Pertama, masih kecil jumlah masyarakat yang berpartisipasi mendirikan ibadah berjamaah memanfaatkan fasilitas ini, bahkan di kebanyakan meunasah/langgar tidak mendirikan shalat berjama'ah lima waktu. Demikian juga dengan frekwensi penggunaannya untuk pendidikan memperdalam ilmu agama masyarakat, belajar membaca Qur'an oleh anak usia didik yang juga sangat merosot sebelumnya. Untuk menunjang fungsinya untuk meningkatkan kualitas ibadah masyarakat, kondisi fisik fasilitas ibadah saat ini masih belum nyaman bagi penggunaannya. Kondisi fisik yang belum baik seluruhnya, akses jalan yang kurang memadai, dan sarana sanitasi yang masih rendah.

Aspek ketiga pembangunan keagamaan bertumpu pada fungsi pendidikan. Selain penanaman nilai budi pekerti luhur di sekolah dan madrasah formal, pendidikan keagamaan juga diperkuat oleh adanya Taman Pendidikan Agama (TPA) atau Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) bagi anak-anak dan Mejelis Taklim bagi kalangan orang tua. Di kabupaten Bener Meriah terdapat 183 unit TPA/TPQ. Jumlah ini cukup memadai, hanya saja kualitas dan jumlah tenaga didiknya belum mendapat pembinaan kapasitas yang memadai dari pemerintah.

Untuk pendidikan keagamaan ini juga kabupaten Bener Meriah terdapat 250 unit Majelis Taklim yang tersebar di setiap desa. Akan tetapi masih banyaknya Mejelis Taklim Balai Pengajian yang aktif. Pemerintah kabupaten Bener Meriah selama ini juga memberikan dorongan bersifat insentif kepada imam desa, kadam, muazin serta tenaga pengajar Al-qur'an untuk melanjutkan pembinaan balai pengajian dan majelis taklim. Bukan itu saja, bahkan kepada mereka juga melekat tanggungjawab membina fungsi rumah ibadah di atas. Selama ini keterkaitan antara dorongan pembangunan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana ibadah, serta sarana pendidikan keagamaan yang bersifat non-formal belum bersinergi dengan dorongan pembinaan yang dilakukan terhadap tokoh agama yang berperan memastikan fungsi tersebut berjalan.

Pembangunan keagamaan selama ini juga terpisah dari pentingnya dorongan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan maupun kegagalan sektor pembangunan ekonomi tidak dijadikan indikator yang berpengaruh terhadap kualitas keagamaan masyarakat. Hal nyata dapat dilihat dari pengaruh kemampuan masyarakat menunaikan zakat dan ibadah haji yang telah berjalan cukup baik, sehingga butuh peningkatan penanganan lebih lanjut. Terhadap zakat, selama ini sumber sebagian besar zakat yang dikumpulkan Badan Baitul Mal berasal dari gaji Pegawai Negeri Sipil (30.161 orang (25 persen) dari 120.000 masyarakat Bener Meriah), sedangkan sebagian lainnya masyarakat yang mampu belum terdata termasuk yang belum mampu menunaikannya. Menurut analisa sementara Badan Baitul Mal, di kabupaten Bener Meriah pada dasarnya terdapat 71 persen Bener Meriah dianggap mampu menunaikan zakat (*Muzakki*). Kendati demikian Jumlah pengumpulan zakat oleh Baitul Mal cukup mengalami peningkatan sejak lima tahun terakhir. Berikut pada table dibawah dapat dilihat jumlah penerimaan dan muzakki yang menyalurkan zakat melalui Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.

Tabel 2.33 Penerimaan Zakat dan jumlah Muzakki Kabupaten Bener Meriah tahun 2007-2012

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Total Penerimaan (Milyar)	1,2	1,6	2,4	3,2	4,4	6,2
Muzakki PNS (Orang)	1.102	2005	1932	1.925	1.886	3.391
Non PNS (Orang)	5.210	2.412	8.505	24.380	24.531	30.161

Sumber: Badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah; 2013

Selain memberikan dorongan peningkatan kesejahteraan oleh pemerintah melalui program pembangunan ekonomi lainnya, Badan Baitul Mal juga harus bekerja dengan lebih baik, termasuk kinerja penyaluran yang saat ini belum secara baik dapat membantu turunnya angka kemiskinan. Perbaikan kinerja pengumpulan akan semakin menentukan jumlah zakat yang terkumpul, membaiknya kinerja penyaluran akan menjamin meningkatnya jumlah *muzakki*. Sejalan dengan itu, kesejahteraan masyarakat juga telah ditunjukkan oleh kemampuan masyarakat menunaikan ibadah haji. Data pada Kementerian Agama di tahun 2011 sebanyak 125 orang masyarakat Bener Meriah menunaikan ibadah Haji. Meski jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya hanya berjumlah 93 orang, tapi masih terdapat

pengulangan jamaah haji yang sama dan baru sehingga diharapkan akan lebih banyak masyarakat lainnya yang ikut mampu (*isthitha'ah*) untuk pergi ke tanah suci.

Berikutnya, adalah peran pendidikan formal untuk membentuk generasi yang *ta'at* dan berbudi pekerti luhur yang sudah mulai dilaksanakan, namun belum mendapat dorongan lebih besar dan menjadi indikator berpengaruh terhadap ukuran keberagamaan masyarakat di kabupaten Bener Meriah. Saat menamatkan PAUD anak-anak seharusnya sudah bisa membaca Iqra'. Namun saat ini persentase anak tamat PAUD yang bisa membaca Iqra' baru masih kecil. Demikian juga saat menamatkan SD diharapkan anak-anak sudah lancar membaca Al-Qur'an. Hal ini juga terjadi pada anak tamat SD yang bisa membaca Al-Qur'an. Kemampuan membaca Al-Qur'an ini penting nantinya agar generasi muda kabupaten Bener Meriah mampu mengharumkan nama kabupaten Bener Meriah melalui perlombaan MTQ. Saat ini putra-putri Bener Meriah yang berhasil mengikuti MTQ tingkat provinsi baru sebanyak 65 orang, dan kafilah Bener Meriah masih minim prestasi di tingkat provinsi.

Untuk menopang pembangunan keagamaan berikutnya penting melalui tersajinya informasi yang tepat dan edukatif baik dari pemerintah maupun media swasta lainnya. Kepada masyarakat selama ini belum tersedia informasi yang memadai tentang maksud dan tujuan pembangunan keagamaan itu sendiri, sehingga belum semua masyarakat memahami substansi pembangunan keagamaan yang efektif dilaksanakan. Masyarakat dan pemerintah selama ini masih menekankan pada konsep penegakan hukum, sehingga kurang memberikan perhatian untuk melaksanakan sektor yang memberi dorongan besar dan juga jangka panjang terhadap kualitas keberagamaan masyarakat. Demikian juga, sangat kecil keberadaan media massa lokal maupun pemberitaan media lainnya yang masuk ke kabupaten Bener Meriah dan menyajikan informasi dan bekerjasama dengan pemerintah untuk misi tersebut.

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

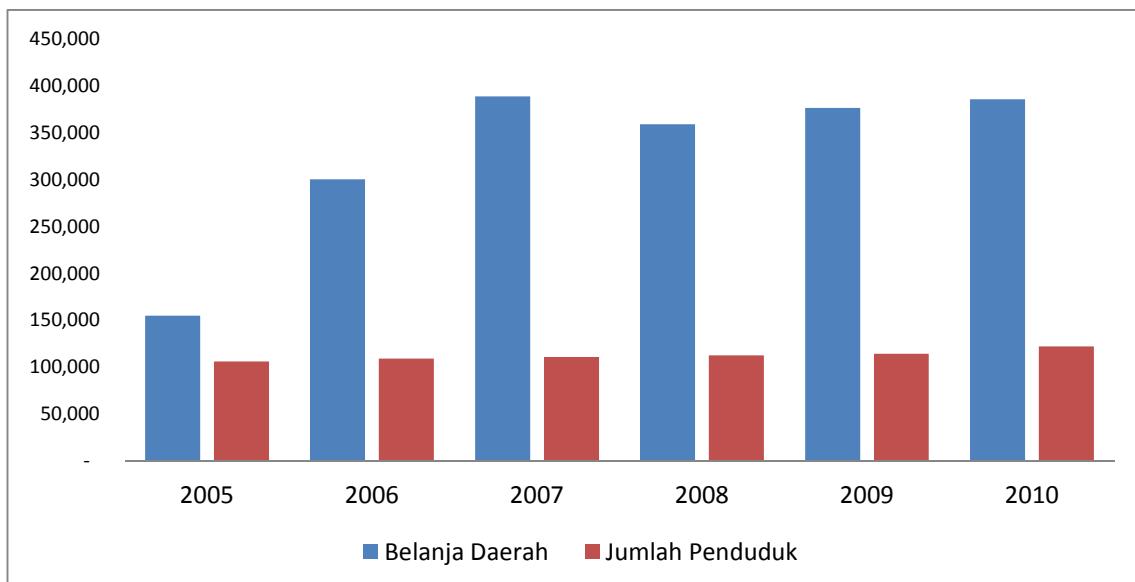
2.4.1 FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

2.4.1.1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Pengeluaran per kapita rumah tangga menurut BPS (2009) sebesar 443.200 rupiah/bulan, atau pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebesar Rp. 5.331.000 per tahun. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk makanan (pangan) sebesar 64% dari total pengeluaran per kapita rumah tangga.

2.4.1.2 Nilai per kapita anggaran daerah

Kabupaten Bener Meriah yang mulai resmi terbentuk pada Tahun 2004 mulai dialokasi anggaran pembangunan sejak tahun 2005. Pada tahun itu rasio jumlah penduduk dengan anggaran daerah masih belum proporsional tidak mencapai angka 1:1,5 juta. Namun sejak tahun 2007-2010 anggaran daerah Kabupaten Bener Meriah meningkat secara signifikan, dengan rasio mencapai 1:3,5 juta (Gambar 2.9). Nijujmlajlai ini pada dasarnya cukup baik dibandingkan dengan daerah lain. Namun yang harus dipertimbangkan juga adalah porsi belanja aparatur, yang cukup besar menyedot belanja publik.



Gambar 2.11 Rasio jumlah penduduk terhadap nilai anggaran daerah

2.4.1.3 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) di Bener Meriah menurut BPS masih mengacu pada NTP Provinsi Aceh. NTP ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, namun terbatas kepada petani yang menggarap lahannya sendiri. NTP Bener Meriah dari tahun 2009 sampai dengan 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.26 berikut.

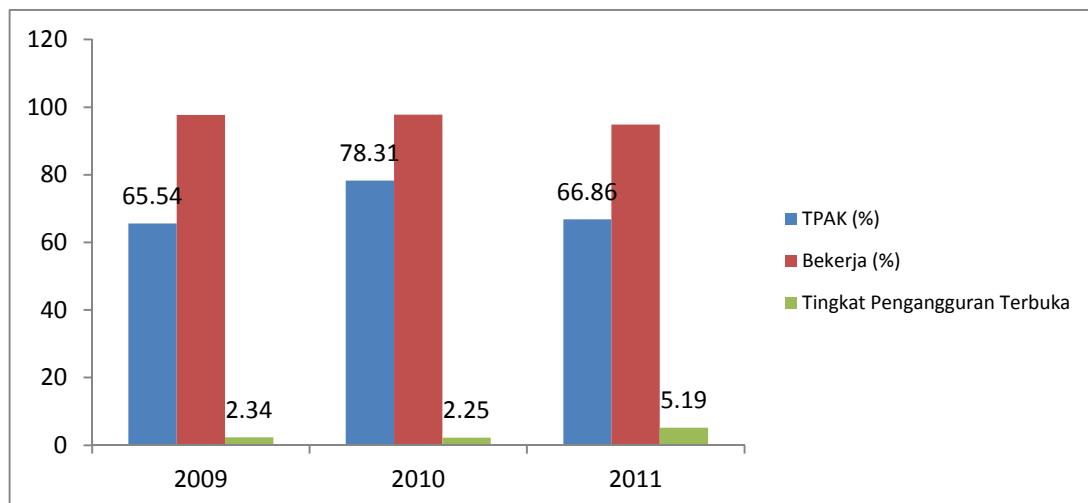
Tabel 2.34 Nilai Tukar Petani

Tahun	NTP
2009	99,76
2010	104,12
2011	104,30

Sumber BPS Bener Meriah 2012

2.4.2 Ketenagakerjaan

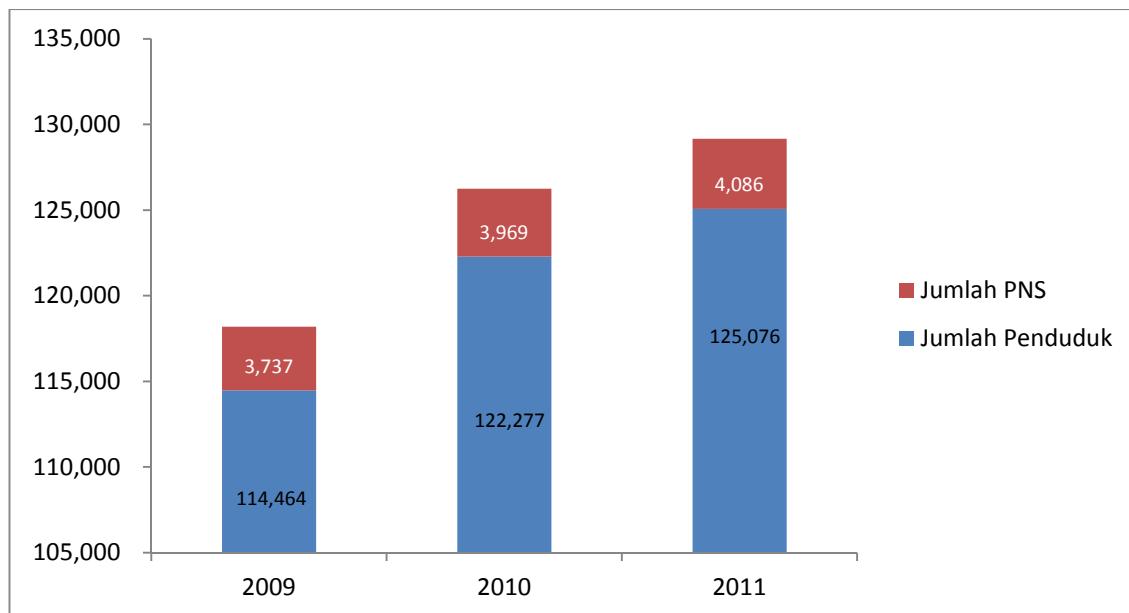
Rasio antara angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja dikenal dengan istilah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang pada dasarnya merupakan besarnya jumlah penduduk masuk dalam pasar kerja. TPAK pada tahun 2009 sebesar 68,86%, dengan komposisi TPAK laki-laki 85,93 dan TPAK perempuan sebesar 50,68. Jumlah penduduk yang bekerja di Bener Meriah cenderung tinggi, mencapai 97% (Gambar 2.10) Dengan kata lain jumlah angka penganggurnya relatif rendah. Namun demikian komposisi angkatan kerja yang mayoritas berada di sektor pertanian masih mencerminkan angka kemiskinan yang tinggi.



Gambar 2.12 Informasi ketenagakerjaan Kabupaten Bener Meriah. Sumber: BPS Bener Meriah

2.4.3 Kepegawaihan

Rasio jumlah PNS terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Bener Meriah tergolong tinggi, yaitu 1:30. Rasio ini lebih rendah di banding angka nasional yaitu 1:50. Konsekuensi dari tingginya jumlah PNS ini berdampak terhadap alokasi belanja aparatur yang menyerap anggaran 70% dari APBK Bener Meriah. Lebih jauh lagi kondisi ini bisa menjadi penghambat laju percepatan pembangunan daerah, karena alokasi belanja publik hanya berkisar antara 30-25%. Rasio tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.11 bawah ini.



Sumber: BPS Bener Meriah

Gambar 2.13 Rasio jumlah PNS terhadap jumlah Penduduk Kabupaten Bener Meriah.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka penataan pengelolaan keuangan negara / daerah telah diterbitkan berbagai produk peraturan perundang-undangan. Sejak reformasi pemerintahan yang diikuti dengan penataan pengelolaan keuangan negara/daerah, telah dilakukan beberapa kali perubahan dalam bidang penataan pengelolaan keuangan, terutama yang terkait dengan keuangan daerah. Perubahan pertama dilakukan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar dilaksanakan otonomi daerah, Pelaksanaan otonomi daerah itu diikuti dengan pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Sebagai dasar implementasi Undang-undang tersebut dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Serta dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di yang tersebut atas, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun ketidaktersedianya pendanaan pada suatu urusan pemerintahan. Sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan Daerah tidak dapat dipisahkan dari APBK yang merupakan instrumen utama dalam kebijakan fiskal daerah karena APBK berisi pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah dalam kurun waktu 1 tahun. Terkait dengan kinerja kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah pada APBK Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007-2012, pengelolaan penerimaan daerah diarahkan kepada peningkatan realisasi pendapatan daerah untuk mendukung peningkatan kinerja keuangan secara keseluruhan. Sedangkan belanja daerah yang dialokasikan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBK

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menjalankan segala bentuk program/kegiatan yang ada dalam APBK secara baik dan benar. Pelaksanaan APBK Kabupaten Bener Meriah tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBK dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung.

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Dalam perencanaan APBK terdapat target pendapatan daerah yang merupakan capaian yang harus diperoleh, sedangkan pada akhir tahun anggaran, diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah. Berdasarkan data tahun 2007 - 2011, Pendapatan Daerah Kabupaten Bener Meriah mengalami pertumbuhan 9,38 % per tahun, pendapatan daerah ini masih di bergantung dari dana perimbangan rata – rata 86,56% per tahun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah rata – rata 2,20 % per tahun, serta pendapatan daerah lainnya rata – rata 9,70 % per tahun. Proporsi Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah cenderung fluktuatif dari tahun 2007-2012. Hal ini dapat dilihat dari tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah 2007–2011

No	URAIAN	Tahun									
		2007		2008		2009		2010		2011	
		Realisasi		Realisasi		Realisasi		Realisasi		Realisasi	
		Rp (jt)	%								
I	PENDAPATAN DAERAH	306.432,48		323.822,39		333.113,70		381.867,68		436.769,78	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.732,09	1,87	6.843,47	2,11	4.890,01	1,47	9.688,95	2,54	13.046,22	2,99
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	251.786,28	82,17	316.978,92	97,89	296.045,48	88,87	281.122,04	73,62	394.269,06	90,27
1.3	LAIN -LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH	48.914,12	15,96	-	-	32.178,21	9,66	61.581,43	16,13	29.454,50	6,74

Sumber : DPKKD Kabupaten Bener Meriah 2012

Secara garis besar kinerja pelaksanaan APBK selama tahun 2007-2012 cukup berfluktuasi, dan secara umum pendapatan daerah kabupaten Bener Meriah didominasi oleh dana perimbangan. Rendahnya kontribusi PAD pada struktur APBK Kabupaten Bener Meriah perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah daerah sehingga sangat diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan dan mengoptimalkan segala bentuk jenis penerimaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan Kabupaten Bener Meriah belum menunjukkan kemandirian daerah.

3.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Bener Meriah bersumber dari Pajak, retribusi, zakat, hasil pengelolaan hasil kekayaan serta pendapatan lain yang sah, pertumbuhan rata – rata PAD mencapai 30,91% pertahun, namun pertumbuhan ini hanya menyumbang pendapatan daerah rata- rata pertahun hanya 2, 20%. Tabel dan gambar berikut menjelaskan perkembangan PAD kabupaten bener Meriah tahun 2007 – 2011.

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2007–2011

NO	URAIAN	Realisasi PAD (Dalam Jutaan Rupiah)					Rata - rata pertumbuhan (%)
		2007	2008	2009	2010	2011	
I	PENDAPATAN DAERAH	306.432,44	323.822,40	333.113,68	381.867,67	436.769,76	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.732,08	6.843,47	4.889,99	9.688,94	13.046,21	25,00
	Pajak Daerah	572,71	700,03	783,02	842,59	1.307,41	36,00
	Retribusi Daerah	1.745,92	2.307,70	2.483,47	4.321,87	3.045,57	11,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	338,15	364,58		1.225,81	1.117,95	76,00
	Lain-lain PAD yang sah	3.075,30	3.471,14	1.623,50	777,93	2.721,90	35,00
	Zakat				2.520,73	4.853,36	

Sumber:DPKKD Kab. Bener Meriah, 2012

3.1.1.1.2. Dana Transfer

Dana transfer merupakan penyumbang terbesar pendapatan daerah, dana ini bersumber dari dana perimbangan, dana pemerintah pusat lainnya serta dana transfer pemerintah provinsi, dimana pertumbuhan rata – rata mencapai 13,62 % per tahun. Pertumbuhan ini dipengaruhi dari peningkatan dana alokasi umum yang notabene terkait dengan peningkatan gaji pegawai dan jumlah pengawai, tabel berikut menggambarkan perkembangan dana transfer dari tahun 2007 – 2011.

Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2007–2011

NO	URAIAN	Realisasi Penerimaan Dana Transfer (Juta Rupiah)					Rata - rata pertumbuhan (%)
		2007	2008	2009	2010	2011	
I	PENDAPATAN DAERAH	306.432,48	323.822,40	333.113,70	381.867,68	436.769,78	
1.2	DANA PERIMBANGAN	251.786,24	316.978,93	296.045,48	310.597,30	359.986,48	4,00
	Bagi Hasil Pajak	3.631,07	12.927,58		29.475,26	29.536,78	91,00
	Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	12.748,17	35.771,23	29.607,79	14.698,78	11.931,30	8,00
	Bagi Hasil Lainnya		3.341,86				0,00
	Dana Alokasi Umum	198.360,00	223.797,26	227.314,69	235.968,76	285.406,10	7,00
	Dana Alokasi Khusus	37.047,00	41.141,00	39.123,00	30.454,50	33.112,30	2,00
1.3	LAIN -LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	48.914,12		32.178,21	61.581,43	63.737,07	19,00
	DBH dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya	4.200,46		7.556,48			
	Dana Penyesuaian dan Otsus			4.621,72		34.282,58	

NO	URAIAN	Realisasi Penerimaan Dana Transfer (Juta Rupiah)					Rata - rata pertumbuhan (%)
		2007	2008	2009	2010	2011	
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya	44.628,23		20.000,00			
	Pendapatan Hibah	854,20			49.966,16	2.826	
	Pendapatan Lainnya				11.615,26	26.629	

Sumber : DPKKD kabupaten Bener Meriah 2012

3.1.1.2. Belanja Daerah

Struktur belanja dalam APBK mengalami perubahan dari kelompok belanja aparatur dan belanja pelayanan publik berdasar Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menjadi kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja modal.

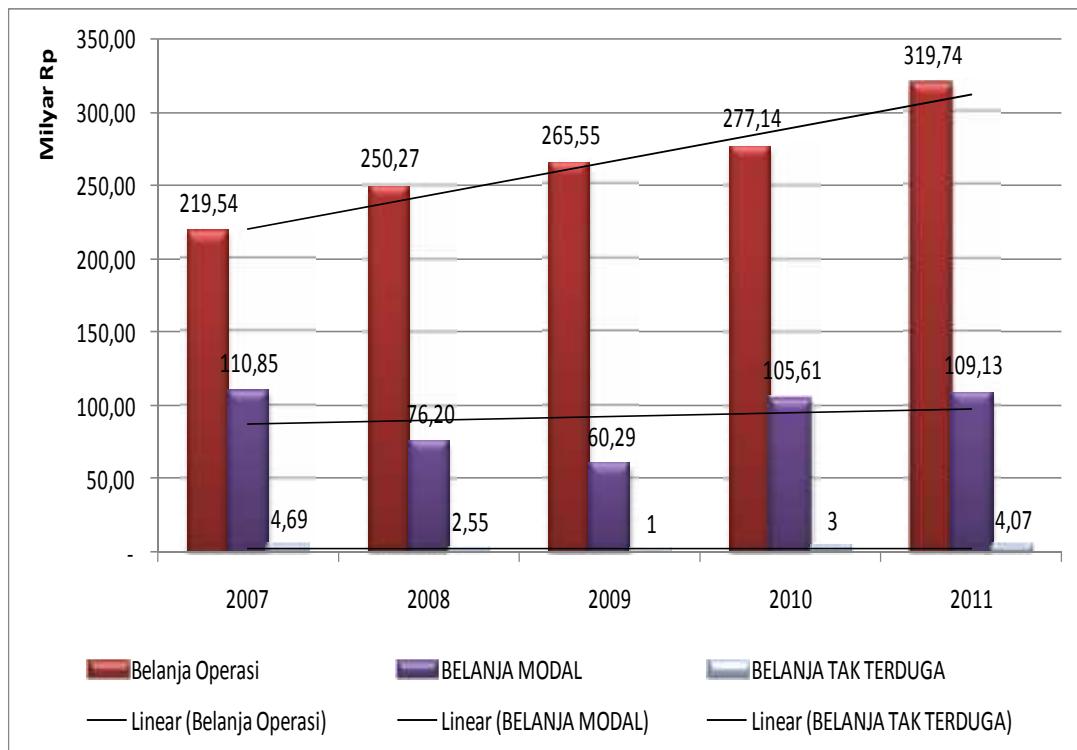
Pertumbuhan Realisasi belanja Kabupaten Bener Meriah mencapai 8,73 % per tahun. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh meningkatnya belanja operasional dimana meliputi belanja pegawai, belanja barang barang dan jasa, serta belanja hibah dan bantuan sosial. Dimana Tabel berikut mengambarkan belanja kabupaten Bener Meriah tahun 2007 – 2011.

Peningkatan realisasi belanja operasional kabupaten Bener Meriah sebagaimana yang tampak pada Tabel 3.2, belanja operasional pada Tahun 2007 sebesar 65,2 % meningkat menjadi 81,24 pada tahun 2009. Sebaliknya proporsi belanja modal menurun tajam yaitu 33,08 % tahun 2007 menjadi 18,44 % pada tahun 2009. Meskipun proporsi belanja modal kembali mengalami peningkatan pada tahun anggaran 2010 dan 2011, namun peningkatan tersebut belum signifikan dan belum dapat memperkecil rasio ideal antara belanja operasional terhadap belanja modal , hal ini juga berarti belanja pembangunan minim dan belum mencapai rasio anggaran infrastruktur yang ideal.

Tabel 3.4 Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007 – 2011

NO	URAIAN	Tahun								
		2007		2008		2009		2010		
		Realisasi Rp (jt)	%	Realisasi Rp (jt)	%	Realisasi Rp (jt)	%	Realisasi Rp (jt)	%	
II	BELANJA	335.078,54		329.012,39		326.886,22		385.900,24		432.940,30
2.1	Belanja Operasi	219.538,83	65,52	250.267,80	76,07	265.549,18	81,24	277.144,70	71,82	319.744,50
	Belanja pegawai	123.045,00	36,72	149.803,35	45,53	151.201,63	46,26	181.639,91	47,07	201.470,73
	Belanja Barang	62.049,34	18,52	67.717,96	20,58	79.261,59	24,25	68.840,15	17,84	74.776,62
	Belanja Hibah	3.340,00	1,00	19.000,73	5,78	19.213,12	5,88	9.542,49	2,47	22.338,12
	Belanja bantuan Sosial	13.380,78	3,99	1.951,36	0,59	4.272,83	1,31	5.588,54	1,45	11.915,63
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	11.533,60	2,99	9.243,40
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	13.230,50	3,95	11.794,40	3,58	11.600,00	3,55	-	-	-
	Subsidi	4.493,21	1,34	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja perjalanan Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	BELANJA MODAL	110.851,76	33,08	76.198,85	23,16	60.286,58	18,44	105.613,35	27,37	109.128,83
	Belanja tanah	-	-	6.462,53	1,96	-	-	6.032,20	1,56	1.500,00
	Belanja Peralatan Mesin	-	-	8.293,77	2,52	-	-	19.581,63	5,07	17.449,08
	Belanja Bangunan gedung	-	-	29.704,25	9,03	-	-	17.285,73	4,48	12.351,08
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	31.476,50	9,57	-	-	58.770,80	15,23	77.605,12
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	261,80	0,08	-	-	3.943,00	1,02	223,55
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	4.687.945.890	1,40	2.545,74	0,77	1.050,46	0,32	3.142,19	0,81	4.066,97
	Belanja Tak Terduga	4.687.945.890	1,40	2.545,74	0,77	1.050,46	0,32	3.142,19	0,81	4.066,97
										0,94

Sumber : DPKKD Kabupaten Bener Meriah 2012

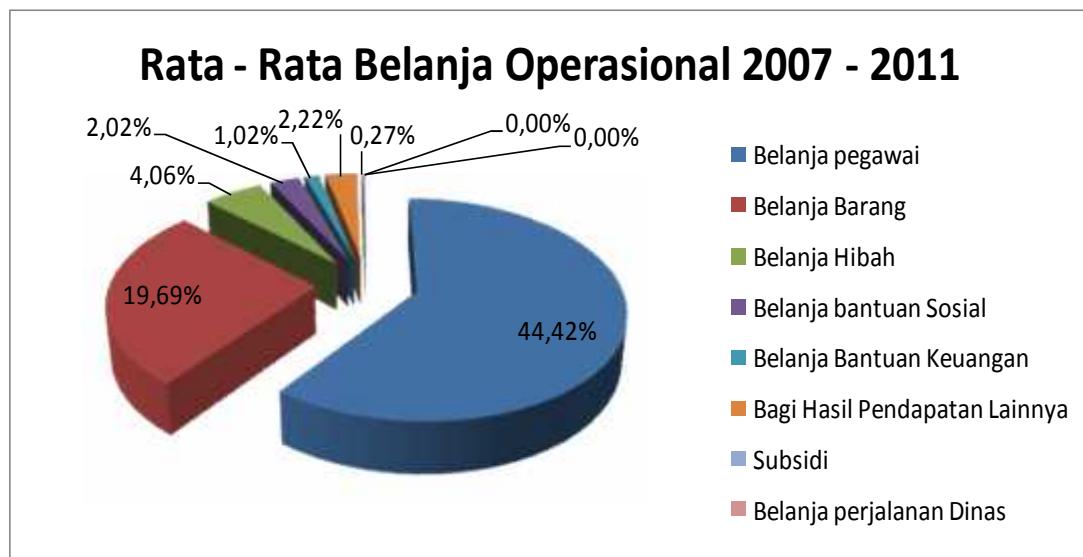


Gambar 3.3 Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah 2007 – 2011

Belanja operasional merupakan porsi terbesar dari belanja daerah mencapai rata – rata 73,70 % Pertahun, sedangkan belanja modal hanya mencapai rata – rata 25,45% pertahun, sedangkan porsi untuk belanja tidak terduga hanya 0,85 % pertahun.

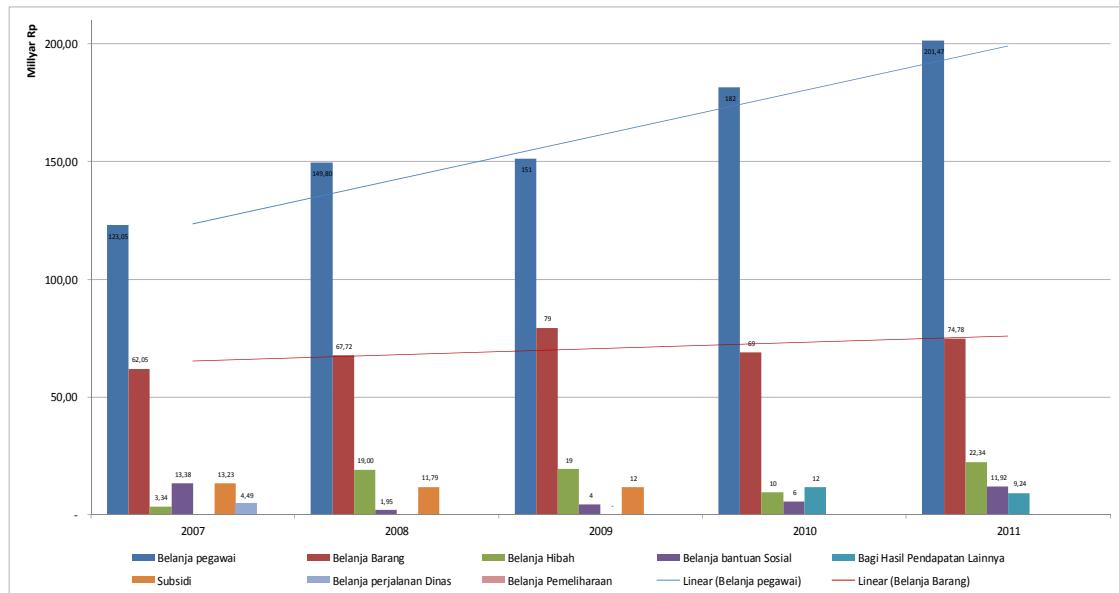
Komposisi belanja operasional dari tahun 2007 – 2011 meliputi belanja pegawai mencapai 44,42% per tahun , belanja barang 19,69% sisanya merupakan belanja hibah,

bantuan sosial, serta subsidi, gambar berikut mengambarkan komposisi belanja operasional dari tahun 2007 – 2011.



Gambar 3.4 Belanja Operasional Kabupaten Bener Meriah 2007 – 2011

Trend belanja pegawai terus meningkat dari tahun ke tahun, begitu juga dengan belanja barang, gambar berikut menunjukkan perkembangan belanja operasional dari tahun 2007 – 2011



Gambar 3.5 Trend Realisasi Belanja Operasional Daerah 2007 – 2011

Selama kurun waktu 2007 – 2011, APBK Kabupaten Bener Meriah mengalami dua kali surplus anggaran dan tiga kali mengalami defisit, pada tahun 2007 mengalami defisit sebesar Rp. 28.646.059.391,00 dan tahun 2008 defisit Rp. 5.189.999.538,00 namun tahun 2009 surplus Rp. 6.227.478.270,00 dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 3.829.485.947,42,

Tabel 3.5 Surplus / Defisit Anggaran Tahun 2007 – 2011

NO	URAIAN	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
		Rp (jt)	Rp (jt)	Rp (jt)	Rp (jt)	Rp (jt)
I	PENDAPATAN DAERAH	306.432,48	323.822,40	333.113,70	381.867,68	436.769,78
II	BELANJA	335.078,54	329.012,40	326.886,22	385.900,24	432.940,29
	SURPLUS/DEFISIT	(28.646,06)	(5.190,00)	6.227,48	(4.032,56)	3.829,49

Sumber : DPKKD Kabupaten Bener Meriah 2012

Dalam mengatasi defisit anggaran kebijakan keuangan masa lalu dengan pembiayaan daerah, yang meliputi Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, berikut penjabaran pembiayaan daerah, serta gambaran sisa lebih pembiayaan anggaran (silva) dari tahun 2007 – 2011.

Tabel 3.6 Pembiayaan Dan SILPA Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007 – 2011

NO	URAIAN	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
		Rp (jt)	Rp (jt)	Rp (jt)	Rp (jt)	Rp (jt)
III	PEMBIAYAAN					
3.1	PENERIMAAN DAERAH	59.759,23	11.213,17	1.182,23	8.778,45	1.048,14
	Penggunaan sisa Lebih Perhitungan anggaran (SILPA)	59.759,23	11.213,17	1.182,23	1.841,59	1.045,89
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				6.926,02	
	Penerimaan Piutang Daerah				10,85	2,25
3.2	PENGELUARAN DAERAH	19.900,00	4.840,94	5.000,00	3.700,00	3.300,00
	Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah	19.900,00	4.500,	5.000,00	3.700,00	3.300,00
	Pemberian pinjaman Kepada pihak Ketiga		340,94			
	PEMBIAYAAN BERSIH	39.859,23	6.372,23	(3.817,77)	5.078,45	(2.251,86)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	11.213,17	1.182,23	2.409,71	1.045,89	1.577,63

Sumber : DPKKD Kabupaten Bener Meriah 2012

3.1.1.3. Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Analisis data neraca daerah dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
2. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.

3. Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah.

Tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif, laporan neraca daerah ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah. Neraca Daerah terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana.

Aset daerah diperoleh dari dua sumber, yakni dari APBK dan dari luar APBK . Secara singkat, berikut pengertian dan implikasi kedua sumber aset ini:

1. Aset yang bersumber dari pelaksanaan APBK merupakan output/outcome dari terealisasinya belanja modal dalam satu tahun anggaran.
2. Aset yang bersumber dari luar pelaksanaan APBK merupakan aset yang diperoleh tidak dikarenakan adanya realisasi anggaran daerah, baik anggaran belanja modal maupun belanja pegawai dan belanja barang & jasa melainkan aset yang diterima dari pihak lain, seperti lembaga donor (NGO, LSM) dan masyarakat.

Kewajiban/Liabilitas adalah utang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain. Liabilitas adalah kebalikan dari aset yang merupakan sesuatu yang dimiliki. Kewajiban dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal kredit dan biasanya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Kewajiban jangka pendek - liabilitas yang dapat diharapkan untuk dilunasi dalam jangka pendek (satu tahun atau kurang). Biasanya terdiri dari utang pembayaran (hutang dagang, gaji, pajak, dan sebagainya), pendapatan ditangguhkan, bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun berjalan, obligasi jangka pendek (misalnya dari pembelian peralatan), dan lain-lain.
2. Kewajiban jangka panjang - liabilitas yang penyelesaiannya melebihi satu periode akuntansi (lebih dari satu tahun). Biasanya terdiri dari utang jangka panjang, obligasi pensiun, dan lain-lain.

Pada neraca pemerintah daerah, utang pemerintah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah merupakan salah satu informasi yang dapat diperoleh dari neraca daerah pada point kewajiban, baik kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi dari pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional.

Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan, Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah yang meliputi Dana Lancar, Dana Investasi, dan Dana Cadangan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Selama kurun waktu 2008-2011 neraca daerah dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7 Neraca Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 – 2011

No	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
		(Jt Rp)				
AKTIVA						
1	Aset	267.455,83	362.920,52	795.482,59	915.183,69	1.087.893,93
1.1.	Aset Lancar	11.241,43	4.307,21	4.692,65	5.907,11	3.769,66
1.1.1	kas di Kas Daerah	9.844,81	668,57	1.358,44	3.945,66	1.609,94
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.368,36	1.485,72	1.051,27	354,43	543,44
1.1.3	Piutang	28,26	358,87	117,68	106,83	99,75
1.1.4	Persediaan		1.794,05	2.165,26	1.500,19	1.516,53
1.2.	Investasi Jangka Panjang	-	26.200,00	31.200,00	29.241,38	32.237,40
1.2.1	Investasi Non Permanen	-	16.900,00	16.900,00	9.973,98	9.973,98
1.2.1.1	Dana Bergulir		16.900,00	16.900,00	9.973,98	9.973,98
1.2.2	Investasi Permanen	-	9.300,00	14.300,00	19.267,40	22.263,42
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		9.300,00	14.300,00	19.267,40	22.263,42
1.3.	Aset Tetap	256.214,41	332.413,32	759.589,93	871.988,80	1.043.840,47
1.3.1	Tanah	13.698,97	20.161,50	165.966,09	172.694,29	175.220,37
1.3.2	Peralatan dan Mesin	58.181,96	66.642,81	154.952,11	175.337,50	196.812,76
1.3.3	Gedung dan Bangunan	101.823,19	131.527,44	247.509,12	256.965,25	293.082,98
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	62.664,03	93.954,48	173.010,35	235.735,80	357.913,80
1.3.5	Aset Tetap lainnya	19.846,25	20.127,08	14.874,19	19.860,41	20.810,57
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan			3.278,07	11.395,55	-
1.4.	Aset Lain – Lain	-	-	-	8.046,40	8.046,40
1.4.1	Aset Tetap Rusak				7.478,28	7.478,28
1.4.2	Tuntunan Perbendaharaan				568,12	568,12
PASIVA						
2	Kewajiban	-	972,06	-	3.254,19	575,75
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-	3.254,19	575,75
2.1.1	Utang Pajak				3.254,19	575,75
2.1.2	Utang Jangka Pendek Lainnya					
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
2.2.1	Utang jangka Panjang					
2.3	Utang Perhitungan pihak ketiga (PPK)	-	972,063	-	-	-
2.3.1	PPh Pusat		972,06			

No	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
		(Jt Rp)				
3	Ekuitas Dana	289.155,83	361.948,46	795.482,59	911.929,50	1.087.318,18
3.1	Ekuitas Dana Lancar	11.241,43	3.335,15	4.692,65	2.652,91	3.193,91
3.1.1	Silpa	11.213,17	1.182,23	2.409,71	1.045,89	1.577,63
3.1.2	candangan Piutang	28,26	358,87	117,68	106,83	99,75
3.1.3	candangan Persediaan		1.794,06	2.165,26	1.500,19	1.516,53
3.2	Ekuitas Dana Investasi	277.914,41	358.613,32	790.789,93	909.276,58	1.084.124,27
3.2.1	Diinvestasikan dalam jangka Panjang	21.700,00	26.200,00	31.200,00	29.241,38	32.237,40
3.2.2	Diinvestasikan dalam aset tetap	256.214,41	332.413,32	759.589,93	871.988,80	1.043.840,47
3.2.3	Diinvestasikan dalam aset lainnya	-			8.046,40	8.046,40
3.3	Ekuitas dana cadangan	-	-	-	-	-
3.3.1	diinvestasikan dalam dana cadangan					
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		289.155,83	362.920,52	795.482,59	911.929,50	1.087.318,18
Sumber : DPKKD Kab. Bener Meriah 2012						

3.1.1.3.1. Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya. Pada tahun 2011, Kabupaten Bener Meriah memiliki aset senilai Rp 1.087.893.933.387,15. Pertumbuhan aset selama 2007-2011 tercatat 47,20% per tahun. Yang terbesar nilainya adalah aset tetap.

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar untuk Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2011 mencapai Rp 3.769.661.450,42, menurun sebesar Rp 2.137.446.697,58 dari tahun 2010. Rata-rata penurunan aset lancar ini sebesar 15,76% / tahun. Penurunan aset lancar ini dapat disebabkan oleh menurunnya Kas sebesar Rp 2.335.720.369,58

Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Untuk Kabupaten Bener Meriah , investasi jangka panjang bertumbuh dengan rata-rata 7,68 %/tahun. Pada tahun 2008, investasi jangka panjang baru sebesar Rp 26.200.000.000. namun tahun 2011 mencapai Rp 32.237.397.790, Investasi jangka panjang ini didominasi oleh investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Aset Tetap adalah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada tahun 2007, nilai aset tetap di Kabupaten Bener Meriah mencapai Rp 256.214.405.024, dan tahun 2011 mencapai Rp 1.043.840.474.121,24 . Yang tertinggi nilainya adalah aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan.

3.1.1.3.2. Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 972.063.000 merupakan Kewajiban Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sedangkan pada tahun 2011 kewajiban yang harus dilaksanakan sebesar Rp 575.749.567,00 untuk menutupi hutang jangka pendek yang merupakan hutang pajak .

3.1.1.3.3. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii) Ekuitas Dana Investasi, dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Bener Meriah mencapai Rp 1.087.318.183.820,15. Nilai ekuitas dana yang terbesar adalah berupa ekuitas dana investasi.

3.1.1.3.4. Rasio likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (current ratio) dan Quick Ratio. Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedang Quick Ratio adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

Tabel 3.8 Rasio Likuiditas Tahun 2010 – 2011

No	Rasio Likuiditas	Tahun	
		2010	2011
1	Rasio Lancar	1,82	6,55
2	Quick Ratio	1,35	3,91

Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tahun 2010 sebesar 1,82, dan tahun 2011 sebesar 6,55. Nilai yang diperoleh ini mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Dengan meningkatnya rasio lancar menunjukkan menguatnya daerah dalam melunasi kewajibannya

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (current ratio) karena Quick ratio telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai quick ratio neraca keuangan Pemerintah kabupaten Bener Meriah tahun 2010 sebesar 1,35, dan tahun 2011 sebesar 3,91. Nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kabupaten Bener Meriah setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Belanja daerah yang telah dialokasikan untuk biaya program pembangunan, bantuan keuangan dan sosial, belanja bagi hasil serta belanja tidak terduga sangat tergantung pada besarnya penerimaan daerah setelah dikurangi belanja untuk membiayai beban wajib dalam bentuk gaji upah dan tunjangan PNS. Sisa belanja setelah dikurangi belanja beban wajib itulah yang harus dikelola secara efisien dan efektif untuk membiayai program-program baik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun untuk mendorong percepatan laju pembangunan daerah.

Formulasi kebijakan masa lalu dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD serta mendorong peningkatan kemampuan peranan perusahaan daerah untuk dapat memberikan kontribusinya kepada Pendapatan Asli Daerah, sedangkan untuk Dana Perimbangan, komponen Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak adalah 3 unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya. Beberapa kebijakan umum dalam peningkatan pendapatan daerah dilakukan, melalui:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.
- b. Peningkatan kesadaran dan ketataan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Pengelolaan dan pemanfaatan aset–aset daerah yang potensial.
- d. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah.
- e. Peningkatan pelayanan kepada wajib/objek pajak dan retribusi.
- f. Peningkatan sosialisasi/penyuluhan tentang pajak dan retribusi kepada masyarakat.
- g. Pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan daerah.
- h. Peningkatan SDM melalui Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bintek).

Kebijakan Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berupaya menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah, satuan kerja dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing, selain itu Pemerintah

Kabupaten Bener Meriah telah mengupayakan agar Belanja Langsung mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari pada Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa. Alokasi ini diarahkan untuk dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap kelancaran jalannya pemerintahan dan pelayanan administrasi pada setiap lembaga daerah baik pelayanan yang langsung terhadap aparatur daerah maupun pelayanan kepada publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Analisis pengeluaran periodik prioritas utama

Analisis terhadap terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar.

Kabupaten Bener Meriah dari tahun 2007 – 2012 berfokus pada pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum, dimana tahun 2009 anggaran untuk pendidikan mencapai 28,18%, pada tahun 2010 naik menjadi 33,37%, dan pada tahun 2011 naik menjadi 36,28%, alokasi untuk kesehatan pada tahun 2009 mencapai 9,55%, namun pada tahun 2010 menurun menjadi 7,12% dan pada tahun 2011 naik menjadi 8,68%, pada gambar berikut mengambarkan alokasi anggaran dari tahun 2007 – 2011.

3.3.2 Proyeksi Keuangan Daerah

3.3.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Salah satu tujuan otonomi daerah untuk memperkuat basis perekonomian Kabupaten Bener Meriah, hal ini sudah mulai terlihat dari efek otonomi daerah yang diindikasikan dari PDRB Kabupaten Bener Meriah sejak tahun 2005 sampai sekarang, dimana pertumbuhan ekonomi diatas 2,9 persen, dan secara signifikan terus mengalami perkembangan pertumbuhan diatas 4 persen sejak tahun 2006. Atas dasar harga berlaku, PDRB Bener Meriah terus menerus mengalami peningkatan. Pada periode tahun 2000-2003 (sebelum pemekaran), total PDRB Bener Meriah berfluktuasi antara 493,60 miliar rupiah sampai dengan 725,63 miliar rupiah. Setelah pemekaran, tahun 2004, angka tersebut menjadi 846,76 miliar rupiah, dan terus meningkat hingga mencapai nilai 1.985,89 miliar rupiah di tahun 2011. Namun tentunya besaran tersebut adalah besaran secara nominal dan belum memperhitungkan efek kenaikan harga (inflasi) barang dan jasa. Jika dihitung atas dasar harga konstan 2000, total PDRB Bener Meriah tahun 2011 adalah sebesar 794,98 miliar rupiah. Dengan melihat pertumbuhan angka-angka tersebut, dapat dikatakan bahwa perekonomian Bener Meriah sebelum dan setelah pemekaran menunjukkan kinerja yang terus membaik.

Dari data pendapatan daerah tahun 2007 – 2011, pertumbuhan rata –rata pendapatan daerah mencapai 9,39% pertahun, pertumbuhan PAD 30,91% pertahun, pertumbuhan dana transfer 13,62% pertahun, dengan pertumbuhan tersebut dapat di proyeksi pendapatan

daerah 5 tahun kedepan, tabel berikut menjelaskan proyeksi pendapatan daerah tahun 2013 – 2017.

Tabel 3.9 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2013 – 2017

NO	URAIAN	Kenaikan (%)	Proyeksi (Dalam Jutaan Rupiah)				
			2013	2014	2015	2016	2017
I	PENDAPATAN DAERAH		486.521,80	587.649,89	647.421,13	713.320,43	785.983,25
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		17.500,00	20.125,00	23.143,75	26.615,31	30.607,61
1.1.1	Pajak Daerah	15%	1.538,45	1.769,22	2.034,60	2.339,79	2.690,76
1.1.2	Retribusi Daerah	15%	7.711,55	8.868,28	10.198,52	11.728,30	13.487,55
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	15%	1.500,00	1.725,00	1.983,75	2.281,31	2.623,51
1.1.4	Zakat	15%	6.000,00	6.900,00	7.935,00	9.125,25	10.494,04
1.1.5	Lain-lain PAD yang sah	15%	750,00	862,50	991,88	1.140,66	1.311,75
1.2	DANA PERIMBANGAN		435.820,95	479.403,04	527.343,34	580.077,68	638.085,45
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / bagi hasil Bukan Pajak (SDA)	10%	8.203,21	9.023,53	9.925,88	10.918,47	12.010,32
1.2.2	Dana Alokasi Umum	10%	375.310,92	412.842,01	454.126,21	499.538,83	549.492,71
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	10%	52.306,82	57.537,50	63.291,25	69.620,38	76.582,42
1.3	LAIN -LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		33.200,86	88.121,85	96.934,04	106.627,44	117.290,19
1.3.1	Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	10%	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	10%	23.200,86	77.121,85	84.834,04	93.317,44	102.649,19

Sumber : Hasil Analisa 2012

3.3.2.2 Proyeksi Belanja Daerah

Berdasarkan pertumbuhan belanja dari tahun 2007 - 2011, serta pertumbuhan ekonomi maka proyeksi Belanja daerah tahun dapat di proyeksi sebagai berikut .

Tabel 3.10 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2013 – 2017

NO	URAIAN	KENAIKAN (%)	PROYEKSI BELANJA DAERAH (DALAM JUTAAN RUPIAH)				
			2013	2014	2015	2016	2017
I	PENDAPATAN DAERAH		486.521,80	587.649,89	647.421,13	713.320,43	785.983,25
II	BELANJA		476.930,87	528.060,13	586.259,24	652.678,85	728.673,82
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		231.980,20	248.606,24	266.509,23	285.788,55	306.551,34
2.1.1	Belanja pegawai	7,81%	208.401,20	224.677,34	242.224,64	261.142,38	281.537,60
2.1.4	Belanja Hibah	2,00%	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	2.164,86
2.1.5	Belanja bantuan Sosial	1,00%	12.167,20	12.288,87	12.411,76	12.535,88	12.661,24
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	2,00%	7.411,80	7.560,04	7.711,24	7.865,46	8.022,77
2.1.8	Belanja Tak Terduga	2,00%	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	2.164,86
2.2	BELANJA LANGSUNG		244.950,67	279.453,89	319.750,01	366.890,29	422.122,48
2.2.1	Belanja pegawai	5,00%	28.540,42	29.967,44	31.465,81	33.039,10	34.691,05
2.2.2	Belanja Barang dan jasa	7,00%	67.014,61	71.705,63	76.725,03	82.095,78	87.842,48
2.2.3	Belanja Modal	19,00%	149.395,65	177.780,82	211.559,17	251.755,42	299.588,95
	Surplus/Defisit		9.590,93	59.589,76	61.161,89	60.641,58	57.309,43

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

Saat ini, Kabupaten Bener Meriah menghadapi permasalahan dan tantangan baik yang bersifat lokal (daerah) maupun yang bersifat global. Berdasarkan permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang teridentifikasi akan memberikan arahan dalam perumusan visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Bener Meriah tahun 2012-2017.

4.1. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN KABUPATEN BENER MERIAH

4.1.1. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan masih rendah

Bener Meriah merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang seharusnya dapat dikelola untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD merupakan salah satu modal untuk menunjang pembangunan di Bener Meriah. Pemanfaatan potensi sumber daya alam juga penting dilakukan untuk membuka lapangan kerja baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam di sektor pertanian dan perkebunan perlu dilakukan secara intensif karena mampu menyerap hampir 50% angkatan kerja. Namun demikian, pengembangan sektor ini dibatasi oleh rendahnya kepemilikan lahan per kepala keluarga. Sektor-sektor lain yang bergerak dalam pemanfaatan potensi sumberdaya kehutanan juga mengalami persoalan yang sama sehingga belum mampu memberikan nilai tambah masyarakat terhadap produk yang dihasilkan. Pemanfaatan sumber daya alam perlu diimbangi dengan upaya mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Penggunaan teknologi harus dilakukan dengan tepat. Sistem pengelolaan hutan, pertambangan dan perkebunan yang belum tepat dapat berdampak pada kerusakan ekosistem, terjadinya bencana alam dan terganggunya tatanan kehidupan sosial masyarakat.

4.1.2. Pelaksanaan pembangunan kurang efektif dan efisien

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak tepat sasaran telah mengakibatkan tidak efisien dan tidak efektifnya pemanfaatan anggaran pembangunan dan memicu ekonomi biaya tinggi. Selain itu, proses pembangunan juga belum sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat umum. Hal ini mengakibatkan sasaran dan kualitas pembangunan tidak terealisasi secara maksimal. Oleh karena itu, dimasa yang akan datang penetapan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta komitmen yang tinggi dari penyelenggara pemerintahan daerah untuk pencegahan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) sangat diperlukan.

4.1.3. Pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam belum maksimal

Pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam di Bener Meriah belum maksimal, terutama disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dinul Islam di kalangan masyarakat. Berbagai perilaku masyarakat masih banyak yang bertentangan dengan moralitas dan etika agama. Pemahaman dan pengamalan agama di kalangan peserta didik (sekolah umum dan agama) juga belum memuaskan disebabkan terutama oleh kuatnya

pengaruh negatif globalisasi. Hal tersebut telah mempengaruhi dan mendorong perilaku masyarakat ke arah yang negatif.

Salah satu cara untuk meningkatkan pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam ini adalah melalui pendidikan. Pendidikan budi pekerti dan pendidikan karakter dalam bingkai agama dan budaya sangat diperlukan dalam dunia pendidikan saat ini. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai Dinul Islam perlu dilaksanakan sejak usia dini baik di lingkungan pendidikan formal dan informal. Disamping itu, perbaikan kurikulum dan peningkatan kualitas pendidik juga perlu ditingkatkan.

4.1.4. Tingkat kemiskinan masih tinggi

Penduduk miskin di Bener Meriah pada tahun 2010 tercatat sebesar 26,22%, jauh lebih besar dari penduduk miskin provinsi Aceh yang sebesar 19,4%. Sebaran penduduk miskin Bener Meriah tinggi di tiga kecamatan yaitu Pintu Rime Gayo, Permata dan Bukit. Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan selama ini belum memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pendataan warga miskin secara valid akan sangat membantu dalam pengembangan program pengentasan kemiskinan. Koordinasi antar SKPD untuk pengembangan program pengentasan kemiskinan juga dapat dilakukan dengan lebih baik.

Walaupun tingkat pengangguran terbuka di Bener Meriah pada tahun 2010 relatif rendah (2,25%), program pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan masyarakat yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dasar yang terintegrasi perlu menjadi prioritas di masa yang akan datang. Selain itu, dukungan terhadap akses modal, pemasaran produk unggulan masyarakat dan penguatan kelembagaannya perlu ditingkatkan. Perlu juga dikembangkan partisipasi masyarakat untuk secara aktif turut serta dalam memberdayakan masyarakat miskin.

Salah satu cara lain untuk memutuskan mata rantai kemiskinan struktural adalah melalui pendidikan. Karena itu, upaya penyediaan pendidikan yang murah dan terjangkau untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang secara ekonomi kurang beruntung perlu dilakukan secara baik dan terdistribusi merata.

4.1.5. Keterlibatan peran swasta dalam pembangunan masih rendah

Pertumbuhan ekonomi Bener Meriah masih didorong oleh belanja pemerintah. Partisipasi pihak swasta belum menunjukkan pengaruh yang besar terhadap pembangunan. Usaha swasta masih sangat tergantung pada anggaran belanja pemerintah (APBK, APBA dan APBN). Karena itu, pemerintah daerah perlu mengupayakan agar pengusaha lokal, nasional maupun asing untuk berinvestasi di Bener Meriah. Namun demikian, Bener Meriah belum memiliki sistem administrasi dan manajemen investasi yang beroperasi secara optimal. Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait kegiatan investasi belum jelas dan masih tumpang tindih, walaupun Bener Meriah telah memiliki fasilitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi kegiatan penanaman modal. Di samping itu juga belum ada kebijakan investasi dan regulasi mengenai penanaman modal.

Sinkronisasi investasi pembangunan menjadi penting untuk tercapainya sinergi yang optimal antara berbagai pelaku ekonomi melalui pembentukan kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat. Kemitraan tersebut ditujukan untuk mensinergikan aktivitas yang dilakukan oleh

dunia usaha dengan program pembangunan daerah. Implementasi dari hubungan kemitraan dilaksanakan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai dengan sifat, kondisi budaya dan keunikan lokal.

4.1.6. Sektor Koperasi dan UMKM belum berkembang dengan baik

Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang sangat strategis dalam menunjang perekonomian daerah sekaligus mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun demikian, sektor ini belum berkembang secara optimal. Permasalahan utama yang selalu dihadapi pelaku UMKM adalah permodalan, pemasaran dan manajemen. Pendekatan yang mungkin dilakukan adalah dengan mempermudah pemberian kredit mikro perbankan dan pemanfaatan CSR BUMN secara tepat sasaran.

Permasalahan lainnya yang masih dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bener Meriah adalah iklim usaha yang kurang kondusif, seperti besarnya biaya transaksi akibat masih adanya ketidakpastian berusaha, persaingan pasar yang kurang sehat, terbatasnya akses kepada sumber daya produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, sarana dan prasarana serta informasi pasar. Di sisi lain, tantangan utama yang dihadapi Usaha UMKM di Bener Meriah adalah masih rendahnya kinerja dan produktivitas usaha dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha UMKM yang berbasis agroindustri yang didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan.

4.1.7. Pertumbuhan ekonomi belum merata

Pertumbuhan ekonomi Bener Meriah masih rendah (1,58% pada tahun 2010), lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Nasional yang tercatat sebesar 6,5% (Bank Indonesia, 2011). Perkembangan pertumbuhan ekonomi Bener Meriah pada periode 2007-2011 juga menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Bener Meriah disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini terlihat dari masih rendahnya produksi dan nilai tambah dari produk unggulan daerah yang belum secara nyata meningkatkan perekonomian Bener Meriah. Selain itu, lemahnya sistem pengelolaan keuangan daerah, rendahnya minat investasi swasta pada sektor produktif dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga berkontribusi terhadap rendahnya pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat dipacu melalui kebijakan pembangunan pertanian yang dilaksanakan dengan mengembangkan pola pertanian terpadu yang dapat memberikan nilai tambah (*added value*) tinggi terhadap produk yang dihasilkan. Daya saing produk lokal Bener Meriah juga perlu ditingkatkan di pasar regional dan internasional. Kegiatan promosi perdagangan yang ada selama ini dilakukan belum memiliki target pasar yang jelas sehingga evaluasi juga sulit untuk dilakukan. Industri skala kecil dan menengah di Bener Meriah perlu dikembangkan lebih lanjut mencakup investasi, produksi dan pemasaran.

Selain memacu sektor pertanian, perdagangan dan industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Bener Meriah perlu memberikan perhatian yang lebih serius pada pengembangan sektor pariwisata. Sektor ini dapat membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Pariwisata yang berbasis alam

(ekopariwisata) di Bener Meriah memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Hal-hal yang harus dilakukan untuk pengembangan pariwisata di Bener Meriah adalah:

- 1) Infrastruktur pariwisata (akomodasi, transportasi dan jasa pelayanan)
- 2) Promosi pariwisata
- 3) Kebersihan di kawasan wisata dan sekitarnya.
- 4) Keamanan dan ketertiban yang menjamin kenyamanan wisatawan.
- 5) Diversifikasi atraksi pariwisata alami

4.1.8. Kualitas sumberdaya manusia masih rendah

Kualitas sumberdaya manusia (SDM) Bener Meriah yang direpresentasikan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih tergolong rendah. Daya saing SDM Bener Meriah juga masih tergolong rendah, yang dicirikan dengan masih terbatasnya jumlah lulusan sekolah kejuruan yang memiliki keterampilan (skill), jumlah tenaga kerja yang berpendidikan tinggi masih sedikit dan rasio ketergantungan penduduk usia produktif dengan jumlah penduduk masih tinggi. Angka rasio ketergantungan hidup pada tahun 2009 adalah 55,59%. Ini berarti setiap satu orang penduduk usia produktif harus menanggung seorang penduduk usia tidak produktif.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini harus dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Pendidikan keterampilan bagi masyarakat Bener Meriah juga perlu ditingkatkan, khususnya bagi warga miskin. Hal ini dimasudkan agar mereka dapat mengembangkan diri dan dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, permasalahan kesehatan di Bener Meriah yang perlu diatasi diantaranya untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil, kesehatan balita, serta PHBS dan kesehatan lingkungan

4.1.9 Infrastruktur dan tata ruang belum optimal

Permasalahan infrastruktur dan tata ruang di Bener Meriah terkait dengan laju perubahan penggunaan lahan dan infrastruktur pedesaan.

1. Laju perubahan penggunaan lahan

Permasalahan laju perubahan penggunaan lahan yang khususnya terjadi akibat konversi hutan produksi menjadi kebun dan ladang relatif tinggi. Laju perubahan penggunaan lahan ini harus menjadi perhatian serius agar fungsi hutan, sebagai hutan lindung dan hutan produksi dapat dipertahankan.

2. Infrastruktur Pedesaan

Infrastruktur pedesaan yang masih menjadi permasalahan di Bener Meriah adalah akses transportasi dan bangunan rumah layak huni. Aksesibilitas menjadi penting dalam pembangunan daerah karena aksesibilitas yang baik akan menjamin mobilitas penduduk, barang dan jasa menjadi semakin lancar. Selain itu perlu dikembangkan pusat-pusat pelayanan baru sehingga dapat mendorong peningkatan sector perekonomian.

4.2 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BENER MERIAH

Penentuan isu strategis didapat melalui pembahasan dalam serangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan seluruh *stakeholders*. Isu strategis pembangunan Bener Meriah berikut ini disusun berdasarkan kelompok permasalahan pembangunan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu acuan untuk menyusun isu-isu strategis ini adalah ***Millenium Development Goals (MDGs)***. MDGs merupakan paradigma pembangunan global yang dan memuat delapan tujuan yang harus tercapai tahun 2015. Pencapaian tujuan-tujuan MDGs ini seharusnya menjadi dasar perencanaan yang dapat membawa *multiplier effect* berupa kemajuan dalam berbagai bidang. Kedelapan tujuan adalah:

- a) Menghapuskan kemiskinan dan kelaparan berat
- b) Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang
- c) Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- d) Menurunkan kematian anak
- e) Meningkatkan kesehatan maternal
- f) Melawan penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit kronis lainnya (malaria dan tuberkulosa)
- g) Menjamin keberlangsungan lingkungan
- h) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

4.2.1 Isu strategis pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan

- Pemanfaatan sumber daya alam di sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan untuk membuka lapangan kerja baru.
- Pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan.
- Peningkatan kemandirian pangan.
- Penurunan daya dukung lingkungan.
- Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

4.2.2 Isu strategis pelaksanaan pembangunan

- Penyempurnaan kebijakan kelembagaan untuk mendorong peningkatan kapasitas aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan merit system.
- Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis data dan teknologi.
- Perubahan *mind set* dan *culture set* aparatur untuk menciptakan budaya pelayanan profesional, produktif, dan akuntabel untuk menurunkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pelaksanaan anggaran yang lebih baik

4.2.3 Isu strategis pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam

- Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Dinul Islam di kalangan masyarakat melalui pendidikan formal dan non formal.

4.2.4 Isu strategis kemiskinan

- Penurunan angka kemiskinan melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

4.2.5 Isu strategis keterlibatan peran swasta dalam pembangunan

- Pemetaan wilayah, sektor potensial dan kebutuhan investasi.
- Peningkatan iklim investasi melalui pelayanan perizinan terintegrasi, kepastian hukum dan politik, serta insentif pada bidang unggulan.

4.2.6 Isu strategis sektor Koperasi dan UMKM

- Peningkatan akses permodalan, bahan baku, pemasaran dan manajemen untuk Koperasi dan UMKM.
- Peningkatan kinerja dan produktivitas Koperasi dan UMKM.

4.2.7 Isu strategis pertumbuhan ekonomi

- Pengembangan industri potensial untuk peningkatan nilai tambah produk agroindustri.
- Perluasan akses pemasaran produk pertanian, perkebunan dan kehutanan.
- Pengembangan industri jasa berkaitan dengan pariwisata.
- Peningkatan kesadaran wirausaha masyarakat.

4.2.8 Isu strategis kualitas sumber daya manusia

- Perluasan akses dan mutu pendidikan formal, non formal dan informal yang inklusif untuk semua jenjang pendidikan, yang terintegrasi dengan nilai-nilai Dinul Islam.
- Peningkatan kualitas sarana, prasarana dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar pelayanan minimum.
- Peningkatan kesejahteraan ibu dan anak.

4.2.9 Isu strategis bidang infrastruktur dan tata ruang

- Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk memacu kegiatan ekonomi.
- Pengelolaan tata ruang untuk menjaga fungsi peruntukan lahan dan pengembangan pusat pelayanan baru.
- Peningkatan aktivitas pembangunan wilayah berbasis kampung, yang dilaksanakan dengan mengakomodasi permasalahan dan kebutuhan pembangunan, yang dilakukan secara partisipatif.
- Peningkatan permukiman agar layak huni dan penyediaan air bersih.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan pembangunan, potensi dan isu-isu strategis Kabupaten Bener Meriah, maka visi pembangunan Kabupaten Bener Meriah tahun 2012-2017 dirumuskan sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA BENER MERIAH MENJADI KABUPATEN MADANI”

Dengan modalitas masyarakatnya yang agamis dan memiliki kekayaan alam yang melimpah, Bener Meriah ingin menjadi kabupaten yang sejahtera. Cita-cita tersebut diwujudkan melalui pembangunan Bener Meriah menjadi kabupaten yang **Madani**. Konsep madani (*civil society*) merupakan keadaan yang hanya dapat muncul dalam suatu tatanan masyarakat maju dan beradab.

Dalam Islam, konsep madani didasarkan atas pilar ***egalitarianisme, pluralisme, toleransi dan deliberasi*** serta dilandaskan atas semangat demokratisasi. Konsepsi ini relatif berat untuk terwujud sepenuhnya dalam jangka waktu lima tahun kedepan, namun Pemerintah Bener Meriah berkeinginan kuat untuk meletakkan fondasi menuju cita-cita tersebut. Karena itu, Pemerintah Bener Meriah menyusun langkah pembangunan yang terstruktur, inovatif, transparan dan akuntabel yang diterjemahkan kedalam beberapa misi pembangunan.

5.2 MISI

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera dilandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Mengembangkan tata kelola pertanian yang terpadu
4. Mengembangkan aktivitas sektor agroindustri
5. Meningkatkan akses dan jaringan perdagangan global
6. Mengembangkan kemandirian dan usaha pemanfaatan sumber daya energi
7. Mengembangkan pemeliharaan dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan

Penjelasan Misi 1 - Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera dilandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT

Pemerintah kabupaten Bener Meriah berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera melalui beberapa pendekatan. Pendekatan pertama yang ingin dilakukan adalah dengan memperkuat tatanan dan struktur sosial masyarakat berdasarkan peran strategis agama dan budaya. Hal ini sejalan dengan falsafah masyarakat Gayo “***Edet kin peger, agama kin senuwen***” (Adat sebagai pagar, agama sebagai tanaman). Falsafah ini menggambarkan kekuatan hubungan dan fungsi antara adat dan agama dalam kehidupan

masyarakat. Untuk itu kegiatan pembangunan untuk penguatan kehidupan keberagamaan akan menjadi landasan utama pembangunan Bener Meriah.

Penguatan tatanan kehidupan beragama, kerukunan, dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan tuntunan agama secara paripurna (*kâffah*) untuk mencapai keberhasilan pembangunan merupakan implementasi langsung dari Al-Qur'an, surat Al-A'raf ayat 96, yang artinya:

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi . Tetapi jika mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya".

Pembangunan tatanan dan struktur sosial berlandaskan agama ini tentunya harus ditopang oleh kualitas sumber daya yang unggul. Untuk itu, pengembangan sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat merupakan pendekatan lain yang akan dilakukan. Bener Meriah akan mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah. Pembangunan sumberdaya manusia akan ditekankan untuk membangun manusia yang memiliki keluhuran budi pekerti dan kompetensi handal, dilandaskan pada konsep "*Bidik (cepat), lisik (rajin), cerdik (cerdas), dan mutasik (sejahtera)*".

Pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial juga memegang peran yang sangat penting. Sejumlah program nasional dan daerah di bidang kesehatan, seperti jaminan kesehatan, pengawasan kesehatan dan kehalalan pangan, perbaikan gizi, penyediaan air bersih dan sanitasi masyarakat harus terlaksana secara baik, professional, dan penuh tanggungjawab. Pendekatan-pendekatan ini diharapkan dapat bersinergi untuk mewujudkan misi menuju masyarakat yang berkualitas dan sejahtera yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Penjelasan Misi 2 - Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Fungsi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat akan ditingkatkan dengan cara penatakelolaan kepemerintahan melalui pemberian peran otonomi kepada pemerintah tingkat kecamatan, mukim dan kampung sesuai dengan asas desentralisasi. Masyarakat akan dilayani sepenuhnya ditingkat kampung dan kecamatan sehingga memangkas jalur birokrasi, sehingga akan terwujud efesiensi pelayanan secara terpadu. Hal yang bersifat pelayanan teknis akan ditangani langsung pada tingkat kecamatan dan kampung. Namun demikian, program yang menyangkut dengan kebijakan yang lebih luas terutama penataan ruang Kabupaten Bener Meriah dan perencanaan pembangunan infrastruktur akan dibahas ditingkat kabupaten.

Dengan mekanisme ini, kewenangan aparat pemerintahan kampung dan kecamatan menjadi sangat kuat karena otoritas berada pada pemerintahan kecamatan dan kampung. Peran pemerintahan tingkat kabupaten antara lain membina dan mengawasi jalannya kepemerintahan tingkat kecamatan dan kampung serta membahas program-program yang dapat diusulkan ke propinsi, pemerintah pusat dan membangun kerjasama dengan para investor lokal dan asing yang dapat membantu perkembangan ekonomi di Kabupaten Bener Meriah. Disamping itu hubungan yang harmonis akan selalu dipelihara antara eksekutif dan legislatif yang mempunyai peran sebagai pelaksana dan pengawas dalam mengelola Kepemerintahan Kabupaten Bener Meriah.

Penjelasan Misi 3 - Mengembangkan tata kelola pertanian yang terpadu

Sektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor unggulan Kabupaten Bener Meriah. Anugerah Allah SWT memungkinkan hampir semua tanaman, terutama kopi, hortikultura dan palawija dapat tumbuh subur di Kabupaten Bener Meriah. Pengembangan sektor pertanian dan perkebunan Bener Meriah akan dilakukan untuk memenuhi fungsi “4F” yaitu sebagai sumber makanan bagi manusia (*Food*), sumber pakan (*Feed*), sumber energi (*Fuel*) dan sumber pupuk (*Fertilizer*). Pengelolaan pertanian secara terpadu ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan hasil-hasil pertanian.

Permasalahan utama dalam pemasaran hasil pertanian selama ini adalah tidak stabilnya harga pasar karena pengaturan pola tanam yang tidak terkendali dengan baik. Untuk itu, akan dilakukan tata kelola pola tanam yang lebih terstruktur, sehingga produktivitas dan kontinuitas hasil-hasil pertanian dapat terjamin dan harga jual dapat terkendali. Peningkatan volume produksi akan dilakukan dengan pemanfaatan lahan tidur yang diarahkan sesuai dengan pola tata kelola pertanian. Selain itu akan dilakukan pula pengembangan produksi dan promosi hasil pertanian organik untuk meningkatkan nilai tambah. Peluang pemasaran hasil pertanian organik harus dimanfaatkan oleh para petani di Kabupaten Bener Meriah karena mempunyai nilai yang lebih tinggi.

Disamping itu peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur ke sentra-sentra pertanian merupakan salah satu strategi yang utama, agar hasil-hasil pertanian dapat segera di terima oleh para pedagang terutama di pasar-pasar tradisional dan pusat-pusat pemasaran.

Penjelasan Misi 4 - Mengembangkan aktivitas sektor agroindustri

Aktivitas pertanian, perkebunan dan kehutanan harus didukung oleh peningkatan nilai tambah produk yang dihasilkan. Peningkatan nilai tambah akan meningkatkan nilai jual dan daya saing pemasaran. Usaha untuk menumbuhkan industri-industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi sangat dibutuhkan. Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui regulasi investasi yang jelas akan dikembangkan. Selain itu kemudahan mobilitas barang dan jasa juga akan ditingkatkan.

Peningkatan aktivitas sektor produksi ini perlu didasarkan atas karakter dan budaya setempat. Karena itu, pengembangan industri pengolahan ini akan difokuskan pada skala mikro, kecil dan menengah. Peningkatan keterampilan masyarakat menjadi sangat penting dilakukan. Berkembangnya sektor ini akan berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya kesejahteraan.

Penjelasan Misi 5 -Meningkatkan akses dan jaringan perdagangan global

Pengembangan sektor perdagangan sangat dibutuhkan dalam rangka mempertahankan produksi produk unggulan berskala mikro, kecil, sedang maupun besar. Kabupaten Bener Meriah akan membangun kerjasama perdagangan lokal, regional dan internasional untuk meningkatkan aktivitas perdagangan ini, khususnya untuk produk-produk unggulan seperti hasil pertanian organik dan ekopariwisata. Pembukaan unit-unit usaha milik pemerintah daerah akan memudahkan pengembangan dan pengelolaan sektor perdagangan ini.

Perdagangan juga membutuhkan pengembangan sektor pelayanan dan jasa transportasi yang representatif untuk meningkatkan mobilitas barang dan jasa. Selain itu penyederhanaan proses birokrasi perdagangan juga akan dilakukan. Tumbuhnya sektor

perdagangan juga akhirnya akan meningkatkan sektor produksi. Untuk itu Kabupaten Bener Meriah akan memberikan dukungan untuk tumbuhnya sektor produksi ini, khususnya UMKM. Meingkatkannya aktivitas sektor perdagangan ini tentunya akan menambahkan kesejahteraan masyarakat.

Penjelasan Misi 6 -Mengembangkan kemandirian dan usaha pemanfaatan sumber daya energi

Potensi sumber energi terbarukan di Kabupaten Bener Meriah sangat besar. Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan dalam skala kecil dan menengah melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) akan diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan energi (listrik) dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah. Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan dalam skala besar seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLT Panas Bumi), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLT Biomassa) akan diarahkan untuk tujuan komersial dan diharapkan memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembangunan PLTMH membutuhkan investasi relatif rendah dan pengoperasiannya relatif sederhana, sehingga pengembangan dan pengelolaannya akan dilakukan secara swadaya melalui unit-unit usaha pada masing-masing desa/kampung dengan ditopang dukungan dari Pemda Bener Meriah. Dalam hal pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan skala besar, Kabupaten Bener Meriah akan bekerjasama dengan pihak luar atau para investor yang tertarik dengan bidang usaha tersebut. Pemanfaatan sumberdaya energi tersebut diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Bener Meriah melalui peningkatan PAD.

Dalam masa transisi ketahanan energi, kuantitas maupun kualitas energi konvensional seperti BBM, gas elpiji dan energi fosil lainnya masih akan tetap diperhatikan. Karena itu, Pemda Kabupaten Bener Meriah akan secara serius membangun dan menata infrastruktur penyediaan dan distribusi energi yang diperkuat dengan kebijakan-kebijakan yang menjamin ketahanan energi lokal dalam upaya mendukung ketahanan energi nasional.

Penjelasan Misi 7 - Mengembangkan pemeliharaan dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan

Pemeliharaan hutan sangat penting dilakukan mengingat bahwa hutan dalam wilayah Bener Meriah, yang termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser, berkontribusi besar terhadap pemeliharaan iklim global. Karena itu, akan dilakukan usaha keras untuk melestarikan hutan lindung. Disisi lain, potensi hutan juga harus dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Karena itu pengembangan hutan tanaman industri akan dilakukan melalui optimalisasi lahan kritis. Salah satu tanaman hutan industri akan dioptimalkan potensinya adalah pohon pinus yang dapat hidup hampir diseluruh wilayah Kabupaten Bener Meriah. Potensi ini akan dikelola dengan baik dan benar melalui pola kerjasama investasi. Isu strategis kompensasi karbon dari negara-negara yang sangat peduli terhadap pemeliharaan lingkungan hidup akan dimanfaatkan untuk pengembangan hutan industri ini. Selain itu, pengembangan industri pengolahan hasil hutan dan ekowisata juga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi Kabupaten Bener Meriah. Dalam rangka pemeliharaan hutan ini, maka kualitas dan kuantitas infrastruktur harus ditingkatkan untuk monitoring dan evaluasi terhadap usaha-usaha yang dilakukan.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Bener Meriah maka disusun tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun kedepan sebagai berikut :

Misi 1 - Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera dilandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, dengan tujuan meningkatkan pelaksanaan syariat Islam, kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dengan sasaran sebagai berikut :

- Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama bagi masyarakat
- Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Bener Meriah
- Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat Bener Meriah
- Meningkatnya kualitas kesejahteraan sosial Masyarakat Bener Meriah

Misi 2 - Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan tujuan; (1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan penguatan *desentralisasi* pelayanan; (2) Mewujudkan pemerintahan yang bersih melalui penguatan sistem evaluasi berbasis kinerja; dengan sasaran sebagai berikut:

- Terwujudnya peran otonomi kepada pemerintah tingkat kecamatan, mukim dan kampung sesuai dengan azas *desentralisasi*
- Terwujudnya tata kelola birokrasi yang mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat
- Terwujudnya pemerintahan kabupaten Bener Meriah yang bermartabat, bersih serta bebas KKN dengan mengedapankan kenyamanan kerja, disiplin kerja, kualitas kerja dan profesionalisme
- Terpeliharanya hubungan yang lebih harmonis antara eksekutif dan legislatif yang mampu menjalankan fungsi *check and balance*

Misi 3 - Mengembangkan tata kelola pertanian yang terpadu dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas petani
- Meningkatnya produktivitas dan kontinuitas hasil pertanian

Misi 4 - Mengembangkan aktivitas sektor agroindustri dengan tujuan mengembangkan sektor riil berbasis agroindustri dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya aktivitas industri berbasis pertanian, perkebunan dan kehutanan
- Meningkatnya nilai tambah hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan

Misi 5 -Meningkatkan akses dan jaringan perdagangan global dengan tujuan meningkatkan penetrasi pasar domestik dan internasional produk-produk unggulan Bener Meriah dengan sasaran sebagai meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis keunggulan lokal.

Misi 6 -Mengembangkan kemandirian dan usaha pemanfaatan sumber daya energi dengan tujuan mengupayakan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor energi, dengan sasaran terwujudnya pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan secara optimal.

Misi 7 - Mengembangkan pemeliharaan dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan dengan tujuan menjamin fungsi hutan dengan sasaran sebagai berikut:

- Terjaganya fungsi hutan
- Termanfaatkannya potensi hutan produksi

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. STRATEGI UMUM

Strategi umum yang akan diambil dalam rangka mencapai visi, mewujudkan misi, mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bener Meriah tahun 2012-2017 meliputi :

1. Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat.
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan penguatan desentralisasi pelayanan.
3. Mewujudkan pemerintahan yang bersih melalui penguatan sistem evaluasi berbasis kinerja.
4. Mengembangkan tata kelola pertanian yang terpadu melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan Tata Ruang demi tercapainya ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
5. Mengembangkan sektor riil berbasis agroindustri untuk mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan.
6. Meningkatkan penetrasi pasar domestik dan internasional untuk produk-produk unggulan Bener Meriah
7. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor energi
8. Menjamin fungsi hutan yang berkelanjutan untuk kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.

6.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Demi tercapainya visi pembangunan Kabupaten Bener Meriah (2012-2017) maka perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan untuk merumuskan tentang arah kebijakan pembangunan tahunan atau tahapan pembangunan pertahunnya yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Hal ini nantinya akan memudahkan dan membantu dalam pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan strategi dan arah kebijakan disusun dengan memperhatikan hasil analisis SWOT berikut ini.

Tabel 6.1 SWOT Untuk Merumuskan Strategi

KEKUATAN (STRENGTH)	PELUANG (OPPORTUNITY)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh 2. Potensi sumberdaya alam yang cukup tersedia, terutama pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan serta pertambangan, energi (Sumber daya alam) dan mineral 3. Memiliki Keanekaragaman sumber daya hayati 4. Dinamika kehidupan, karakter dan budaya masyarakat Bener Meriah yang religius 5. Memiliki Keanekaragaman sosial dan budaya 6. Penerapan syariat Islam 7. Objek wisata yang potensial 8. Daerah penghasil kopi dengan kualitas dunia 9. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan dan investasi langsung dengan pihak luar negeri 2. Tingginya permintaan terhadap komoditas unggulan 3. Kerjasama regional strategis (IMT-GT) 4. Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang MP3EI (masterplan perencanaan pembangunan ekonomi indonesia) 5. Konvensasi Perdagangan Hidro carbon (<i>Carbon Trade</i>) 6. Tingginya distribusi barang dan jasa strategis 7. Masih tingginya minat investor untuk berinvestasi di bidang agroindustri 8. Pencapaian MDGs 2015 dan keberlanjutan kerja sama dengan masyarakat internasional 9. Pengembangan ekonomi berbasis syariah
KELEMAHAN (WEAKNESS)	ANCAMAN (THREAT)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sepenuhnya tersedia turunan regulasi dari Undang-undang Nomor 11 Tentang Pemerintahan Aceh 2. Tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional 3. Kualitas SDM dan mutu pendidikan relatif masih rendah 4. Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Alam terutama di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan, serta pembangkit tenaga listrik 5. Infrastruktur dasar belum memadai terutama di daerah – daerah sentra produksi pertanian dan perkebunan 6. Rendahnya produksi, produktifitas dan nilai tambah komoditas pertanian dan perikanan 7. Belum berkembangnya agroindustri dan kepariwisataan 8. Belum meratanya sarana pendukung pelayanan kesehatan 9. Belum optimalnya penegakan supremasi hukum 10. Termasuk wilayah rawan bencana 11. Masih rendahnya mutu dan keamanan pangan serta kurangnya diversifikasi makanan. 12. Masih rendahnya kemandirian fiscal daerah 13. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang <i>clean and clear (good governance)</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beredarnya produk luar (impor) dan masuknya tenaga kerja dengan harga bersaing 2. Perubahan iklim global (<i>climate change</i>) 3. Sumberdaya alam yang semakin terdegradasi 4. Infiltrasi budaya asing yang negatif 5. Pelanggaran batas teritorial 6. Instabilitas perekonomian global

Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan adalah sebagaimana tersebut dalam tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 6.2. Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan

Misi 1: Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera dilandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam, kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial			
<u>Pelaksanaan syariat Islam yang kaffah</u>	Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama bagi masyarakat	Penguatan koordinasi dan organisasi perangkat daerah pelaksana pembangunan syariat Islam	<ol style="list-style-type: none"> Menegaskan pelaksanaan sejumlah regulasi pemerintah kabupaten terkait penerapan syariat Islam Meningkatkan kapasitas aparatur penegakan syariat Memperluas dan memperkuat fungsi koordinasi dalam pelaksanaan syariat Islam Meningkatkan peran organisasi pengelola harta agama
	Penanaman keimanan dan ketaqwaan melalui pendidikan		<ol style="list-style-type: none"> Menguatkan peran lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal Melakukan pendidikan bagi anak usia dini di lingkungan rumah ibadah Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana ibadah
	Penguatan kualitas informasi keagamaan di masyarakat		<ol style="list-style-type: none"> Manfaatkan media alternatif (oral, seni budaya, dan radio lokal) untuk menyampaikan informasi keagamaan Melaksanakan penyuluhan agama secara terpadu dan berkelanjutan
	Peningkatan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan di kelompok masyarakat		<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan peran perkumpulan dan organisasi keislaman Menguatkan peran Majelis Adat dalam mengontrol dan melakukan kajian kebutuhan pengembangan peran adat Gayo
<u>Pendidikan & IPTEK</u>	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Bener Meriah	Perluasan dan pemerataan akses pendidikan formal dan non-formal setiap jenjang pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> Menerapkan bebas biaya pendidikan wajib belajar 12 tahun Meningkatkan akses dan mutu PAUD untuk mengembangkan karakter sejak dini Memberikan jaminan pendidikan bagi masyarakat miskin Meningkatkan kerjasama dengan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		PTN untuk memberikan akses yang lebih luas bagi putra daerah BM	5. Meningkatkan pembinaan terhadap pendidikan pesantren tradisional, lembaga tafhib al quran (TTA) dan taman pendidikan al quran (TPA). 6. Mengembangkan program pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus (ABK)
	Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan	1. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi SPM 2. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu mengembangkan karakter peserta didik 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan menengah kejuruan didasarkan atas kebutuhan pasar tenaga kerja 4. Mendorong pendirian pendidikan tinggi kejuruan yang berkualitas yang berbasis potensi daerah dan kebutuhan pasar tenaga kerja	
	Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pelayanan pendidikan	1. Memperkuat Sistem Informasi Manajemen Sekolah 2. Memperkuat pengelolaan manajemen sekolah	
Kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Bener Meriah	Peningkatan layanan kesehatan yang profesional, berkualitas, adil, merata dan terjangkau	1. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh Kabupaten Bener Meriah 2. Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga medis, paramedis serta penyuluhan kesehatan 3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan 4. Mengurangi jumlah balita gizi buruk 5. Meningkatkan pengawasan terhadap makanan yang halal dan bergizi. 6. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas pelayanan kesehatan 7. Meningkatkan pengawasan kesehatan 8. Memberikan dukungan penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Peningkatan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 2. Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular 3. Melakukan pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan	
<u>Kesejahteraan Sosial</u>	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak	1. Meningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak 2. Meningkatkan peran serta perempuan dalam organisasi sosial dan organisasi politik.
	Menurunkan jumlah kelompok masyarakat rawan kesejahteraan sosial		Meningkatkan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial
	Peningkatan kapasitas pemuda dalam seni, budaya dan olahraga		Meningkatkan aktivitas pemuda dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pembinaan seni, budaya dan olahraga

Tabel 6.3. Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan penyelengaraan pemerintahan yang berkualitas dengan penguatan desentralisasi pelayanan	Terwujudnya peran otonomi kepada Pemerintah Tingkat Kecamatan, Mukim dan Kampung sesuai dengan azas desentralisasi;	Menciptakan tatakelola pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan penguatan sistem kelembagaan yang demokratis, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, kooperatif dan kesetaraan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan tatakelola untuk penguatan sistem kelembagaan yang demokratis, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, kooperatif dan kesetaraan 2. Meningkatkan peran camat dan kepala mukim/kampong dalam melayani masyarakat
	Terwujudnya tatakelola birokrasi yang mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat;	Mewujudkan tatakelola birokrasi yang optimal dalam pelayanan publik melalui pelayanan terpadu yang didukung teknologi;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penguatan terhadap perencanaan berbasis data 2. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah
Mewujudkan pemerintahan yang bersih melalui penguatan sistem evaluasi berbasis kinerja	Terwujudnya pemerintahan Kabupaten Bener Meriah yang bermartabat, baik, bersih, dan amanah serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, dengan mengedepankan kenyamanan kerja, disiplin kerja, kualitas kerja dan profesionalisme	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan lingkungan Pemkab Bener Meriah	Mewujudkan tatakelola birokrasi yang optimal dalam pelayanan publik melalui pelayanan terpadu yang didukung teknologi
		Menguatkan manajemen internal seluruh unit kerja di	Menerapkan kebijakan pengembangan karir aparatur melalui pelatihan dan pencapaian prestasi
	Terpeliharanya hubungan yang lebih harmonis antara Eksekutif dan Legislatif yang mampu menjalankan fungsi <i>check and balance</i>	Memelihara hubungan dan sistem komunikasi yang intensif antara setdakab/SKPD dengan DPRK	Meningkatkan koordinasi dalam penganggaran dan pengawasan pembangunan

Tabel 6.4. Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan
Misi 3: Mengembangkan Tata Kelola Pertanian Yang Terpadu

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani	Meningkatnya kualitas petani	Penguatan kelembagaan petani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran koperasi 2. Menumbuhkembangkan konsep agroindustri dan agribisnis
	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani (agriculture training centre)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM petani 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat petani terhadap bencana alam
	Optimalisasi peran pemerintah		Meningkatkan kinerja tim penyuluhan pertanian secara intensif
	Peningkatan kemitraaan dengan pihak swasta dan perbankan		Meningkatkan penyertaan modal
	Meningkatnya produktivitas dan kontinuitas hasil pertanian	Pembuatan peta produk pertanian unggulan (zonasi) dan penyusunan penataan ruang pola tanam	Mengembangkan penataan ruang pola tanam berdasarkan peta zonasi produk unggulan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur
	Peningkatan produktivitas hasil pertanian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penggunaan lahan tidur 2. Memperkuat penggunaan teknologi pasca panen
	Optimalisasi peran BUMN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki manajemen pengelolaan pertanian 2. Mengembangkan sektor usaha produktif
	Peningkatan produk pertanian organic		Mengembangkan produk pertanian organik
	Pengembangan tanaman hias (ornamental)		Mengembangkan desa bunga

Tabel 6.5. Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan
Misi 4: Mengembangkan Aktivitas Sektor Agroindustri

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mengembangkan sektor riil berbasis agroindustri	Meningkatnya aktivitas industri berbasis pertanian, perkebunan dan kehutanan	Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui regulasi investasi yang jelas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempermudah dan memperlancar mobilitas barang dan jasa melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur 2. Menciptakan peluang usaha melalui regulasi yang <i>pro growth</i> 3. Modernisasi industri
	Meningkatnya nilai tambah hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan	Melakukan diversifikasi produk pertanian dan perkebunan olahan yang berdaya saing tinggi berbasis UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkembangkan industri skala UMKM untuk pengolahan hasil pertanian dan perkebunan 2. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah dan standar mutu produk pertanian dan perkebunan

Tabel 6.6. Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan
Misi 5: Meningkatkan Akses dan Jaringan Perdagangan Global

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan penetrasi pasar domestik dan internasional produk-produk unggulan Bener Meriah	Meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis keunggulan lokal	Membangun kerjasama perdagangan lokal, regional dan internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran pemerintah dalam memperluas akses pemasaran 2. Memfasilitasi industri untuk mendapatkan akses pemasaran 3. Menciptakan kemudahan investasi dan menyederhanakan proses birokrasi perdagangan 4. Menetapkan dasar-dasar dan ketentuan perdagangan yang baik dan memiliki kepastian
	Meningkatkan aktivitas perdagangan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka unit-unit usaha daerah bidang perdagangan 2. Mempermudah dan memperlancar mobilitas barang dan jasa 3. Memfasilitasi perdagangan sektor riil dan jasa masyarakat 4. Menggairahkan iklim perdagangan

Tabel 6.7. Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan
Misi 6: Mengembangkan Kemandirian dan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Energi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mengupayakan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor energi	Termanfaatkannya sumberdaya energi terbarukan secara optimal	Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan energi PLTMH sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan keterlibatan Pemda dalam pengembangan PLTMH 2. Merumuskan kebijakan untuk perlindungan <i>catchment area</i> untuk keberlanjutan ketersediaan energi PLTMH 3. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan energi PLTMH 4. Optimalisasi peran Prusda dalam pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan energi PLTMH secara komersil
		Mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan investor dalam pengembangan dan pengelolaan energi listrik geothermal, PLTM, PLTA, PLTS dan biomassa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempromosikan potensi energi terbarukan 2. Mempermudah investasi bidang energi melalui pembuatan regulasi terkait 3. Mendirikan Lembaga Penjamin (<i>risk taker</i> di bawah Pemda) bidang energi 4. Melakukan pendekatan yang intensif kepada pihak perbankan untuk mendapatkan pembiayaan, melalui hasil studi kelayakan yang handal
		Memenuhi kebutuhan energi listrik dan energi konvensional lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penggunaan energi terbarukan mulai dari tingkat kampong/desa 2. Merumuskan kebijakan untuk mengoptimalkan infrastruktur pendukung ketersediaan dan distribusi energi 3. Menyediakan fasilitator energi sehingga seluruh aspek energi dapat dipahami dengan baik oleh seluruh masyarakat 4. Merumuskan kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca

Tabel 6.8. Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan
Misi 7:Mengembangkan Pemeliharaan dan Pemanfaatan Hutan Yang Berkelanjutan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menjamin fungsi hutan	Terjaganya fungsi hutan lindung	Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya fungsi hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kecintaan masyarakat kepada hutan 2. Meningkatkan peran lembaga adat masyarakat dalam konservasi hutan
		Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar fungsi hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan perlindungan hutan 2. Meningkatkan kerjasama dengan instansi vertikal terkait dalam penegakan hukum perlindungan hutan
	Termafaatkannya potensi hutan produksi	Peningkatan produktivitas hasil hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penggunaan lahan kritis 2. Mengembangkan industri pengolahan hasil kehutanan 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur
		Peningkatan pemanfaatan hasil hutan non kayu	Mengembangkan potensi hutan non kayu untuk wisata

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah 2012-2017 sebagaimana diuraikan di dalam Bab V perlu diterjemahkan dalam rumusan kebijakan umum dan program secara konsisten dan spesifik untuk mencapai tujuan pembangunan. Program pembangunan merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau bersama masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah.

Program-program pembangunan yang disusun dalam RPJMD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang terdiri dari tiga jenis program yaitu:

1. Program SKPD yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
2. Program lintas SKPD yang dilaksanakan melibatkan lebih dari satu SKPD
3. Program kewilayahan, yang merupakan program pembangunan daerah yang integral dengan program pembangunan kabupaten lain dan provinsi.

7.1. Kebijakan Umum

Program pembangunan diarahkan oleh kebijakan umum yang dibuat dalam empat perspektif, sebagai berikut:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan yang mengarahkan segmentasi dan kebutuhan masyarakat yang akan dilayani, serta layanan apa yang harus diberikan.
2. Kebijakan pada perspektif proses internal untuk mendorong penciptaan proses inovasi untuk meningkatkan pelayanan.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan untuk mendorong peningkatan kinerja masa depan yang dilakukan dalam bentuk investasi perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional.
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yang menjadi pendorong pelaksanaan program melalui pengefektifan alokasi anggaran, efisiensi belanja dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah.

7.2 Program Pembangunan

Berdasarkan kebijakan umum yang telah diterangkan di atas, berikut ini adalah program-program pembangunan yang disusun per misi pembangunan berdasarkan tujuan dan strategi yang terpilih.

Tabel 7.1. Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan

Misi 1: Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera dilandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama bagi masyarakat	Penguatan koordinasi dan organisasi perangkat daerah	Menegaskan pelaksanaan sejumlah regulasi pemerintah daerah	Program Perencanaan Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Regulasi kabupaten terkait penerapan syariat Islam	0	1,00	Otda	Dinas Syariat Islam
		Meningkatkan kapasitas aparatur penegakan syariat	Program peningkatan sumber daya teknis pelaksana dan pengawas Syariat Islam	Kasus pelanggaran syariat yang selesai ditangani	0,94	25 %	Otda	Dinas Syariat Islam
			Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Jumlah pelanggaran Qanun Syariat	102 Kasus	30	Otda	Dinas Syariat Islam

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
				Angka baca dan tulis Al Quran anak muslim lulus SD	-	100 %	Otda	
			Program Pembinaan dan Pemberdayaan Petugas Keagamaan untuk meningkatkan kualitas pengamalan agama masyarakat	Mesjid/menasah yang aktif melaksanakan pengajian setelah magrib	-	100 %	Otda	Dinas Syariat Islam
				Desa yang memiliki Majelis Taklim aktif	-	100 %		
				Shalat berjemaah di mesjid/Menasah lima waktu	-	100 %		
Memperluas dan memperkuat fungsi koordinasi dalam pelaksanaan syariat Islam	Program Penelitian dan pengembangan pelaksanaan syariat Islam			kajian yang dijadikan acuan kebijakan pada tahun berikutnya	-	100 %	Otda	Dinas Syariat Islam
	Program peningkatan Pelayanan Zakat			Jumlah muzakki yang membayar zakat maal	-	50 %	Otda	Baitul Mal
				Angka Kemiskinan	26,2 2 %	13,72 %		

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
			Program Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan Agama sesuai Qanun Syariat Islam	Jumlah pelanggaran Qanun Syariat	102 Kasus	30 Kasus	Orda	Dinas Syariat Islam
			Program Sinergisasi Pelaksanaan Syariat Islam antar Pemangku Kepentingan dalam Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah	Jumlah pelanggaran Qanun Syariat	102 Kasus	30 Kasus	Orda	Dinas Syariat Islam
		Meningkatkan peran organisasi pengelola harta agama	Program Sertifikasi, Penata Usahaan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Agama	Ketepatan pengelolaan alokasi harta agama	-	100,00	Orda	Baitul Mal

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
Penanaman keimanan dan ketaqwaan melalui pendidikan anak usia dini	Meningkatkan pendidikan keagamaan melalui kegiatan pendidikan anak usia dini	Program Pembinaan Pendidikan keagamaan bagi anak usia dini	Kemampuan anak lulus PAUD membaca Iq'ra 2 dan Do'a-do'a pendek	-	70 %	Pendidikan	Dikjar	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah	Program Peningkatan Kualitas, Akses dan Sanitasi Rumah Ibadah	Jumlah rumah ibadah yang memiliki kualitas, akses dan sanitasi yang baik	-	100 %	Pemberdayaan Perempuan	BPM	
Penguatan kualitas informasi keagamaan di masyarakat	Memanfaatkan media alternatif (oral, seni budaya, dan radio lokal) untuk menyampaikan informasi keagamaan	Program Penyemarakan Syariat Islam	Jumlah pelaksanaan perayaan hari-hari besar Islam di kecamatan	-	100 %	Orda	Setda (Kabag KESRA) dan Dinas Syariat Islam	

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
	Melaksanakan penyuluhan agama secara terpadu dan berkelanjutan	Program Penyuluhan Agama Islam dan Sosialisasi Qanun Syariat Islam	Jumlah frekuensi publikasi tentang syariat islam di media cetak dan elektronik	-	472,00	Orda	Dinas Syariat Islam	
	Menguatkan peran Majelis Adat dalam mengontrol dan melakukan kajian kebutuhan pengembangan peran adat gayo	Program Peningkatan Kapasitas Tokoh Adat	Pelaksanaan adat gayo dalam kehidupan sosial kemasyarakatan	-	60,00	Orda	MAG	

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Bener Meriah	Perluasan dan pemerataan akses pendidikan formal dan non - formal setiap jenjang pendidikan	Menerapkan bebas biaya pendidikan wajib belajar 12 tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun (Tidak ditotalkan)	APS SD/MI/SDLB/Paket A APS SMP/MTs /SMPLB/Paket B APS SMA/MA/SMK/SMALB /Paket C	100,00	100,00	Pendidikan	Disdikpora
		Memberikan jaminan pendidikan bagi masyarakat miskin dan berkebutuhan khusus	Program Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun	Rata-rata lama sekolah	8,77	10,20	Pendidikan	Disdikpora
		Meningkatkan akses PAUD untuk mengembangkan	Program Pendidikan Anak Usia Dini PAUD untuk mengembangkan	APK PAUD PAUD Negeri terpadu di kecamatan	32,00	60,00	Pendidikan	Disdikpora
					1,00	10,00		

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
		gkan karakter sejak dini						
	Meningkatkan kerjasama dengan PTN untuk memberikan akses yang lebih luas bagi putra/putri daerah BM	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka melanjutkan S1 yang mendapatkan Bea Siswa PEMDA	0	50 Org	Pendidikan	Disdikpora	
Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi SPM	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD PAUD Negeri terpadu di kecamatan	32 % 1 unit	60 % 10 unit	Pendidikan	Disdikpora	

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
			Program Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun	Rata-rata nilai UN SD	7,60	7,74	Pendidikan	Disdikpora
				Rata-rata nilai UN SMP	7,66	7,99		
				Rata-rata nilai UN MTS	7,58	7,94		
			Program Pendidikan Atas	Rata-rata nilai UN SMA	7,95	8,13	Pendidikan	Disdikpora
				Rata-rata nilai UN MA	7,65	7,81		
				Rata-rata nilai UN SMK	7,44	7,58		
			Program Pendidikan Non Formal	Angka pengangguran	5,16	2 %	Pendidikan	Disdikpora
					%			
			Program Pendidikan Luar Biasa	Rata-rata lama sekolah	8,77	10,20	Pendidikan	Disdikpora
					Thn	Thn		
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Angka melek huruf dewasa	98,5	99,80	Kearsipan	Arsip/perpustakaan
					0 %			

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
		Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu mengembangkan karakter peserta didik	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga Kependidikan	Rata-rata nilai UN SD Rata-rata nilai UN SMP Rata-rata nilai UN MTS Rata-rata nilai UN SMA Rata-rata nilai UNMA Rata-rata nilai UN SMK	7,60 7,66 7,58 7,95 7,65 7,44	7,74 7,99 7,94 8,13 7,81 7,58	Pendidikan	Disdikpora
		Meningkatkan kualitas pendidikan menengah kejuruan didasarkan atas kebutuhan pasar tenaga kerja	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka pengangguran	3,00	2,00	Pendidikan	Disdikpora

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
		Mendorong pendirian dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi kejuruan yang berbasis potensi daerah dan kebutuhan pasar tenaga kerja	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka pengangguran	3,00	2,00	Pendidikan	Disdikpora
	Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pelayanan pendidikan	Memperkuat Sistem Informasi Manajemen Sekolah	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Peningkatan penerapan Sistem impormasi Sekolah	-	60	Pendidikan	Disdikpora

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Bener Meriah	Peningkatan layanan kesehatan yang profesional, berkualitas, adil, merata dan terjangkau	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh Kabupaten Bener Meriah	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah	Rumah Sakit tipe C	Tipe D	Tipe C	Kesehatan	RSUD Kab Bener Meriah
			Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio puskesmas perawatan per 100.000 penduduk Peningkatan rasio pustu per 100.000 penduduk Peningkatan rasio polindes per 100.000 penduduk	4 6,40 92,8	8 11 148,80 0	Kesehatan	Dinkes

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan ketersediaan obat, dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	-	90 %	Kesehatan	Dinkes	
			Cakupan imunisasi Desa/kelurahan (Universal Child Immunization = UCI)	81,2	95%			
			Ibu Hamil Mendapat Tablet Fe3	0				
			Cakupan imunisasi campak	74,8	85 %			
				8 %				
				86,8	92,80			
				0 %	%			
		Program Keluarga Berencana	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	-	66 %	Pemberdayaan Perempuan	BPPKBPA	
			Angka Kematian Ibu (AKI)	7	3			

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
		Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga medis, paramedis serta penyuluhan kesehatan	Program Pendidikan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	Peningkatan rasio dokter umum per 100.000 penduduk	37,5 8	52	Kesehatan	Dinkes
				Peningkatan rasio perawat per 100.000 penduduk	90,4 5	100		
				Peningkatan rasio bidan per 100.000 penduduk	76	90		
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Ibu (AKI)	7	3	Kesehatan	Dinkes	
			Angka kematian bayi dan Balita (AKBB) per 1000	56,4 0	7,00			
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	98,7 3 %	99 %			
			Rasio posyandu per 100 balita	1,64	2			
			Angka K-1	96 %	100 %			
			Angka K-4	90,9 3 %	95 %			

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
			Program peningkatan SDM RSUD-BM	persentase tenaga medis yang bekerja ditempat yang sesuai dengan kompetensinya (mis: BTCLS, APN,ICU,OK,MTB)	-	80 %	Kesehatan	RSUD Kab Bener Meriah
				Jumlah dokter umum rumah sakit type C (9 org)	7 Org	9 Org		
				Jumlah dokter gigi rumah sakit type C (2 org)	2 Org	2 Org		
				Jumlah dokter spesialis rumah sakit type C (12 org)	3 Org	12 Org		
				Jumlah perawat rumah sakit type C	57 Org	70 Org		
				Jumlah bidan rumah sakit type C	55 Org	55 Org		

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
		Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kesehatan	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan kunjungan bayi (KN = Kunjungan Neonatus Lengkap)	81,3 9 %	90 %	Kesehatan	Dinkes
				Cakupan imunisasi campak	86,8 4 %	92,80 %		
				Cakupan imunisasi Desa/kelurahan (Universal Child Immunization = UCI)	81,1 2 %	95 %		
				Balita mendapatkan Vitamin A	94,9 6 %	99 %		
				Prevalence balita gizi kurang – gizi buruk	3,51 %	1,50 %		
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Prevalence cacingan menurun	-	80 %	Kesehatan	Dinkes
		Program Perencanaan Pengembangan Bidang Kesehatan	Program Perencanaan Pengembangan Bidang Kesehatan	Terselenggaranya kegiatan pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan	-	80 %	Kesehatan	Dinkes

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
Mengurangi jumlah balita gizi buruk		Program Perbaikan Gizi Masyarakat		Prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang)	3,51	1,5 %	Kesehatan	Dinkes
				Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	100	100 %		
				cakupan balita ditimbang berat badannya	57,6	92 %		
Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas pelayanan kesehatan		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	80 %	Kesehatan	Dinkes
				Persentase Layanan Kesehatan sesuai SPM	-	80 %		
				Tersedianya data surveillance secara reguler untuk semua layanan kesehatan	-	100 %		
Meningkatkan pengawasan kesehatan dan kehalalan pangan		Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan		Percentase Sarana dan Tenaga Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang bersertifikasi sehat dan halal	-	60 %	Kesehatan	Dinkes

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
				Persentase Sarana dan Tenaga Pengolahan Air Minum Isi Ulang yang bersertifikasi sehat dan halal	-	70 %		
				Persentase Restoran/Rumah Makan/Warung Kopi yang bersertifikasi sehat dan halal	-	70 %		
Memberikan dukungan penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Umur harapan hidup	67,6 3	68,1	Kesehatan Dinkes			
		Persentase Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	6,03 %	55 %				

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
				Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	38,6 %	100 %		
				Persentase Masyarakat yang mendapatkan layanan kesehatan haji	100 %	100 %		
				Persentase Masyarakat yang mendapatkan layanan kesehatan CATIN (Calon Pengantin)	-	100 %		
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Percentase kualitas hidup Lansia yang baik (Quality Of Life = QoL)	-	85 %	Kesehatan	Dinkes

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
Peningkatan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan (PHBS)	Meningkatkan peran serta masyarakat untuk terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat	Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat		Persentase rumah tangga yang melaksanakan hidup bersih dan sehat (PHBS) Cakupan Desa Siaga Aktif Angka K-1 Angka K-4 Prevalence balita gizi kurang – gizi buruk	5,5 % 12,6 96 % 90,9 3,51	30 % 55 % 100 % 95 % 1,50 %	Kesehatan	Dinkes
Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan Persentase keberhasilan pengobatan pada kasus baru TB Paru (BTA positif) Angka kasus positif Malaria (<1 per 1.000 penduduk)	17,6 - 4,41	36 % 85 % < 1	Kesehatan	Dinkes

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
				Cakupan imunisasi Desa/kelurahan (Universal Child Immunization = UCI)	81,1 2 %	95 %		
				Angka Penemuan kasus baru KUSTA (per 100.000 penduduk)	1,00	< 1		
				Jumlah kasus gigitan hewan penular rabies yang ditangani sesuai standar	58 Kasu s	20 Kasus		
				Prevalensi kasus HIV	-	< 1		
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular		Penurunan Prevalensi Penyakit Jantung Pembuluh Darah	22,3 1 %	18 %	Kesehatan	Dinkes
				Penurunan Prevalensi penyakit Diabetes	-	9,4		
Melakukan pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan		Program Pengembangan Lingkungan Sehat		Percentase rumah tangga yang memiliki sumber air minum terlindung	91,2 0 %	100 %	Kesehatan	Dinkes

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
				Persentase rumah tangga yang memiliki pengelolaan air limbah sehat	46,1 7 %	70 %		
				Persentase rumah tangga yang memiliki jamban sehat	55,8 1 %	80 %		
			Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum sehat	91,2 0 %	100 %	Pekerjaan Umum	DBMCK
Meningkatnya kualitas kesejahteraan sosial masyarakat	Peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak	Meningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Turunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	111 Kasus	50 Kasus	Pemberdayaan Perempuan	BPPKBPA
				Menurunnya Angka Rumah Tangga Miskin (RTM)	-	10 %		
			Meningkatkan peran serta perempuan dalam politik dan	Program Peningkatkan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Terpenuhinya Kuota Perempuan dilegeslatif	4 %	20 %	Pemberdayaan Perempuan
					Terpenuhinya Kuota Perempuan Eksekutif	1,75 %	8,77 %	BPPKBPA

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
kebijakan publik								
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Menurunnya Angka PMKS	-	30 %	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Menurunkan jumlah kelompok masyarakat rawan kesejahteraan sosial	Meningkatkan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Pendapatan per kapita	422 Rb/bln	711 Rb/bln	Sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial
				Angka kemiskinan	26,3 0 %	13,75 %		
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Menurunnya jumlah masyarakat dibawah garis kemiskinan	32.1 60 Jiwa	20.000 jiwa (12.160 /5 tahun)	Sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial
			Realisasi Respon Terhadap Bencana	-	100 %			
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persejangan penyandang cacat yang bekerja secara mandiri	47,3 7 %	90 %	Sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
			Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Menurunnya jumlah jompo terlantar	192 jiwa	20 jiwa	Sosial	Dinas Sosial
			Program pembangunan infrastruktur perdesaan	infrastruktur perdesaan	-	50 %	Perencanaan	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya
			Program Lingkungan Sehat Perumahan	infrastruktur perdesaan	-	50 %	Perencanaan	BAPPEDA
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	infrastruktur perdesaan	-	50 %	Pekerjaan Umum	Dinas Pengairan
Peningkatan kapasitas pemuda dalam seni, budaya dan olahraga	Meningkatkan aktivitas pemuda dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pembinaan		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Organisasi kepemudaan yang menyelenggarakan kegiatan tahunan	-	20 %	Pendidikan	Disdikpora
			Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Cabang olah raga yang berprestasi di tingkat provinsi	4 cabang	5 cabang	Pendidikan	Disdikpora
			Program peningkatan upaya	Usaha baru yang dimulai oleh pemuda	3 Buah	6 Buah	Pendidikan	Disdikpora

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
		seni, budaya dan olahraga	penumbuhan kewirausahaan&kecakapan hidup pemuda	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba remaja	Kasus penyalahgunaan narkoba remaja	13 Kasus	2 Kasus	Pendidikan Disdikpora
				Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Fasilitas olah raga sepak bola dan bola volly per kecamatan	20 Unit	20 Unit	Pendidikan Disdikpora
				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terpeliharaanya kekayaan budaya	-	60 %	Perhubungan Dishubparbudkomin
				Program Pengembangan Nilai Budaya	meningkatkan kecintaan akan nilai budaya	-	65 %	Perhubungan Dishubparbudkomin

Tabel 7.2. Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan

Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
Terwujudnya pemerintahan yang bermartabat, baik, bersih, dan amanah serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, dengan mengedepankan kenyamanan kerja, disiplin kerja, kualitas kerja dan profesionalisme	Mewujudkan peran otonomi pemerintah tingkat kecamatan, mukim dan kampung sesuai dengan azas desentralisasi	Merumuskan kebijakan tatakelola untuk penguatan sistem kelembagaan yang demokratis, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, kooperatif dan kesetaraan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja (LAKIP) dan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Ada	Ada	Otda	Setda (Bagian Organisasi)
				Indeks Kepuasan Pelayanan Aparatur	-	0,85		
				Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Penurunan jumlah kesalahan pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan	-	100,00	Otda
			Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	-	100,00	Otda	Bagian Humas Setdakab

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
masyarakat								
		Meningkatkan peran camat dan kepala mukim/kampong dalam melayani masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks kinerja aparatur pelayan publik	-	0,85	Lintas SKPD	Setda, Dinkes, Satpol PP &WH, DPKKD BKPP, MPU dan MAA
			Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Angka partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	-	90,00	Lintas SKPD	Badan Pemberdayaan Masyarakat
			Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Efektifitas pengelolaan Pemerintahan Desa	-	85,00	Lintas SKPD	Badan Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
Penguatan perencanaan berbasis data		Program Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Program Pengawasan dan	Indeks kinerja aparatur pelayan publik	-	0,85	Otda	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 10 Kecamatan
			Pengendalian Perizinan	Indeks Kepuasan Pelayanan Aparatur	-	0,85		
			Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Persentase Tersedianya Dokumen/informasi jalan dan jembatan	-	90,00	Lintas SKPD	Bappeda, DBMCK
			Program Pengembangan data/informasi	Persentase capaian dokumen perencanaan berbasis data	-	100,00	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Program perencanaan pembangunan data kependudukan daerah	Tingkat validitas data kependudukan Bener Meriah	-	85,00	Kependudukan	Dinas Kependudukan

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersedianya data PLKB, kependudukan dan Keluarga Berencana	-	90,00	Pemberdayaan Perempuan	BPPKBPA
			Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase ketersediaan data/informasi pembangunan daerah Bener Meriah	-	95,00	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Angka kepuasan pelayanan informasi	-	80,00	Perhubungan	Dishubpar budkomin
		Peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan	Persentase pertumbuhan PAD dari Insentif Pajak dan Retribusi	-	45,00	Otda	DPKKD BM

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
			Keuangan Daerah	Daerah Menurut UU No.28 Tahun 2009, Biaya Pungut PBB	-	95,00	Otda	Setda
			Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase audit SKPK/Unit yang berkualifikasi baik	-	80,00	Otda	DPKKD BM
Mewujudkan pemerintahan yang bersih melalui penguatan sistem evaluasi berbasis kinerja	Mewujudnya tatakelola birokrasi yang mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat	Mewujudkan tatakelola birokrasi yang optimal dalam pelayanan publik melalui pelayanan	Program peningkatan disiplin aparatur	Angka keberhasilan pengelolaan keuangan desa	-	85,00	Otda	BKPP

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
		terpadu yang didukung teknologi		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat validitas data kependudukan Bener Meriah	- 85,00	Kependudukan	Dinas Kependudukan
			Sistem pelayanan paperless administrasi dan perizinan terintegrasi	Angka efektifitas pelayanan kepada masyarakat	- 80,00	Otda	Bappeda/Disdukcapil	
		Menerapkan kebijakan pengembangan karir aparatur melalui pelatihan dan pencapaian prestasi	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terlaksananya Program Pelatihan dan Pendidikan Formal	15,00	15,00	Otda	Setda
			Program Pendidikan Kedinasan	Persentase Aparatur yang mengikuti Diklat PIM	- 15,00	Otda	BKPP	

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
			Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase penyelesaian Qanun dari yang diusulkan	-	98,00	Otda	Sekretariat DPRK
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jumlah peningkatan SDM dibidang pemeriksaan dan pengawasan	-	75,00	Otda	Inspektorat, BKPP
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase permasalahan masyarakat yang menjadi prioritas dalam prolega	-	50,00	Otda	Sekretariat DPRK

Tabel 7.3. Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan

Misi 3: Mengembangkan tata kelola pertanian yang terpadu

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
Meningkatnya kualitas petani	Penguatan kelembagaan petani	Meningkatkan peran koperasi	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif	47%	85%	Koperasi	Diskop & UKM
			Program pengembangan kader koperasi	Jumlah Anggota koperasi	21.872 Org	40.464 Org	Koperasi	Diskop & UKM
		Menumbuh kembangkan konsep agroindustri dan agribisnis	Program pengembangan informasi sentra bisnis	Tersedianya pusat informasi sentra bisnis	-	1 Unit	Perdagangan	Diskop & UKM
	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani	Meningkatkan kualitas SDM petani	Program pengembangan sentra bisnis dan UMKM	Jumlah sentra bisnis	3 Buah	10 Buah	Lintas SKPD	Diskop & UKM
			Jumlah UMKM	180 unit	540 Unit			
			Program pengembangan SDM Petani	Pendapatan per kapita Penduduk	442 Rb/bula n	711 Rb/bula n	Lintas SKPD	Bappeluh
				Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor	3,12 %	5,62 %		

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
Optimalisasi peran pemerintah	Meningkatkan kinerja tim penyuluhan pertanian secara intensif		Program peningkatan ketahanan pangan pertanian dan perkebunan	Pertanian				
				PDRB per kapita	15,88 (Juta Rp)	20,88 (Juta Rp)		
			Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan	Balita Gizi Kurang Tingkat konsumsi protein (minimal 53 gram/hari)	3,51 %	0	Lintas SKPD	Setda, Distan TPH
					-	53,00		
			Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Penyuluhan yang memiliki sertifikasi	-	93,00	Pertanian	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura
				Panjang jalan Km	921,43 Km	1.300 Km	PU	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Persentase Jembatan Berkondisi Baik	-	100%	PU	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya
				Persentase jalan Berkondisi Baik	73,75 %	100 %	PU	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya
			Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%)	93,10 %	100 %	PU	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya
				Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik (%)	99,57 %	100 %	Energi	Disperindag, BPM
				Proporsi RT Tanpa Sanitasi Layak (%)	36,35 %	100 %	PU	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya
				Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%)	37,08 %	100%	PU	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
	Peningkatan kemitraaan dengan pihak swasta dan perbankan	Meningkatkan penyertaan modal	Program pengembangan kemitraaan kelompok tani dan swasta	Jumlah kontrak Rasio Pinjaman terhadap simpanan	-	60,00 1	Lintas SKPD	Distan TPH
Meningkatnya produktivitas dan kontinuitas hasil pertanian	Perbaikan manajemen pengelolaan pertanian	Mengembangkan penataan ruang pola tanam berdasarkan peta zonasi produk unggulan	Program sosialisasi peta zonasi produk unggulan Bener Meriah	Tersedianya peta zonasi produk unggulan Pendapatan perkapita	- 442 n	1,00 711 rb/bula n	Lintas SKPD	Distan TPH
			Program penataan dan penerapan ruang pola tanam	Jumlah UMKM Jumlah investor (PMDN)	180 unit 2,00	540 Unit 6,00	Lintas SKPD	Distan TPH
			Program pengembangan perencanaan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan	Jumlah investor (PMA)	2,00	4,00		
				Program pengembangan perencanaan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Pertanian	3,12 5,62	Lintas SKPD	Setda

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
Peningkatan produktivitas hasil pertanian	Mengoptimalkan penggunaan lahan tidur/kritis	Program pemanfaatan lahan tidur/kritis	Persentase lahan tidur/kritis	6,99 %	1%	Lintas SKPD	Distan TPH, Disbunhut	
	Revitalisasi produk unggulan	Program revitalisasi perkebunan kopi berbasis oleh masyarakat	Persentase Kebun kopi Terlantar	5,86 %	1%	Lintas SKPD	Distan TPH, Disbunhut	
	Memperkuat penggunaan teknologi pasca panen	Program pelatihan dan sosialisasi teknologi pengolahan hasil pertanian	Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Pertanian (%)	3,12	5,62	Pertanian	Distan TPH	
			Pertumbuhan ekonomi pada subsektor industri pengolahan (%)	10,47	12,97			

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
Peningkatan produk pertanian organik		Mengembangkan produk pertanian organik	Program sosialisasi peningkatan produktivitas pertanian organik	Pendapatan per kapita	442 rb/bln	711 rb/bln	Lintas SKPD	Distan TPH
				Persentase petani bersertifikat organik	-	50,00		
Pengembangan tanaman hias (ornamental)		Mengembangkan desa bunga	Pengembangan desa bunga	Berdirinya outlet pemasaran produk organik	-	5,00	Pertanian	Distan TPH, Bappeluh
				Pendapatan per kapita petani	-			
				Jumlah petani bunga	-	25,00		
				Jumlah outlet penjualan bunga segar	-	5,00		

Tabel 7.4. Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan**Misi 4: Mengembangkan aktivitas sektor agroindustri**

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
Meningkatnya aktivitas industri berbasis pertanian, perkebunan dan kehutanan	Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui regulasi investasi yang jelas	Mempermudah dan memperlancar mobilitas barang dan jasa	Program Peningkatan Pengembangan barang dan jasa Ekspor	Nilai ekspor bersih perdagangan	-	n/a	Perdagangan	Disperindag
				Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	9.92	11,95		
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Menurunnya penggunaan alat UTTP yang tidak sesuai dengan ketentuan metrologi legal	-	50,00	Perdagangan	Disperindag

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
			Program Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Pemahaman konsumen terhadap bahan makanan yang kadaluarsa dan membahayakan (%)	-	50,00	Perdagangan	Disperindag
	Menciptakan peluang usaha melalui regulasi yang pro growth		Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial	Tersedianya informasi Data IKM terupdate (%)	-	60,00	Lintas SKPD	Disperindag
			Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah UMKM	180 unit	540 Unit	Lintas SKPD	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM	180 unit	540 Unit	Lintas SKPD	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM	180 unit	540 Unit	Lintas SKPD	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	47%	85%	Koperasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Modernisasi industri	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya SDM pengusaha IKM (%)	-	50,00	Disperind ag	Disperind ag
			Program Peningkatan IPTEK Sistem Produksi	Wadah penampungan aspirasi pengrajin (%)	-	50,00	Lintas SKPD	Disperind ag

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
Meningkatnya nilai tambah hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan	Melakukan diversifikasi produk pertanian dan perkebunan olahan yang berdaya saing tinggi berbasis UMKM	Menumbuh kembangkan industri skala UMKM untuk pengolahan hasil pertanian dan perkebunan	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pembinaan keterkaitan produksi industri berbasis UMKM (%)	-	50,00	Disperind ag	Disperind ag
		Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah dan standar mutu produk pertanian dan perkebunan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan kualitas produksi, persentase peningkatan kesejahteraan petani dan persentase meningkatnya pendapatan petani (%)	-	15,00	Lintas SKPD	Dishutbun

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Luas lahan terehabilitasi tanaman kopi tua/rusak (Ha)	-	625,00	Dishutbun	Dishutbun
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Penurunan angka pengangguran	3,00	2,74	Disnakertrans	Disnakertrans
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Penurunan angka pengangguran	3,00	2,74	Disnakertrans	Disnakertrans
	Meningkatkan penetrasi sumber daya alam daerah ke pasar internasional	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Tersedianya pupuk organik (%)	-	5,00	Perdagangan	Disperindag	

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggu ng Jawab
					Awal	Akhir		
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Tersedianya benih komoditi unggulan	-	15,00	Investasi	Disperind ag

Tabel 7.5. Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan

Misi 5: Meningkatkan akses dan jaringan perdagangan global

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
Meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis keunggulan lokal	Membangun kerjasama perdagangan lokal, regional dan internasional	Meningkatkan peran pemerintah dalam memperluas akses pemasaran	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah fasilitas pemasaran untuk ternak	-	4,00	Peternakan	Disnakan
			Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	jumlah pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	-	4,00	Perdagangan	Disperindag
				Tersedianya jaringan informasi perdagangan yang baik	-	5,00		
				Tersedianya sistem perdagangan daerah	-	1,00		

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
			Program Pengembangan Hubungan Industrial	Penurunan angka pengangguran	3,00	2,74	Tenaga kerja	Disnakertrans
			Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Pendapatan regional per kapita	9,37	15,39	Perdagangan	Disperindag
				Pertumbuhan PDRB (Harga Konstan Sektor Perdagangan)	9,92	10,00		
			Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor bersih	-	-	Perdagangan	Disperindag
Memfasilitasi industri untuk mendapatkan akses pemasaran			Program penataan struktur industri	% Peningkatan nilai PDRB (Harga Konstan Sektor Industri)	5,11	7,91	Perindustrian	Disperindag

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
		Menciptakan kemudahan investasi dan menyederhanakan proses birokrasi perdagangan	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase mendapat informasi jaringan pasar baik lokal maupun nasional	-	60,00	Perdagangan	Disnakan
Meningkatkan aktivitas perdagangan	Membuka unit-unit usaha daerah bidang perdagangan		Program pengembangan industri kecil dan menengah	Angka kemiskinan Peningkatan nilai PDRB	26,25 5,11	21,85 7,91	Perindustrian	Disperindag
			Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Angka partisipasi tenaga kerja	78,31	88,21		
			Program Penciptaan Iklim usaha kecil menengah	Nilai ekspor bersih	-	-	Perdagangan	Disperindag
			Program Pendapatan per kapita penduduk bener meriah	4,11	7,11	Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
yang kondusif								
		Mempermudah dan memperlancar mobilitas barang dan jasa	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Persentase penyebarluasan informasi kepada pelaku usaha	-	75,00	Perdagangan	Disperindag
			Program Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Barang yang illegal	-	4,00	Perdagangan	Disperindag
		Memfasilitasi perdagangan sektor riil dan jasa masyarakat	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase bantuan modal kerja bagi pedagang ekonomi lemah	-	60,00	Perdagangan	Disperindag
			Pengembangan sistem resi gudang	Jumlah barang yang tersimpan pada gudang	-	42,00	Pertanian	Distan TPH
			Program peningkatan akses dan efisiensi perdagangan	%PDRB perdagangan	-	0,20	Perdagangan	Disperindag

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
		dalam negeri						
	Menggairahkan iklim perdagangan		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase pembinaan para pedagang kaki lima	-	65,00	Perdagangan	Disperindag

Tabel 7.6. Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan**Misi 6: Mengembangkan kemandirian dan usaha pemanfaatan sumber daya energi**

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
Termanfaatkan nya sumberdaya energi terbarukan secara optimal	Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan energi PLTMH sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan	Merumuskan kebijakan keterlibatan Pemda dalam pengembangan PLTMH	Pengembangan PLTMH, baik secara sendiri maupun melalui kerjasama dg pihak swasta	Jumlah PLTMH Terbangun	-	6,00	Disperind ag	Disperind ag
		Merumuskan kebijakan untuk perlindungan catchment area untuk keberlanjutan ketersediaan energi PLTMH	Perlindungan Kawasan Hutan yang berfungsi sebagai catchment area	Luas cathment area	85,80	85,80	Dishutbun	Dishutbun
		Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan	Peningkatan SDM pengelolaan	Jumlah ekspert/teknisi bidang PLTMH	-	10,00	Disperind ag	Disperind ag

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab	
					Awal	Akhir			
		PLTMH	PLTMH						
		Optimalisasi peran Perusahaan daerah dalam pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan energi terbarukan secara komersil	Memperbesar peran Perusahaan daerah dlm mengembangkan energi terbarukan secara komersil	Jumlah PLTMH, PLTM, PLTA, PLT Panas Bumi (Geotermal), PLT Biomassa yang telah terbarukan dimanfaatkan secara komersil	-	6,00	Disperind ag	Disperind ag	
		Mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan investor dalam pengembangan dan	Mempromosikan potensi energi terbarukan	Promosi potensi energi terbarukan BM	Pertumbuhan PDRB Sektor Kelistrikan	13,33	19,00	Disperind ag	Disperind ag

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
pengelolaan energi listrik geothermal, PLTM, PLTA, PLTS dan biomassa	Mempermudah investasi bidang energi melalui pembuatan regulasi terkait	Penerbitan regulasi investasi bidang energi terbarukan	Jumlah regulasi sektor energi terbarukan yang diterbitkan	-	1,00	Disperind ag, Setda (Bagian Hukum), Kantor penelitian	Disperind ag, Setda (Bagian Hukum), Kantor penelitian	,
	Mendirikan Lembaga Penjamin (risk taker di bawah Pemda) bidang energi	Pendirian Lembaga Penjamin sektor energi	Jumlah pembiayaan/investasi untuk proyek pengembangan, pemanfaatan,	-	25 Milyar	Kantor Penelitian	Kantor Penelitian	, pengembangan dan penanaman modal, DPRK

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
				atau distribusi energi			an modal	an modal
	Melakukan pendekatan yang intensif kepada pihak perbankan untuk mendapatkan pembiayaan, melalui hasil studi kelayakan yang handal	Pendekatan/kerjasama dengan bank-bank untuk pengembangan energi terbarukan	Jumlah pembiayaan/investasi untuk proyek pengembangan, pemanfaatan, atau distribusi energi	-	25,00	Kantor Penelitian, pengembangan dan penanaman modal	Kantor Penelitian, pengembangan dan penanaman modal	
Memenuhi kebutuhan energi listrik dan energi konvensional lainnya	Meningkatkan penggunaan energi terbarukan mulai dari tingkat kampong/desa	Peningkatan penggunaan energi terbarukan oleh masyarakat	Rasio elektrifikasi berdasarkan rumah tangga	91,44	100,00	Disperindag	Disperindag	
	Merumuskan kebijakan untuk mengoptimalkan infrastruktur	Penerbitan Regulasi Infrastruktur Pendukung	Regulasi Sektor energi yang diterbitkan	-	-	BMCK	BMCK	

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggu ng Jawab
					Awal	Akhir		
		pendukung ketersediaan dan distribusi energi	Ketersediaan dan Distribusi Energi					
		Menyediakan fasilitator energi sehingga seluruh aspek energi dapat dipahami dengan baik oleh seluruh masyarakat	Penyediaan fasilitator energi	Persentase masyarakat yang mendukung pengembangan energi terbarukan	-	100,00	Disperind ag	Disperind ag
		Merumuskan kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca	Pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Jumlah penurunan Gas Rumah Kaca yang diekuivalensikan dengan jumlah pemakaian energi terbarukan oleh seluruh elemen	-	-	Disperind ag, BLHKP2K	Disperind ag, BLHKP2K

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
masyarakat BM								
			Program rehabilitasi hutan dan lahan	Luas hutan lindung yang direhabilitasi	44,70	69,7	Disbunhut	Disbunhut
masyarakat BM								
			Program penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas kawasan hijau kota	9,90	15	Lingkungan hidup	Badan lingkungan hidup, kebersihan pertamanan dan Pemadam Kebakaran
masyarakat BM								
			Program Pengendalian Lingkungan Hidup	Regulasi sektor lingkungan Hidup yang diterbitkan	-	-	Lingkungan hidup	Badan lingkungan hidup, kebersihan pertamanan

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggu ng Jawab
					Awal	Akhir		
							an dan Pemadam Kebakara n	

Catatan: dtt = data tidak tersedia

Tabel 7.7. Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan**Misi 7: Mengembangkan pemeliharaan dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan**

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
Terjaganya fungsi hutan lindung	Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya fungsi hutan	Meningkatkan kecintaan masyarakat kepada hutan	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Luas hutan lindung yang direhabilitasi	44,70	69,70	Lingkungan Hidup	Dishutbun
			Program penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas kawasan hijau kota	9,90	15,00	Lintas SKPD	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran
			Program Pengendalian Lingkungan Hidup	Regulasi sektor lingkungan Hidup yang diterbitkan	-	-	Lintas SKPD	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan,

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
			Pelaksanaan AMDAL dan UKL	-	100,00	Lintas SKPD	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran	Pertamanan dan Pemadam Kebakaran
		Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bencana	Program penyuluhan pemahaman terhadap bencana	Pemukiman baru di daerah beresiko bencana	-	-	Lintas SKPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program Tanggap Darurat	Rehabilitasi dan Rekontruksi daerah bencana alam	-	100,00	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya	

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
		Meningkatkan peran lembaga adat masyarakat dalam konservasi hutan	Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan	0,24	2,74	Lintas SKPD	Dishutbun
				Jumlah lembaga adat yang terlibat dalam konservasi hutan	-	5,00		
	Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar fungsi hutan	Meningkatkan pemahaman terhadap UU perlindungan hutan	Program sosialisasi hukum dan peraturan perlindungan hutan	Pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan	0,24	2,74	Lintas SKPD	Dishutbun
			Peningkatan koordinasi perlindungan hutan	Tersedianya forum koordinasi	-	3,00	Kehutanan	Dishutbun
		Meningkatkan kerjasama	Program monitoring dan	Pembalakan liar yang	-	100,00	Kehutanan	Dishutbun

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
					Awal	Akhir		
		dengan instansi vertikal terkait dalam penegakan hukum perlindungan hutan	supervisi bersama perlindungan hutan	diselesaikan secara hukum				
Termanfaatkan nya potensi hutan produksi	Peningkatan produktivitas hasil hutan	Mengoptimalka n penggunaan lahan kritis	Program revitalisasi lahan kritis	Pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan	0,24	2,74	Lintas SKPD	Dishutbun
		Mengembangka n industri pengolahan hasil kehutanan	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan	0,24	2,74	Lintas SKPD	Dishutbun
	Peningkatan pemanfaatan hasil hutan non kayu	Mengembangka n potensi hutan non kayu untuk wisata	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan non kayu	Pertumbuhan PAD	2,99	15	Lintas SKPD , Dishubpar budintel	Dishutbun , Dishubpar budintel

Catatan: dtt = data tidak tersedia

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan kemudian disusun program program pembangunan. Pelaksanaan program dilaksanakan oleh SKPK yang mempunyai tanggung jawab kewenangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan.

Program program yang disusun tersebut merupakan program prioritas pembangunan yang berhubungan urusan pemerintah dengan SKPK terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPK.

Masing masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya, sehingga hasil pembangunan akan terukur perkembangannya sampai akhir periode RPJMD.

Penyusunan indikator kinerja program berupa hasil (*out comes*) sebagian merupakan indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk urusan-urusan yang telah diatur dengan peraturan menteri sesuai dengan bidang urusannya. Indikator SPM yang belum menjadi indikator sasaran maupun indikator program, akan dicantumkan pada dokumen Perencanaan Strategik (Renstra) SKPK menjadi indikator kegiatan. Indikator kinerja program menjadi acuan utama dalam menyusun kegiatan prioritas yang dilakukan SKPK.

Pencapaian target indikator kinerja program disusun secara rinci untuk setiap tahunnya dan disertai dengan kerangka pendanaan yang merupakan pagu indikatif untuk masing masing program. Untuk program yang karena pencapaiannya dilaksanakan oleh beberapa SKPK/lintas SKPK maka pencapaian target hasil dan kerangka pendanaan didistribusi kepada SKPK terkait.

Uraian program Program Pembangunan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017 sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 8.1

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Rencana Pendanaan

Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 – 2017

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Urusan Wajib Pendidikan																
Program Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun				20, 213		22, 234		24, 457		26, 903		29,5 93		123,4 00	Disdikpora/MPD	
	APS SD/MI/SDLB/Paket A	100 %	100	-	100		100		100		100		100			
	APS SMP/MTs /SMPLB/Paket B	87,25 %	90		90		100		100		100		100			
	APS SMA/MA/SMK/S MALB/Paket C	78,23 %	80		80		86		88		90		90			
	Rata-rata nilai UN SD	7,60	7,62		7,65		7,68		7,71		7,74		7,74		Disdikpora	
	Rata-rata nilai UN	7,66	7,71		7,78		7,85		7,92		7,99		7,99			

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	SMP															
	Rata-rata nilai UN MTS	7,58	7,70		7,76		7,82		7,88		7,94		7,94			
	Rata-rata lama sekolah	8,77 Thn	9	-	9,3		9,6		9,9		10,2		10,2		Disdikpora	
Program Pendidikan Anak Usia Dini				743		891		1,0 69		1,2 83		1,54 0		5,526	Disdikpora	
	APK PAUD	32 %	36		42		48		54		60		60			
	PAUD Negeri terpadu di kecamatan	1 Unit	2		4		6		8		10		10			
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				100		540		644		773		907		2.964	Disdikpora/Setda kab/BKPP	
	Angka melanjutkan S1 yang mendapatkan Bea Siswa PEMDA	0 Org	10		10		10		10		10		50			

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	Sekolah yang menerapkan MBS	%	55		50		60		70		80		90			
Program Pendidikan Atas				-		4,200		4,242		4,284		4,327		17,053	Disdikpora	
	Rata-rata nilai UN SMA	7,95	7,97		8,01		8,05		8,09		8,13		8,125		Disdikpora	
	Rata-rata nilai UN MA	7,65	7,73		7,75		7,77		7,79		7,81		7,81			
	Rata-rata nilai UN SMK	7,44	7,50		7,52		7,54		7,56		7,58		7,58			
Program Pendidikan Non Formal				-		600		660		726		799		2.785	Disdikpora	
	Angka pengangguran	5,19 %	5		4,5		4		3		2		2			
	Pendapatan perkapita	442 Rb/Bulan	551		591		631		671		711		711			
Program Pendidikan Luar Biasa				-		500		550		605		666		2.321	Disdikpora	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	Rata-rata lama sekolah	8,77 Thn	9		9,3		9,6		9,9		10,2		10,2			
	Persentase Masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus mendapatkan pendidikan	-	10		40		60		70		80		80			
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga Kependidikan				1,3 55		1,4 90		1,6 39		1,8 03		1,98 4		8,271	Disdikpora	
	Angka melek huruf dewasa	98,50 %	98,70		98,90		99,10		99,30		99,55		99,80			
	Angka pengangguran	5,19 %	5	-	4,5		4		3		2		2		Disdikpora	
	Angka pengangguran	5,19 %	5	-	4,5		4		3		2		2		Disdikpora	
Program Manajemen Pelayanan				100		120		144		173		207		744	Disdikpora	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Pendidikan																
		%	55	100	50	120	60	144	70	173	80	207	90	744		
		%	70	-	75	570	80	570	85	570	90	570	90	2,280	Disdikpora	
Program Pembinaan Pendidikan keagamaan bagi anak usia dini					-		170		160		160		160	650	Dikjar	
	Kemampuan anak lulus PAUD membaca Iq'ra 2 dan Do'a-do'a pendek	%	40		45		50		60		70		70			
Kesehatan																
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana	Rumah Sakit tipe C	Tipe D	20 %	5,462	40%	6,555	60%	7,866	80%	9,439	100%	11,326	Tipe C	40,648	RSUD Kab Bener Meriah	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
rumah sakit umum daerah																
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas/pustakawan dan jaringannya	Rasio puskesmas perawatan per 100.000 penduduk	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Dinas Kesehatan	
	Peningkatan rasio pustu per 100.000 penduduk	6,4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Dinas Kesehatan	
	Peningkatan rasio polindes per 100.000 penduduk	92,80 %	100	110	125	135	148,8	148,8	148,8	148,8	148,8	148,8	148,8	148,8		
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			1.6 69	1,8 36	1,8 91	1,9 48	2,00 6	2,00 6	Dinas Kesehatan							
	Cakupan ketersediaan obat, dan alat kesehatan untuk	%	50	60	70	80	90	90	90	90	90	90	90	90		

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	pelayanan kesehatan dasar di puskesmas															
	Cakupan imunisasi Desa/kelurahan (Universal Child Immunization=UCI)	81,12 %	82		86		89		92		95		95			
	Ibu Hamil Mendapat Tablet Fe3	74,88 %	76		78		80		83		85		85			
	Cakupan imunisasi campak bayi	86,84 %	88,80		89,80		90,80		91,80		92,80		92,8			
Program peningkatan SDM RSUD-BM				-		2.200		2.640		3,168		3,802		11,810	RSUD Kab Bener Meriah	
	Persentase tenaga medis yang bekerja ditempat yang	%	40	-	50		60		70		80		80			

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	sesuai dengan kompetensinya (mis: BTCLS, APN,ICU,OK,MTB)															
	Jumlah dokter umum rumah sakit type C (9 org)	7 Org	7		7		8		8		9		9			
	Jumlah dokter gigi rumah sakit type C (2 org)	2 Org	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah dokter spesialis rumah sakit type C (12 org)	3 Org	5		5		6		8		10		12			
	Jumlah perawat rumah sakit type C	57 Org	57		60		63		66		70		70			
	Jumlah bidan rumah sakit type C	55 Org	55		55		55		55		55		55			

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita				32		35		36		38		40		181	Dinas Kesehatan	
	Cakupan kunjungan bayi (KN = Kunjungan Neonatus)	81,39 %	82		83		85		87		90		90			
	Cakupan imunisasi campak	86,84 %	88,80		89,80		90,80		91,80		92,80		92,8			
	Cakupan imunisasi Desa/kelurahan (Universal Child Immunization=UCI)	81,12 %	82		86		89		92		95		95			
	Balita mendapatkan Vitamin A	94,96 %	95		95,5		96		97		98		99			

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	Prevalence balita gizi kurang - gizi buruk	3,51 %	3,50		3		2,50		2		1,50		1,50			
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin				42		46	-	51	-	56	-	62	-	257	Dinas Kesehatan	
	Prevalence cacingan menurun	%	-		-											
		%														
Program Perencanaan Pengembangan Bidang Kesehatan	Terselenggaranya kegiatan pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan	%	80	-	80	120	80	132	80	137	80	143	80	532	Dinas Kesehatan	
Program Perbaikan Gizi Masyarakat				205		225		248		273		300		1,251	Dinas Kesehatan	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	Prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang)	3,51 %	3,3		3,0		2,5		2		1,5		1,5			
	Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	100 %	100		100		100		100		100		100			
	cakupan balita ditimbang berat badannya	57,63 %	63		70		78		85		92		92			
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				157		178		201		227		257		1,020	Dinas Kesehatan	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	60		65		70		75		80		80			
	Persentase Layanan Kesehatan sesuai SPM	%	60		65		70		75		80		80			

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	Tersedianya data surveillance secara reguler untuk semua layanan kesehatan	%	80		90		100		100		100		100			
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan				99		109		114		118		123		563	Dinas Kesehatan	
	Persentase Sarana dan Tenaga Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang bersertifikasi sehat dan halal	%	20		30		40		50		60		60			
	Persentase Sarana dan Tenaga Pengolahan Air Minum Isi Ulang yang bersertifikasi	%	3		40		50		60		70		70			

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	sehat dan halal															
	Persentase Restoran/Rumah Makan/Warung Kopi yang bersertifikasi sehat dan halal	%	30		40		50		60		70		70			
Program Upaya Kesehatan Masyarakat				247		271		280		288		297		1,383	Dinas Kesehatan	
	Umur harapan hidup	67,63 Tahun	67,7		67,8		67,9		68		68,1		68,1			
	Persentase Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	6,03 %	10		15		20		25		30		30			
	Cakupan penduduk miskin yang	38,6 %	50		65		80		90		100		100			

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	mendapatkan pelayanan kesehatan															
	Persentase Masyarakat yang mendapatkan layanan kesehatan haji	100 %	100		100		100		100		100		100			
	Persentase Masyarakat yang mendapatkan layanan kesehatan CATIN (Calon Pengantin)	%	80		85		90		95		100		100			
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Percentase kualitas hidup Lansia yang baik (Quality Of Life = QoL)	%	65	108	70	122	75	137	80	153	85	171	85	691	Dinas Kesehatan	
Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan				402		442		451		460		469		2,224	Dinas Kesehatan	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Masyarakat																
	Persentase Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	6,03 %	10		15		20		25		30		30			
	Persentase Desa Siaga Aktif	12,6 %	20		25		35		45		55		55			
	Angka K-1	96 %	96		97		98		99		100		100			
	Angka K-4	90,93 %	91		92		93		94		95		95			
	Prevalence balita gizi kurang - gizi buruk	3,51 %	3,50		3,00		2,50		2,00		1,50		1,50			
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				500		550		555		561		566		2,732	Dinas Kesehatan	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan	17,64 %	20		25		30		32		36		36			
	Persentase keberhasilan pengobatan pada kasus baru TB Paru (BTA positif)	%	65		70		75		80		85		85			
	Angka kasus positif Malaria (<1 per 1.000 penduduk)	4,41	4		3		2		1		1		1			
	Cakupan imunisasi Desa/kelurahan (Universal Child Immunization=UCI)	81,12 %	82		86		89		92		95		95			
	Angka Penemuan kasus baru KUSTA (per 100.000	1	0,75		0,70		0,60		0,50		0,50		0,50			

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	penduduk)															
	Jumlah kasus gigitan hewan penular rabies yang ditangani sesuai standar	58 Kasus	50		40		30		25		20		20			
	Prevalensi kasus HIV	%	< 0,5		< 0,6		< 0,7		< 0,8		< 0,9		< 0,9			
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular				-		60		45		50		60		215	Dinas Kesehatan	
	Penurunan Prevalensi Penyakit Jantung Pembuluh Darah	22,31 %	22		21		20		19		18		18			
	Penurunan Prevalensi penyakit Diabetes	10,3 %	10,3		10,1		9,8		9,6		9,4		9,4			

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Program Pengembangan Lingkungan Sehat				123		138		142		146		151		700	Dinas Kesehatan	
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum sehat	91,2 %	92		94		96		98		100		100			
	Persentase Rumah Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih	46,17 %	48		50		55		62		70		70			
	Persentase rumah tangga yang memiliki jamban sehat	55,81 %	60		65		70		75		80		80			
Program Pendidikan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan				-		650		650		650		650		2,600	Dinas Kesehatan	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	Peningkatan rasio dokter umum per 100.000 penduduk	37,58	39		42		45		48		52		52			
	Peningkatan rasio perawat per 100.000 penduduk	90,45	92		94		96		98		100		100			
	Peningkatan rasio bidan per 100.000 penduduk	76	80		82		85		88		90		90			
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak				124		136		149		164		181		754	Dinas Kesehatan	
	Angka Kematian ibu	7 Kasus	7		6		5		4		3		3			
	Rasio Angka kematian bayi (AKB) Per 1000 KH	16,40	14		12		10		8		7		7			

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerj a Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	Rasio Angka kematian bayi dan Balita (AKABA) per 1000 KH	20,3	16		12		8		4		1		1			
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	98,73 %	98,8		98,82		98,85		98,88		99		99			
	Rasio posyandu per 100 balita	1,64	1,80		1,85		1,90		1,95		2		2			
	Angka K-1	96 %	96		97		98		99		100		100			
	Angka K-4	90,93 %	91		92		93		94		95		95			
Pekerjaan Umum																
Program pembangunan infrastruktur perdesaan				62, 368		90. 764		94. 751		98. 827		103. 193		449.8 41	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya	
	infrastruktur perdesaan	%	40		43		46		48		50		50			
	Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4	93,10 %	94,48		95,86		97,24		98,62		100		100			

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik	99,57 %	99,6		99,7		99,8		99,9		100		100			
	Proporsi Rumah Tangga dengan Air minum Layak	37,08 %	49,66		62,25		74,83		87,42		100		100			
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan				21, 297		23, 426		25, 769		28, 346		31,1 80	-	130,0 08	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya	
	Panjang Jalan	921,4 3 km	1.050		1.100		1.170		1.220		1.300		1.300			
	Jumlah jembatan															
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan				268		295		325		357		393	-	1,638	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya	
	Persentase Jalan Berkondisi baik	73,75 %	79		84,25		89,50		94,75		100		100			
	Persentase jembatan Berkondisi Baik	Unit	65		70		80		90		100		100			
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air				2.2 29		2.4 52		2.6 97		2.9 66		3,26 3		10.34 4	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerj a Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Baku																
	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum sehat	91,20 %	92		94		96		98		100		100			
	PDRB sektor Air Minum & Listrik	0,79	1		1,5		2		2,25		2,5		2,5			
	PAD	13,01 Milyar	17,5		20,13		23,13		26,62		30,61		30,61			
Program pembangunan Infrastruktur Daerah				421		463		509		560		616		2.569		
	Indeks kinerja aparatur pelayan publik	0,1	0,20		0,40		0,70		0,80		0,85		0,85			
	Pertumbuhan ekonomi	5,1%			5,3		5,5		6,5		7,0		7,0			
Penataan Ruang																

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan				-		200		220		242		266		928	Bappeda, DBMCK	
	Persentase Tersedianya Dokumen/informasi database jalan dan jembatan	-%	20		35		65		80		90		90			
Program Perencanaan dan pengendalian Tata Ruang, dan tata guna lahan	Persentase pengunaan tepat sasaran	%	20		35	500	65	510	80	520	90	530	90		Bappeda	
Perencanaan Pembangunan																
Program Perencanaan, pengendalian Pembangunan						2.3 90		2.6. 29		2.8 91		3.18 1		11.09 1	Bappeda	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Daerah																
	Persentase capaian dokumen perencanaan berbasis data	%	30		50		75		85		100		100			
Program Pengembangan data/informasi				1.300		1.400		1.500		1.600		1.700		7.500	Bappeda/dishubp arkominfo	
	Persentase capaian dokumen perencanaan berbasis data	%	30		50		75		85		100		100			
	Persentase ketersediaan data/informasi pembangunan daerah Bener Meriah	%	30		50		70		80		95		95			
Sistem pelayanan paperless administrasi dan	Angka efektifitas pelayanan kepada masyarakat	%	10	-	25	2.550	40	2.805	65	3.086	80	3.394	80	11.835	Bappeda/Disdukcapil/KTPSP	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
perizinan terintegrasi																
Perhubungan															-	
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Angka kepuasan pelayanan kualitas informasi	%	15	-	30	85	45	120	60	134	80	145	80	484	Dinas Perhubungan	
Program peningkatan sarana dan prasarana perhubungan				1.00		1.200		1.300		1.400		1.500		6.400	Dinas Perhubungan	
	Jumlah kecelakaan lalulintas	15	14		13		12		11		10		10			
	Jumlah Pelanggaran Lalulintas	1.436	1.336		1.236		1.136		1.036		936		936			
	PAD	13,01 Milyar	17,5		20,13		23,13		26,62		30,61		30,61			
Lingkungan Hidup																
Program penataan dan				535		588		647		712		783		3.265	BLHKP2k	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)																
	Peningkatan kawasan hijau kota	9,90 %	10		12		15		15		15		15			
Program Pengadaan dan Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup		%		365		-		376		-		387	-	1.128	BLHKP2k	
Kependudukan dan Catatan Sipil																
Program perencanaan pembangunan data kependudukan daerah	Tingkat validitas data kependudukan Bener Meriah	%	20	-	35	850	45	-	75	884	85	-	85	1.734	Dinas Kependudukan	
Program Penataan	Tingkat validitas data	%	20	745	35	819	45	901	75	991	85	1.090	85	4.546	Dinas Kependudukan	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Administrasi Kependudukan	kependudukan Bener Meriah															
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Turunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	111 Kasus	104	174	95	186	80	191	70	197	50	203	50	951	BPPKBPA	
	Menurunnya Angka Rumah Tangga Miskin (RTM)	%	25		22		17		13		10		10			
Program Peningkatkan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Terpenuhinya Kuota Perempuan dilegeslatif	4 %	5	-	8	600	12	660	18	726	20	799	20	2.785	BPPKBPA	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	Terpenuhinya Kuota Perempuan Eksekutif	1,75 %	1,75		3,50		5,26		7,02		8,77		8,77			
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Turunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	111 Kasus	104	174	95	186	80	191	70	197	50	203	50	951	BPPKBPA	
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera																
Program Keluarga Berencana				915		1.373		1.386		1.400		1.414		6.488	BPPKBPA	
	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	%	50		54		58		62		66		66			
	Angka Kematian Ibu	Jumlah	7		6		5		4		3		3			
Sosial																

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Menurunnya Angka PMKS	%	45	210	42	221	38	232	34	243	30	255	30	1.160	Dinas Sosial	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya					63		725		797		877		965	3.427	Dinas Sosial	
	Pendapatan per kapita	1.985 (Thn 2011)	2.14		2.28		2.42		2.56		2.70		2.70			
	Angka kemiskinan	26,30 %	23,72		21,22		18,72		16,22		13,75		13,75			
Program Pemberdayaan				285		1.3 13		1.3 44		1.3 79		1.41 7		5.738	Dinas Sosial	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial																
	Menurunnya jumlah masyarakat dibawah garis kemiskinan	32.160 Jiwa	30.000	28.000	25.000	22.000	20.000	20.000								
	Realisasi Respon Terhadap Bencana	-	20	40	50	55	60	60								
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persen penyandang cacat yang bekerja secara mandiri	47,76 %	50	162	60	166	70	169	80	173	90	176	90	846	Dinas Sosial	
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Menurunnya jumlah jompo terlantar	192 jiwa	170	565	150	1.094	130	1.610	80	1.616	20	1.623	20	6.508	Dinas Sosial	
Program Pemberdayaan				236		1.755		1.775		1.797		1.821		7.384	BPBD, Dinas Bina Marga	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam penanggulangan bencana alam	Rekonstruksi daerah bencana alam	%	64		73		82		91		100		100		dan Cipta Karya, dinsos	
Ketenagakerjaan																
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pendapatan perkapita	442 Rb/Bulan	85	551	92	631	99	671	107	711	116	-	499		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																
Program pengembangan kader koperasi	Jumlah Anggota koperasi	21.872 Org	25.590	-	29.309		33.027		36.746		40.464		10	40.464	Diskop & UKM	
Program pengembangan															Diskop & UKM, Disperindag	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
informasi sentra bisnis	Tersedianya pusat informasi sentra bisnis	- Unit	-	-	1		1		1		1		1			
Program pengembangan sentra bisnis dan UMKM				0		120		130		140		151		541	Diskop & UKM, Disperindag	
	Jumlah sentra bisnis	3 Unit	3		4		6		8		10		10			
	Jumlah UKM	180 Unit	252		324		396		468		540		540			
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif		-	-	-	-	200	-	220	-	242	-	266	-	928	Diskop & UKM, Disperindag	
	Jumlah sentra bisnis	3 Unit	3		4		6		8		10		10			
	Jumlah UKM	180 Unit	252		324		396		468		540		540			
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil			-	290	-	319	-	351	-	386	-	425	-	1.771	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	Jumlah sentra bisnis	3 Unit	3		4		6		8		10		10			
	Jumlah UKM	180 Unit	252		324		396		468		540		540			

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Menengah																
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			-	-	-	120	-	130	-	140	-	152	-	542	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	Jumlah sentra bisnis	3 Unit	3		4		6		8		10		10			
	Jumlah UKM	180 Unit	252		324		396		468		540		540			
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			-	-	-	230	-	248	-	268	-	290	-	1.036	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	Persentase koperasi aktif	47 %	65	-	70		75		80		85		85			
Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif				290		305		320		336		352		1.602	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	Pendapatan per kapita	442 Rb/Bulan	551		591		631		671		711		711			
Penanaman Modal																

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Program Pendirian Lembaga Penjamin sektor energi	Jumlah pembiayaan/investasi untuk proyek pengembangan, pemanfaatan, atau distribusi energi	Rupiah	25 M	-	25 M	50	25 M	55	25 M	50	25 M	50	25 Milyar	330	Kantor Penelitian, pengembangan dan penanaman modal	
Program Pendekatan/ kerjasama dengan perbankan untuk pengembangan energi terbarukan	Jumlah bank yang terlibat dalam pendanaan proyek pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan	Miliar	2	25	2	25	2	25	2	25	2	25	2	125	Kantor Penelitian, pengembangan dan penanaman modal	
Kebudayaan													-			
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terpeliharanya kekayaan budaya	%	20	101	30	111	40	118	50	125	60	132	60	587	Dishubparkomintel	
Program Pengembangan	meningkatkan kecintaan akan	%	25	240	35	264	45	277	55	291	65	305	65	1.377	Dishubparkomintel	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Nilai Budaya	nilai budaya															
Kepemudaan dan Olah Raga																
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Organisasi kepemudaan yang menyelenggarakan kegiatan tahunan	Organisasi	20,00	0	20,00	230	20,00	230	20,00	230	20,00	230	20,00	690	Disdikpora	
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Cabang olah raga yang berprestasi di tingkat provinsi	Buah	2,00	-	3,00	430	4,00	460	5,00	469	5,00	479	5,00	1.838	Disdikpora	
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Usaha baru yang dimulai oleh pemuda	Buah	3,00	-	4,00	70	5,00	77	6,00	60	6,00	65	6,00	272	Disdikpora	
Program upaya pencegahan penyalahgunaan	Kasus penyalahgunaan narkoba remaja	13 Kasus	10	-	8	50	6	55	4	60	2	65	2	230	Disdikpora	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
narkoba																
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Fasilitas olah raga sepak bola dan bola volly per kecamatan	Buah	20	1.2 10	20	968	20	774	20	620	20	496	20	4.068	Disdikpora	
Ketertiban Umum, Ketrentaman Masyarakat, Kesbang, dan Politik Dalam Negeri																
Program Pengembangan wawasan Kebangsaan						350		400		450		460			Kesbangpol,sekda kab	
	Jumlah konflik sosial	-	0		0		0		0		0		0			
Program Peningkatan						300		330		363		420				

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Pemberantasan penyakit Masyarakat (PEKAT)																
	Angka Kriminalitas	111	100		90		80		70		60		<50			
Otda, Pemrnthn Umum, Adm Keu Daerah, Perangkat Daerah, Keppeg, & Persandian																
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						200		200		200		200		800	Sekretariat Daerah/DPKD/inspektorat	
	Evaluasi capaian kinerja dan keuangan	-	-	-		WTP		WTP		WTP		WTP				

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan (LAKIP)	Kegiatan	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
Program Penyemarakan Syariat Islam	Jumlah pelaksanaan perayaan hari-hari besar Islam di kecamatan	%	100	1.782	100	1.918	100	2.025	100	2.139	100	2.260	100	10.124	Sekretariat Daerah (Kabag KESRA) dan Dinas Syariat Islam	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				421		463		509		560		616		2.569	Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Satpol PP &WH, DPKKD, BKPP, MPU dan MAA,BPM	
	Indeks kinerja aparatur pelayan publik	0,1	0,20		0,40		0,70		0,80		0,85		0,85			
	Persentase aparatur yang memiliki	-%	10		15		20		35		40		40			

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	sertifikasi															
	Persentase penyelesaian Qanun dari yang diusulkan	%	40,00	-	55,00	2.350	65,00	2.468	85,00	2.591	98,00	2.720	98,00	10.129		
	Efektifitas pengelolaan Pemerintahan Desa	%	25,00	60	40,00	66	65,00	73	80,00	80	85,00	88	85,00	367		
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	20,00	151	40,00	164	60,00	177	80,00	191	100	206	100	889	Bagian Humas Setdakab	
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase audit SKPK/Unit yang berkualifikasi baik	%	25,00	518	40,00	570	60,00	627	80,00	689	95,00	758	95	3.162	Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, DPKKD, Inspektorat	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Program Penataan Peraturan Perundang- undangan	Persentase permasalahan masyarakat yang menjadi prioritas dalam prolega	%	10,00	694	20,00	749	30,00	809	40,00	874	50,00	944	50,00	4.070	Sekretariat DPRK	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pertumbuhan PAD dari Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Menurut UU No.28 Tahun 2009, Biaya Pungut PBB	%	15,00	2.466	25,00	2.639	35,00	2.823	40,00	3.021	45,00	3.233	45,00	14.182	DPKKD BM	
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Angka keberhasilan pengelolaan keuangan desa	%	10,00	217	30,00	239	40,00	262	60,00	289	80,00	318	80,00	1.325	DPKKD BM	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Penurunan jumlah kesalahan pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan	%	20,00	556	40,00	594	60,00	612	80,00	631	100	650	100	3.043	Inspektorat	
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				723		744		767		790		814		3.837	Inspektorat	
	Persentase jumlah peningkatan SDM dibidang pemeriksaan dan pengawasan	%	20,00		35,00		50,00		65,00		75,00		75,00			
	Rasio PNS terhadap jumlah penduduk			382		200		220		240		260		1.302	BKPP	
	Rasio PNS terhadap jumlah	1 : 30	1 : 30		1 : 35		1 : 40		1 : 45		1 : 50		1 : 50			

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	penduduk															
	Persentase jumlah peningkatan SDM PNS	%	60		70		80		90		90		90			
Program peningkatan disiplin aparatur	Indeks kinerja aparatur pelayan publik	%	20,00	-	35,00	500	45,00	550	75,00	605	85,00	666	85,00	2.321	BKPP,Setdakab	
Program Pendidikan Kedinasan	Persentase Aparatur yang mengikuti Diklat PIM	%	5,00	-	7,00	100	9,00	120	12,00	144	15,00	173	15,00	537	BKPP	
Program Perencanaan Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Regulasi kabupaten terkait penerapan syariat Islam	Kegiatan	1	-	1	120	1	125	1	130	1	135	1	510	Dinas Syariat Islam	
Program peningkatan sumber daya teknis pelaksana dan pengawas	Kasus pelanggaran syariat yang selesai ditangani	0,94 %	5	-	10	540	15	562	20	584	25	607	25	2.293	Dinas Syariat Islam	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Syariat Islam																
Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama				-		520		541		562		585		2.208	Dinas Syariat Islam,	
	Jumlah pelanggaran Qanun Syariat	102 Kasus	90		75		60		45		30		30			
	Angka baca dan tulis Al Quran anak muslim lulus SD	%	20		40		60		80		100		100			
Program Pembinaan dan Pemberdayaan Petugas Keagamaan untuk meningkatkan kualitas pengamalan				6,4 24		7,0 66		7,0 80		7,0 94		7,10 8		34,77 2	Dinas Syariat Islam	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
agama masyarakat																
	Mesjid/menasah yang aktif melaksanakan pengajian setelah magrib	%	20		40		60		80		100		100			
	Desa yang memiliki Majelis Taklim aktif	%	20		40		60		80		100		100			
	Shalat berjemaah di mesjid/Menasah lima waktu	%	20		40		60		80		100		100			
Program Penelitian dan pengembangan pelaksanaan syariat Islam	kajian yang dijadikan acuan kebijakan pada tahun berikutnya	%	100	-	100	120	100	124	100	127	100	131	100	502	Dinas Syariat Islam,	
Program Peningkatan kualitas pemahaman	Jumlah Pelanggaran Qanun Syariat	102 Kasus	90	-	75	20	60	10	45	10	30	10	30	50	Dinas Syariat Islam,	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
dan pengamatan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama																
Program Sinergisasi Pelaksanaan Syariat Islam antar Pemangku Kepentingan dalam Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah	Jumlah Pelanggaran Qanun Syariat	102 Kasus	90	-	75	10	60	3	45	3	30	3	30	19	Dinas Syariat Islam,	
Program Penyuluhan Agama Islam dan Sosialisasi Qanun Syariat Islam	Jumlah frekuensi publikasi tentang syariat islam di media cetak dan elektronik	Jumlah	-	-	472	540	472	500	472	500	472	500	472	2,040	Dinas Syariat Islam	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Program Pengawasan dan Pengendalian Perizinan				638		689		744		803		868		3,742	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 10 Kecamatan	
	Indeks kinerja aparatur pelayan publik	%	50		60		70		80		85		85			
	Indeks Kepuasan Pelayanan Aparatur		0,20		0,40		0,70		0,80		0,85		0,85			
Program peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama				-		530		500		500		500		2,030	Baitul Mal	
	Jumlah muzakki yang membayar zakat mal	%	20		25		30		40		50		50			
	Angka Kemiskinan	26,22 %	23,72		21,22		18,72		16,22		13,72		13,72			

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Program Sertifikasi, Penata Usahaan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Agama	Ketepatan Pengelolaan Alokasi Harta Agama	%	70	-	75	30	80	25	90	25	100	25	100	105	Baitul Mal	
Program Penyemarakan Syariat Islam	Jumlah pelaksanaan perayaan hari-hari besar Islam di kecamatan	%	100	541	100	557	100	574	100	591	100	609	100	2,872	Sekretariat Daerah (Kabag KESRA)	
Program Peningkatan Kapasitas Tokoh Adat	Pelaksanaan adat gayo dalam kehidupan sosial kemasyarakatan	%	30	0	35	70	40	77	50	85	60	93	60	325	MAG	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Program Perencanaan Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Regulasi kabupaten terkait penerapan syariat Islam	Kegiatan	1	-	1	120	1	125	1	130	1	135	1	510	Dinas Syariat Islam	
Program peningkatan sumber daya teknis pelaksana dan pengawas Syariat Islam	Kasus pelanggaran syariat yang selesai ditangani	0,94 %	5	-	10	540	15	562	20	584	25	607	25	2.293	Dinas Syariat Islam	
Program penyuluhan pemahaman beresiko bencana	Pemukiman baru di daerah beresiko bencana	%	-	-	100	200	100	250	100	300	100	350	100	1,100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Ketahanan Pangan																
Program peningkatan ketahanan pangan pertanian dan				1,5 91		1,7 18		1,8 56		2,0 04		2,16 4		9,333	Sekretariat Daerah Distan TPH	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
perkebunan																
	Balita Gizi buruk	3,51 %	2,81		2,12		1,40		0,70		0		0			
	Tingkat konsumsi protein (minimal 53 gram/hari)	Gram/hari	53,00		53,00		53,00		53,00		53,00		53,00			
Program pengembangan SDM Petani				326		359		395		434		478		1,992	Bappeluh	
	Pendapatan per kapita	442 Rb/Bulan	551		591		631		671		711		711	442 Rb/Bulan		
	Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Pertanian	3,12 %	3,62		4,12		4,62		5,12		5,62		5,62			
	PDRB per kapita	15,88 %	16,88		16,88		18,88		19,88		20,88		20,88			
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Program Peningkatan Kualitas, Akses dan Sanitasi Rumah Ibadah	Jumlah rumah ibadah yang memiliki kualitas, akses dan sanitasi yang baik	%	20	-	40	250	60	255	80	260	100	265	100	1,030	BPM	
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Angka partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	0,10 %	30,00	32	45,00	36	60,00	39	75,00	43	90,00	47	90,00	197	Badan Pemberdayaan Masyarakat	
Kearsipan																
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				-		540		594		653		719		2,506	Arsip/ perpustakaan	
	Angka melek huruf dewasa	98,50 %	98,70		98,90		99,10		99,30		99,55		99,80			

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Komunikasi dan Informatika																
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Angka kepuasan pelayanan kualitas informasi	%	15,00	-	30,00	100	45,00	108	60,00	117	80,00	126	80,00	451	Dinas Perhubungan	
Urusan Pilihan															-	
Pertanian															-	
Program pengembangan perencanaan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan							220		231		243		255		949	Bappeda, Sekretariat Daerah
	Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Pertanian	3,12 %	3,62	-	4,12		4,62		5,12		5,62		5,62			
Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan						100		100		100		100		400		
	Penyuluhan yang memiliki sertifikasi	%		-	33,00		53,00		73,00		93,00		93,00			Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerj a Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Program pengembangan kemitraan kelompok tani dan swasta					30		33		36,3		39,93		139,25			
	Jumlah kontrak		20,00	-	30,00		40,00		50,00		60,00		60,00		Distan TPH	
	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan		0		0		1		1		1		1			
Program sosialisasi peta zonasi produk unggulan Bener Meriah			-		250		275		302,5		332,75		1,160,25		Distan TPH	
	Jenis Komoditi Unggulan	1 buah	1		2		3		4		5		5			
	Pendapatan Perkapita	442 Rb/Bulan	551		591		631		671		711		711			
Program penataan dan penerapan ruang pola tanam			-		500		500		500		500		2,000		Distan TPH	
	Pendapatan Perkapita	442 Rb/Bulan	551		591		631		671		711		711			
Program pemanfaatan			-		200		220		242		266		928		Distan TPH	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
lahan tidur/kritis	Persentase lahan tidur/kritis	6,99 %	5,79		4,59		3,40		2,2		1		1			
Program revitalisasi perkebunan kopi berbasis masyarakat							2.0 00		2.0 00		2.00 0					
	Persentase lahan kopi terlantar	5,86 %	4,89	-	3,92		2,94		1,97		1		1	8.000	Disbunhut, Distan TPH	
Program pelatihan dan sosialisasi teknologi pengolahan hasil pertanian				-		150		165		181 ,5		199, 65		696,1 5	Distan TPH	
	Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Pertanian	3,12 %	3,62		4,12		4,62		5,12		5,62		5,62			
	Pertumbuhan ekonomi pada subsektor industri pengolahan	10,47	10,97		11,47		11,97		12,47		12,97		12,97			
Program sosialisasi peningkatan produktivitas pertanian organik				200		200		200		200		200		1.000	Distan TPH	
	Pendapatan Perkapita	442 Rb/Bulan	551		591		631		671		711		711			
	Persentase petani	%	10,00		20,00		30,00		40,00		50,00		50,00			

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	bersertifikat organik	Kegiatan													Distan TPH, Disperindag, Diskop&UKM	
	Berdirinya outlet pemasaran produk organik		1,00		2,00		3,00		4,00		5,00		5,00			
Pengembangan sistem resi gudang				-		240		264		290 ,4		319, 44		1.113 ,84		
	Rasio jaminan simpanan terhadap Pinjaman di Resi Gudang	Ton/Rp	30,00		33,00		36,00		39,00		42,00		42,00			
	Jumlah Kreditur pada Resi gudang	Kreditur	-		8		16		24		32		32			
Kehutanan																
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				-		450		486		525		567		2.628	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
	Pendapatan Perkapita	442 Rb/Bulan	551		591		631		671		711		711			

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				1.201		1.369		1.561		1.779		2.028		7.938	Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Distan TPH, Bapeluh	
	Produksi Kopi	21.404,05 Ton	26.186,54		30.968,85		35.751,24		40.533,64		45.316,04		45.316,04			
	Produksi Beras	10.445,96 Ton	11.142		11.606,62		12.767,28		13.927,94		15.088,60		15.088,60			
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Persentase Tersedianya pupuk organik	%	3,00	-	3,50	230	4,00	276	4,50	331	5,00	397	5,00	1.234	Disperindag	
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				-		112		115		119		122	-	469	Disperindag	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase tersedianya Benih Komoditi Unggulan	%	10,00	36	10,00	44	10,00	52	13,00	63	15,00	75	15,00	270	Kantor Penelitian Pengembangan dan penanaman modal	
Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan				99		107		116		125		135		582	Dishutbun	
	Pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan	0,24%	0,74		1,24		1,74		2,24		2,74		2,74			
	Jumlah lembaga adat yang terlibat dalam konservasi hutan	Lembaga	1,00		2,00		3,00		4,00		5,00		5,00			
Program sosialisasi hukum dan peraturan perlindungan hutan	Pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan	0,24 %	0,74	-	1,24	50	1,74	-	2,24	60	2,74	-	2,74	110	Dishutbun	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Program revitalisasi lahan kritis	Pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan	0,24 %	0,74	-	1,24	500	1,74	550	2,24	605	2,74	666	2,74	2.321	Dishutbun	
Progam Peningkatan koordinasi perlindungan hutan	Tersedianya forum koordinasi	Kegiatan	3,00	-	3,00	50	3,00	50	3,00	50	3,00	50	3,00	200	Dishutbun	
Program monitoring dan supervisi bersama perlindungan hutan				-		100		-		100		100		300	Dishutbun	
	Adanya evaluasi	Kegiatan	1,00	-	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
	Pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan	0,24 %	0,74		1,24		1,74		2,24		2,74		2,74			

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan	0,24 %	0,74	-	1,24	600	1,74	600	2,24	600	2,74	600	2,74	2.400	Dishutbun	
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan non kayu	Pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan	0,24 %	0,74	-	1,24	250	1,74	-	2,24	300	2,74	-	2,74	550	Dishutbun	
Program rehabilitasi hutan dan lahan	Luas hutan lindung yang direhabilitasi	44,70 %	49,70	1.5 10	54,70	1.5 40	59,70	1.5 71	64,70	1.6 03	69,70	1.63 5	69,70	7.859	Dishutbun	
Perlindungan Kawasan Hutan yang berfungsi sebagai catchment area	Luas cathment area	85,80 Ha	85,80	-	85,80	200	85,80	220	85,80	240	85,80	260	85,80	920	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
Energi dan Sumberdaya Mineral																

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Program Pengembangan PLTMH, baik secara sendiri maupun melalui kerjasama dg pihak swasta	Jumlah PLTMH Terbangun	Unit	2,00	-	3,00	500	4,00	700	5,00	800	6,00	900	6,00	2.900	Disperindag	
Program Penyediaan/ peningkatan infrastruktur pendukung ketersediaan dan distribusi energi	Volume/kualitas infrastruktur pendukung ketersediaan dan distribusi energi	dtt	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00		BMCK dan Disperindag	
Program Pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Jumlah penurunan Gas Rumah Kaca yang diekuivalensikan dengan jumlah pemakaian energi terbarukan oleh seluruh elemen	dtt												-	Disperindag, BLHKP2K	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	masyarakat BM															
Pariwisata																
Program Promosi pariwisata daerah																
	Jumlah wisatawan domistik															
	Jumlah wisatawan asing															
Program pengembangan destinasi pariwisata					350		450		550		650					
	Jumlah wisatawan domistik	-														
	Jumlah wisatawan asing	-														
Pengembangan desa bunga		%-		100		100		100		100		100		-	500	
	Pendapatan per kapita	442 Rb/Bulan	551		591		631		671		711		711			
	Jumlah petani	Org	5,00		10,00		15,00		20,00		25,00		25,00			

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	bunga														dan Distan TPH	
	Jumlah outlet penjualan bunga segar	Unit	1,00		2,00		3,00		4,00		5,00		5,00			
Kelautan dan Perikanan																
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah fasilitas pemasaran untuk ternak dan hasil produksi tenak	Unit	3,00	-	3,00	220	4,00	220	4,00	820	4,00	620	4,00	1.880	Disternakan	
Perdagangan																
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor bersih perdagangan	%	-	36	-	40	-	44	-	48	-	53	-	220	Dinas Perindutrian Perdagangan	
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9.92 %	9,95		10,45		10,95		11,45		11,95		11,95			
Program Perlindungan Konsumen dan	Menurunnya Penggunaan Alat UTPP Yang Tidak	%	20,00	30	30,00	31	38,00	33	46,00	35	50,00	37	50,00	166	Dinas Perindutrian Perdagangan	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Pengamanan Perdagangan	Sesuai Dengan Ketentuan Metrologi Legal															
Program Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Persentase pemahaman Konsumen Dari Bahan Makanan Yang Kadaluarsa dan Membahayakan	%	10,00	18	15,00	22	30,00	26	40,00	31	50,00	37	50,00	134	Dinas Perindutri Perdagangan	
Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial	Persentase ketersedianya Informasi Data IKM Ter-update	%	8,00	55	14,00	59	30,00	60	45,00	65	60,00	67	60,00	306	Dinas Perindutri Perdagangan	
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase meningkatnya SDM Pengusaha IKM	%	20,00	100	25,00	104	30,00	36	40,00	200	50,00	250	50,00	690	Dinas Perindutri Perdagangan	
Program Peningkatan IPTEK Sistem	Persentase Wadah Penampungan	%	20,00	800	25,00	400	30,00	250	40,00	200	50,00	100	50,00	1.750	Dinas Perindutri Perdagangan	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Produksi	Aspirasi Pengrajin															
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri berbasis UMKM	%	20,00	278	25,00	309	30,00	473	40,00	273	50,00	225	50,00	1.558	Dinas Perindutrian Perdagangan	
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	jumlah Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Lembaga	3,00	7.225	3,00	7.297	4,00	7.370	4,00	7.444	4,00	7.519	4,00	36.856	Disperindag	
	Tersedianya jaringan informasi perdagangan yang baik	Unit	1,00		2,00		3,00		5,00		5,00		5,00			
	Tersedianya sistem perdagangan daerah	Buah	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
Program Peningkatan Kerjasama	Pendapatan regional per kapita	9,37 %	11,31	-	12,53	180	13,67	187	14,64	195	15,39	202	15,39	764	Disperindag	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Perdagangan Internasional																
	Pertumbuhan PDRB	2,80 %	2,90		3,10		3,30		3,50		3,70		3,70			
Program penataan struktur industri	Peningkatan nilai PDRB	5,11 %	5,91	241	6,51	250	7,21	260	7,51	271	7,51	282	7,51	1.303	Disperindag	
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase mendapat Informasi Jaringan Pasar Baik Lokal Maupun Nasional	%	20,00	-	30,00	677	40,00	705	50,00	661	60,00	782	60,00	2.825	Disternakan	
Program pengembangan industri kecil dan menengah	Angka kemiskinan	%	24,35	259	23,95	265	23,35	270	22,65	275	21,85	281	21,85	1.350	Disperindag	
	Peningkatan nilai PDRB	5,11 %	2,90		3,10		3,30		3,50		3,70		3,70			
	Angka Partisipasi Tenaga Kerja	%	80,41		82,21		84,51		86,41		88,21		88,21			
Program peningkatan	Nilai ekspor bersih	%		36		53		80		120		180	-	469	Disperindag	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
dan pengembangan ekspor																
Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Peningkatan nilai tambah produk bener meriah	2,89 %	4,49	30	6,79	34	9,09	39	11,39	45	13,69	52	13,69	199	Disperindag	
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Percentase Penyebarluasan Informasi Kepada Pelaku Usaha	%	15,00	-	30,00	25	45,00	25	60,00	21	75,00	20	75,00	91	Disperindag	
Program Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Barang yang illegal	%	23,00	17	20,00	21	12,00	25	8,00	30	4,00	36	4,00	129	Disperindag	
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Percentase Bantuan Modal Kerja bagi Pedagang Ekonomi Lemah	%	10,00	-	20,00	1.878	30,00	2.131	45,00	2.329	60,00	2.284	60,00	8.623	Disperindag	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Program peningkatan akses dan efisiensi perdagangan dalam negeri	%PDRB perdagangan	0,09 %	0,10	1.0 00	0,15	1.0 00	0,20	1.0 00	0,20	1.0 00	0,20	1.00 0	0,20	5.000	Dinas Perindutrian Perdagangan	
Program Pembinaan Pembinaan Para Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase Pembinaan Para Pedagang Kaki Lima	%	10,00	-	25,00	90	35,00	100	50,00	110	65,00	120	65,00	420	Disperindag	
Peningkatan SDM pengelolaan PLTMH	Jumlah ekspert/teknisi bidang PLTMH	Org	2,00	-	4,00	20	6,00	20	8,00	20	10,00	20	10,00	80	Disperindag	
Memperbesar peran Perusahaan daerah dlm mengembangkan energi terbarukan secara komersil	Jumlah PLTMH, PLTM, PLTA, PLT Panas Bumi (Geothermal), PLT Biomassa yang telah dimanfaatkan secara komersil	Unit	2,00	-	3,00	200	4,00	220	5,00	240	6,00	260	6,00	920	Disperindag	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Promosi potensi energi terbarukan BM	Lokakarya, seminar, deseminasi, majalah atau leaflet tentang potensi dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Kegiatan	1,00	-	2,00	20	2,00	30	2,00	40	2,00	50	2,00	140	Disperindag	
Program Penerbitan regulasi investasi bidang energi terbarukan	Jumlah regulasi sektor energi terbarukan yang diterbitkan	Jumlah	-	-	1,00	35	-	-	-	-	1,00	45	1,00	80	Disperindag, Sekretariat Daerah (Bagian Hukum), Kantor penelitian, pengembangan dan penanaman modal, DPRK	
Program Peningkatan penggunaan energi terbarukan oleh masyarakat	Rasio elektrifikasi berdasarkan rumah tangga	91,44 %	92,00	-	94,00	125	96,00	175	98,00	200	100	225	100	725	Disperindag	

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Program Penyediaan fasilitator energi	Persentase masyarakat yang mendukung pengembangan energi terbarukan	%	20,00	-	40,00	25	60,00	25	80,00	25	100	25	100	100	Disperindag	
Industri																
Program Pengembangan Hubungan Industrial	Penurunan angka pengangguran	3,00 %	2,96	80	2,90	85	2,85	90	2,78	96	2,74	102	2,74	453	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Transmigrasi																
Program Peningkatan Kesempatan Kerja		%		85		87		88		90		92	-	442	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD Kabupaten Bener Meriah 2012-2017 mencoba menselaraskan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan dengan kondisi saat ini dan target yang ingin dicapai di akhir periode lima tahun. Tolok ukur yang digunakan adalah data-data terkini yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya. Beberapa data yang disajikan mengacu kepada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Tetapi sebagian dari data yang disajikan disesuaikan dengan target yang ingin dicapai dengan basis lima tahun. Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat capaian dilakukan setiap tahun menggunakan mekanisme dan alat ukur yang sudah tersedia dan akan dikembangkan pada tahun 2013. RPJMD kali ini diharapkan menjadi tonggak awal reformasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja mengaitkan alokasi anggaran dengan hasil yang ingin dicapai. Hal ini untuk mendukung penerapan budaya kerja birokrasi yang berorientasi pada pengelolaan hasil kerja (results management) dan pengukuran kinerja (performance evaluation) untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

Indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017 mempunyai tujuan memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati pada akhir periode masa jabatan. Diantara seluruh indikator yang disajikan, terdiri atas tiga kategori utama, yaitu: Indikator dampak, indikator proksi (outcome) dan indikator output yang semuanya diharapkan dapat terukur dengan baik. Secara terbuka dapat disampaikan bahwa masih banyak indikator yang disajikan tidak memuat kondisi awal (*baseline*), hal ini disebabkan oleh data yang digunakan sebagai acuan belum tersedia sehingga target yang ingin dicapai pada tahun 2013 masih berupa taksiran minimal yang selanjutnya bisa digunakan sebagai pijakan untuk tahun berikutnya.

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Yang Berkualitas Dan Sejahtera Dilandaskan Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Allah SWT

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Akhir pada Akhir Periode RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Pelaksanaan syariat Islam yang kaffah								
1.1.	Penguatan koordinasi dan organisasi perangkat daerah pelaksana pembangunan syariat Islam								
1.1.1.	Regulasi kabupaten terkait penerapan syariat Islam	Jumlah	0	1	1	1	1	1	1
1.1.2.	Kasus pelanggaran syariat yang selesai ditangani	%	0.94	5	10	15	20	25	25
1.1.3.	Jumlah pelanggaran Qanun Syariat	Kasus	102	90	75	60	45	30	30
1.1.4.	Angka baca dan tulis Al Quran anak muslim lulus SD	%	DTT	20	40	60	80	100	100
1.1.5.	Mesjid/menasha yang aktif melaksanakan pengajian setelah magrib	%	DTT	20	40	60	80	100	100
1.1.6.	Desa yang memiliki Majelis Taklim aktif	%	77,12	80	85	90	100	100	100
1.1.7.	Shalat berjemaah di mesjid/Menasha lima waktu	%	DTT	20	40	60	80	100	100
1.1.8.	kajian yang dijadikan acuan kebijakan pada tahun berikutnya	%	DTT	100	100	100	100	100	100
1.1.9.	Jumlah muzakki yang membayar zakat mal	%	21,12	22,25	25	30	40	50	50
1.1.10	Angka Kemiskinan	%	26.30	23.72	21.22	18.72	16.22	13.72	13.72
.									
1.1.11	Ketepatan Pengelolaan Alokasi Harta Agama	%	DTT	70	75	80	90	100	100
.									
1.2.	Penanaman keimanan dan ketaqwaan melalui pendidikan								
1.2.1	Kemampuan anak lulus PAUD membaca Iq'ra 2 dan Do'a-do'a pendek	%	DTT	40	45	50	60	70	70
1.2.2	Jumlah rumah ibadah yang memiliki kualitas, akses dan sanitasi yang baik	%	DTT	20	40	60	80	100	100
.									
1.3.	Penguatan kualitas informasi keagamaan di masyarakat								
1.3.1.	Jumlah pelaksanaan perayaan hari-hari besar Islam di kecamatan	%	DTT	100	100	100	100	100	100
1.3.2.	Jumlah frekuensi publikasi tentang syariat islam di media cekak dan elektronik	Frekuensi	DTT	0.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00
1.3.3.	Pelaksanaan adat gayo dalam kehidupan sosial kemasyarakatan	%	DTT	30	35	40	50	60	60

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Akhir pada Akhir Periode RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
2.	Pendidikan & IPTEK								
2.1.	Perluasan dan pemerataan akses pendidikan formal dan non-formal setiap jenjang pendidikan								
2.1.1.	APS SD/MI/SDLB/Paket A	%	100	100	100	100	100	100	100
2.1.2.	APS SMP/MTs /SMPLB/Paket B	%	87.25	90	90	100	100	100	100
2.1.3.	APS SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	%	78.23	80	80	86	88	90	90
2.1.4.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8.77	9.00	9.30	9.60	9.90	10.20	10.20
2.1.5.	APK PAUD	%	32	36	42	48	54	60	60
2.1.6.	PAUD Negeri terpadu di kecamatan	Jumlah	1	2	4	6	8	10	10
2.1.7.	Angka melanjutkan S1 yang mendapatkan Bea Siswa PEMDA	Org	0	10	10	10	10	10	50
2.2.	Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan								
2.2.1.	APK PAUD	%	32	36	42	48	54	60	60
2.2.2.	PAUD Negeri terpadu di kecamatan	Jumlah	1	2	4	6	8	10	10
2.2.3.	Rata-rata nilai UN SD	Nilai	7.60	7.62	7.65	7.68	7.71	7.74	7.74
2.2.4.	Rata-rata nilai UN SMP	Nilai	7.66	7.71	7.78	7.85	7.92	7.99	7.99
2.2.5.	Rata-rata nilai UN MTS	Nilai	7.58	7.70	7.76	7.82	7.88	7.94	7.94
2.2.6.	Rata-rata nilai UN SMA	Nilai	7.95	7.97	8.01	8.05	8.09	8.13	8.13
2.2.7.	Rata-rata nilai UN MA	Nilai	7.65	7.73	7.75	7.77	7.79	7.81	7.81
2.2.8.	Rata-rata nilai UN SMK	Nilai	7.44	7.50	7.52	7.54	7.56	7.58	7.58
2.2.9.	Angka pengangguran	%	5,16	5	4,5	4	3	2	2
2.2.10	Angka melek huruf dewasa	%	98,50	98,70	98,90	99,10	99,30	99,55	99,80
2.3.	Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pelayanan pendidikan								
2.3.1	Peningkatan penerapan Sistem impormasi Sekolah	%	35	40	45	50	55	60	60
3.	Kesehatan								
3.1.	Peningkatan layanan kesehatan yang profesional, berkualitas, adil, merata dan terjangkau								
3.1.1	Rumah Sakit tipe C	%	tipe D	20	40	60	80	100	Tipe C
3.1.2	Rasio puskesmas perawatan per 100.000 penduduk	Rasio	4	4	5	6	7	8	8
3.1.3	Peningkatan rasio pustu per 100.000 penduduk	Rasio	6,4	7	8	9	10	11	11
3.1.4	Peningkatan rasio polindes per 100.000 penduduk	Rasio	92,80	100	110	125	135	148.80	148.80
3.1.5	Cakupan ketersediaan obat, dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	%	0.00	50	60	70	80	90	90

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Akhir pada Akhir Periode RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
3.1.6	Cakupan imunisasi Desa/kelurahan (Universal Child Immunization=UCI)	%	81,12	82	86	89	92	95	95
3.1.7	Ibu Hamil Mendapat Tablet Fe3	%	74,88	76	78	80	83	85	85
3.1.8	Cakupan imunisasi campak bayi	%	86,84	88,8	89,8	90,8	91,8	92,8	92,8
3.1.9	Angka Kematian Ibu	Jumlah	7	7	6	5	4	3	3
3.1.10	Peningkatan rasio dokter umum per 100.000 penduduk	Rasio	37,58	39	42	45	48	52	52
3.1.11	Peningkatan rasio perawat per 100.000 penduduk	Rasio	90,45	92	94	96	98	100	100
3.1.12	Peningkatan rasio bidan per 100.000 penduduk	Rasio	76	80	82	85	88	90	90
3.1.13	Angka Kematian ibu	Jumlah	7	7	6	5	4	3	3
3.1.14	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 KH	Rasio	16,4	14	12	10	8	7	7
3.1.15	Angka kematian Balita (AKABA) per 1000 KH	Rasio	20,3	16	12	8	4	1	1
3.1.16	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	%	98,73	98,8	98,8	98,85	98,88	99	99
3.1.17	Rasio posyandu per 100 balita	Rasio	1,64	1,80	1,85	1,90	1,95	2	2
3.1.18	Angka K-1	%	96	96	97	98	99	100	100
3.1.19	Angka K-4	%	90,93	91	92	93	94	95	95
3.1.20	persentase tenaga medis yang bekerja di tempat yang sesuai dengan kompetensinya (mis: BTCLS, APN,ICU,OK,MTB)	%	0,00	40	50	60	70	80	80
3.1.21	Jumlah dokter umum rumah sakit type C (9 org)	Org	7	7	7	7	8	9	9
3.1.22	Jumlah dokter gigi rumah sakit type C (2 org)	Org	2	2	2	2	2	2	2
3.1.23	Jumlah dokter spesialis rumah sakit type C (12 org)	Org	3	5	6	8	10	12	12
3.1.24	Jumlah perawat rumah sakit type C	Org	57	57	60	63	66	70	70
3.1.25	Jumlah bidan rumah sakit type C	Org	55	55	55	55	55	55	55
3.1.26	Cakupan kunjungan bayi (KN = Kunjungan Neonatus)	%	81,39	82	83	85	87	90	90
3.1.27	Balita mendapatkan Vitamin A	%	94,96	95	95,5	96	97	98	99
3.1.28	Prevalence balita gizi kurang - gizi buruk	%	3,51	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,50
3.1.29	Prevalence cacingan menurun	%	0	-	-	-	-	-	-
3.1.30	Terselenggaranya kegiatan pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan	%	0,00	80	80	80	80	80	80
3.1.31	Prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang)	%	3,51	3,3	3	2,5	2	1,5	1,5
3.1.32	Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Akhir pada Akhir Periode RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
3.1.33	cakupan balita ditimbang berat badannya	%	57,63	63	70	78	85	92	92
3.1.34	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	DTT	60	65	70	75	80	80
3.1.35	Persentase Layanan Kesehatan sesuai SPM	%	DTT	60	65	70	75	80	80
3.1.36	Tersedianya data surveillance secara reguler untuk semua layanan kesehatan	%	DTT	80	90	100	100	100	100
3.1.37	Persentase Sarana dan Tenaga Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang bersertifikasi sehat dan halal	%	DTT	20	30	40	50	60	60
3.1.38	Persentase Sarana dan Tenaga Pengolahan Air Minum Isi Ulang yang bersertifikasi sehat dan halal	%	DTT	30	40	50	60	70	70
3.1.39	Persentase Restoran/Rumah Makan/Warung Kopi yang bersertifikasi sehat dan halal	%	DTT	30	40	50	60	70	70
3.1.40	Umur harapan hidup	Thn	67,63 (Thn 2010)	67,7	67,8	67,9	68,00	68,1	68,1
3.1.41	Persentase Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	6,03	10	15	20	25	30	30
3.1.42	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	38,6	50	65	80	90	100	100
3.1.43	Persentase Masyarakat yang mendapatkan layanan kesehatan haji	%	100	100	100	100	100	100	100
3.1.44	Persentase Masyarakat yang mendapatkan layanan kesehatan CATIN (Calon Pengantin)	%	DTT	80	85	90	95	100	100
3.1.45	Persentase kualitas hidup Lansia yang baik (Quality Of Life = QoL)	%	DTT	65	70	75	80	85	85
3.2.	Peningkatan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan								
3.2.1	Persentase rumah tangga yang melaksanakan hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	6,03	10	15	20	25	30	30
3.2.2	Persentase Desa Siaga Aktif	%	12,6	20	25	35	45	55	55
3.2.3	Angka K-1	%	96	96	97	98	99	100	100
3.2.4	Angka K-4	%	90,93	91	92	93	94	95	95
3.2.5	Prevalence balita gizi kurang - gizi buruk	%	3,51	3,50	3	2,5	2	1,5	1,5
3.2.6	Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan	%	17,64	20	25	30	32	36	36
3.2.7	Persentase keberhasilan pengobatan pada kasus baru TB Paru (BTA positif)	%	DTT	65	70	75	80	85	85
3.2.8	Angka kasus positif Malaria (<1 per 1.000 penduduk)	Rasio	4,41	4	3	2	1	1	1

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Akhir pada Akhir Periode RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
3.2.9	Cakupan imunisasi Desa/kelurahan (Universal Child Immunization = UCI)	%	81.12	82	86	89	92	95	95
3.2.10	Angka Penemuan kasus baru KUSTA (per 100.000 penduduk)	Rasio	1	0,75	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5
3.2.11	Jumlah kasus gigitan hewan penular rabies yang ditangani sesuai standar	Kasus	58	50	40	30	25	20	20
3.2.12	Prevalensi kasus HIV	%	DTT	< 0,5	< 0,6	< 0,7	< 0,8	< 0,9	< 0,9
3.2.14	Penurunan Prevalensi Penyakit Jantung Pembuluh Darah	%	22,31	22	21	20	19	18	18
3.2.15	Penurunan Prevalensi penyakit Diabetes	%	10,3	10,3	10,1	9,8	9,6	9,4	9,4
3.2.16	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum sehat	%	91,2	92	94	96	98	100	100
3.2.17	Persentase Rumah Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih	%	46,17	48	50	55	62	70	70
3.2.18	Persentase rumah tangga yang memiliki jamban sehat	%	55,81	60	65	70	75	80	80
4.	Kesejahteraan Sosial								
4.1.	Peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak								
4.1.1	Turunnya angka PMKS	%	DTT	30	40	65	80	90	90
4.2.	Menurunkan jumlah kelompok masyarakat rawan kesejahteraan sosial								
4.1.1	Pendapatan per kapita petani	Rp. (Juta)	1.985 (Thn 2011)	2.14	2.28	2.42	2.56	2.70	2.70
4.2.2	Angka Kemiskinan	%	26.30	23.72	21.22	18.72	16.22	13.72	13.72
4.2.3	Menurunnya jumlah masyarakat dibawah garis kemiskinan	Jiwa	32.160	30.000	28.000	25.000	22.000	20.000	20.000
4.2.4	Realisasi Respon Terhadap Bencana		DTT	20	40	60	80	100	100
4.2.5	Persen penyandang cacat yang bekerja secara mandiri	%	47,76	50	60	70	80	90	90
4.2.6	Menurunnya jumlah jompo terlantar	Jiwa	192	170	150	130	80	20	20
4.3.	Peningkatan kapasitas pemuda dalam seni, budaya dan olahraga								
4.3.1	Organisasi kepemudaan yang menyelenggarakan kegiatan tahunan	Jumlah	DTT	20	20	20	20	20	20
4.3.2	Cabang olah raga yang berprestasi di tingkat provinsi	Cabang	4	4	4	5	5	5	5

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Akhir pada Akhir Periode RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
4.3.3	Usaha baru yang dimulai oleh pemuda	Jumlah	DTT	3	4	5	6	6	6
4.3.4	Kasus penyalahgunaan narkoba remaja	Jumlah	13	10	8	6	4	2	2
4.3.5	Fasilitas olah raga sepak bola dan bola volly per kecamatan	Jumlah	DTT	20	20	20	20	20	20
4.3.6	Terpeliharaanya kekayaan budaya	%	DTT	20	30	40	50	60	60
4.3.7	meningkatkan kecintaan akan nilai budaya	%	DTT	25	35	45	55	65	65

Tabel 9.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017**Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Akhir pada Akhir Periode RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan penguatan desentralisasi pelayanan								
1.1	Mewujudkan peran otonomi pemerintah tingkat kecamatan, mukim dan kampung sesuai dengan azas desentralisasi								
1.1.1	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan (LAKIP)	Jumlah	ada	1	1	1	1	1	1
1.1.2	Indeks Kepuasan Pelayanan Aparatur	%	DTT	5	15	20	30	40	50
1.1.3	Penurunan jumlah kesalahan pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan	%	DTT	20	40	60	80	100	100
1.1.4	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	DTT	20	40	60	80	100	100
1.1.5	Indeks kinerja aparatur pelayan publik	%	DTT	0.2	0.4	0.7	0.8	0.85	1
1.1.6	Angka partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	%	DTT	30	45	60	75	90	90
1.1.8	Efektifitas pengelolaan Pemerintahan Desa	%	DTT	25	40	65	80	85	85
1.1.9	Indeks kinerja aparatur pelayan publik	%	DTT	5	15	20	30	40	40
1.1.10	Indeks Kepuasan Pelayanan Aparatur		DTT	0.2	0.4	0.7	0.8	0.85	1
1.1.11	Persentase Tersedianya Dokumen/informasi database jalan dan jembatan	%	DTT	20	35	65	80	90	90
1.1.12	Persentase capaian dokumen perencanaan berbasis data	%	DTT	30	50	75	85	100	100
1.1.13	Tingkat validitas data kependudukan Bener Meriah	%	DTT	20	35	45	75	85	85
1.1.14	Tersedianya data PLKB, kependudukan dan Keluarga Berencana	%	DTT	30	40	65	80	90	90
1.1.15	Persentase ketersediaan data/informasi pembangunan daerah Bener Meriah	%	DTT	30	50	70	80	95	95
1.1.16	Angka kepuasan pelayanan informasi	%	DTT	15	30	45	60	80	80
1.1.17	Persentase pertumbuhan PAD dari Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Menurut UU No.28 Tahun 2009, Biaya Pungut PBB	%	DTT	15	25	35	40	45	45

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Akhir pada Akhir Periode RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
1.1.18	Persentase audit SKPK/Unit yang berkualifikasi baik	%	DTT	25	40	60	80	95	95
1.1.19	Angka keberhasilan pengelolaan keuangan desa	%	DTT	10	30	40	60	80	80
2.	Mewujudkan pemerintahan yang bersih melalui penguatan sistem evaluasi berbasis kinerja								
2.1	Mewujudnya tatakelola birokrasi yang mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat								
2.1.1	Indeks kinerja aparatur pelayan publik	%	DTT	20	35	45	75	85	85
2.1.2	Tingkat validitas data kependudukan Bener Meriah	%	DTT	20	35	45	75	85	85
2.1.3	Angka efektifitas pelayanan kepada masyarakat	%	DTT	10	25	40	65	80	80
2.1.4	Terlaksananya Program Pelatihan dan Pendidikan Formal	Org	15	15	20	15	15	15	15
2.1.5	Persentase Aparatur yang mengikuti Diklat PIM	%	DTT	5	7	9	12	15	15
2.1.6	Persentase penyelesaian Qanun dari yang diusulkan	%	DTT	40	55	65	85	98	98
2.1.7	Persentase jumlah peningkatan SDM dibidang pemeriksaan dan pengawasan	%	DTT	20	35	50	65	75	75
2.1.8	Persentase permasalahan masyarakat yang menjadi prioritas dalam prolega	%	DTT	10	20	30	40	50	50

Tabel 9.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017

Misi 3 : Mengembangkan tata kelola pertanian yang terpadu

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Akhir pada Akhir Periode RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani								
1.1	Penguatan kelembagaan petani								
1.1.1	Persentase koperasi aktif	%	47	65	70	75	80	85	85
1.1.2	Jumlah anggota koperasi	org	21.872	25.590	29.309	33.027	36.746	40.464	40.464
1.1.4	Jumlah sentra bisnis	Jumlah	3	3	4	6	8	10	10
1.1.5	Jumlah UMKM	Jumlah	180	252	324	396	468	540	540
1.1.6	Tersedianya Pusat Informasi Sentra bisnis	unit	-	-	1	1	1	1	1
1.2	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani								
1.2.1	Pendapatan Perkapita Penduduk	Rp/bln	442	551	591	631	671	711	711
1.2.2	Pendapatan Regional per kapita petani ADHB	Rp. (Juta)	1.985 (Thn 2011)	2.14	2.28	2.42	2.56	2.70	3
1.2.3	Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Pertanian	%	3.12 (Thn 2011)	3.62	4.12	4.62	5.12	5.62	6
1.2.5	PDRB per kapita	Rp. (Juta)	15.877 (Thn 2011)	16.88	17.88	18.88	19.88	20.88	21
1.2.6	Balita Gizi Kurang	%	3,51	2,81	2,11	1,40	0,70	0	0
1.2.6	Tingkat konsumsi protein (minimal 53 gram/hari)	gram/ hari	-	53	53	53	53	53	53
1.3	Optimalisasi peran pemerintah								
1.3.1	Penyuluhan yang memiliki sertifikasi	Org	-	-	33	53	73	93	93
1.3.2	Panjang Jalan	Km	921,43	1.050	1.100	1.170	1.220	1.300	1.300
1.3.3	Persentase jembatan berkodisi baik	%	-	65	70	80	90	100	100
1.3.4	Persentase jalan berkodisi baik	%	73,75	79	84,25	89,50	94,74	100	100
1.3.5	Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4	%	93,10	94,48	95,86	97,24	98,62	100	100

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Akhir pada Akhir Periode RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
1.3.6	Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik	%	99,57	99,6	99,7	99,8	99,9	100	100
1.3.7	Proporsi rumah tangga dengan air minum layak	%	37,08	49,66	62,25	74,83	87,42	100	100
1.4	Peningkatan Kemitraan dengan pihak swasta dan perbankan								
1.4.1	Jumlah kontrak	jumlah	-	20	30	40	50	60	60
1.4.2	Rasio Pinjaman terhadap simpanan	rasio	-	0	0	1	1	1	1
1.5	Perbaikan manajemen pengelolaan pertanian								
1.5.1	Tersedianya peta zonasi produk unggulan	Ada/ Tidak	0	1	1	1	1	1	1
1.5.2	Jumlah investor (PMDN)	Jumlah	2 (Thn 2011)	2	3	4	5	6	6
1.5.3	Jumlah investor (PMA)	Jumlah	2 (Thn 2011)	2	2	3	3	4	4
1.5.4	Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Pertanian	%	3.12 (Thn 2011)	3.62	4.12	4.62	5.12	5.62	6
1.5.5	Pendapatan perkapita	Rb/bln	442	551	591	631	671	711	711
1.6	Peningkatan produktivitas hasil pertanian								
1.6.1	Persentase lahan tidur/kritis	%	6,99	6,79	4,59	3,40	2,2	1	1
1.6.2	Persentase kebun kopi terlantar	%	5,86	4,89	3,92	2,94	1,97	1	1
1.6.3	Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Pertanian	%	3.12 (Thn 2011)	3.62	4.12	4.62	5.12	5.62	6
1.6.4	Pertumbuhan ekonomi pada subsektor industri pengolahan	%	10.47 (Thn 2011)	10.97	11.47	11.97	12.47	12.97	13
1.7	Peningkatan produk pertanian organik								
1.7.1	Jumlah petani bersertifikat organik	orang	-	10	20	30	40	50	50
1.7.2	Berdirinya outlet pemasaran produk organic	buah	-	1	2	3	4	5	5
1.7.3	Pendapatan perkapita	Rb/bln	442	551	591	631	671	711	711

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Akhir pada Akhir Periode RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
1.8	Pengembangan tanaman hias (ornamental)								
1.8.1	Jumlah petani bunga	orang	-	5	10	15	20	25	25
1.8.2	Jumlah outlet penjualan bunga segar	buah	-	1	2	3	4	5	5
1.8.3	Pendapatan perkapita	Rb/bln	442	551	591	631	671	711	711

Tabel 9.4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017**Misi 4 : Mengembangkan aktivitas sektor agroindustry**

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Akhir pada Akhir Periode RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
1	Mengembangkan sektor riil berbasis agroindustry								
1.1	Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui regulasi investasi yang jelas								
1.1.1	Nilai ekspor bersih perdagangan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1.1.2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB		0	9.95	10.45	10.95	11.45	11.95	11.95
1.1.3	Menurunnya Penggunaan Alat UTTP Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Metrologi Legal	%	Tdk Ada	20	30	38	46	50	50
1.1.4	Persentase pemahaman Konsumen Dari Bahan Makanan Yang Kadaluarsa dan Membahayakan	%	Tdk Ada	10	15	30	40	50	50
1.1.5	Persentase ketersedianya Informasi Data IKM Ter-update	%	Tdk Ada	8	14	30	45	60	60
1.1.6	Persentase meningkatnya SDM Pengusaha IKM	%	Tdk Ada	20	25	30	40	50	50
1.1.7	Persentase Wadah Penampungan Aspirasi Pengrajin	%	Tdk Ada	20	25	30	40	50	50
1.2	Melakukan diversifikasi produk pertanian dan perkebunan olahan yang berdaya saing tinggi berbasis UMKM								
1.2.1	Persentase Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri berbasis UMKM	%	Tdk Ada	20	25	30	40	50	50
1.2.2	Persentase peningkatan Kualitas Produksi, Persentase peningkatan Kesejahteraan Petani dan Persentase meningkatnya Pendapatan Petani	%	Tdk Ada	7	10	12	13	15	15
1.2.3	Luas lahan terehabilitasi Tanaman Kopi Tua / Rusak	Ha	Tdk Ada	625	625	625	625	625	625
1.2.4	Persentase Tersedianya pupuk organik	%	Tdk Ada	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.0
1.2.5	Persentase tersedianya Benih Komoditi Unggulan	%	Tdk Ada	10.0	10.0	10.0	13.0	15.0	15.0

Tabel 9.5 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017

Misi 5 : Meningkatkan akses dan jaringan perdagangan global

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Akhir pada Akhir Periode RPJMD
					2013	2014	2015	2016	2017	
1	Meningkatkan penetrasi pasar domestik dan internasional produk-produk unggulan Bener Meriah									
1.1	Membangun kerjasama perdagangan lokal, regional dan internasional									
1.1.1	Jumlah fasilitas pemasaran untuk ternak dan hasil produksi tenak	Unit	Tdk Ada	Tdk Ada	3	3	4	4	4	4
1.1.2	Jumlah Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Jumlah	Tdk Ada	Tdk Ada	3	3	4	4	4	4
1.1.3	Tersedianya jaringan informasi perdagangan yang baik	Jumlah	Tdk Ada	Tdk Ada	1	2	3	5	5	5
1.1.4	Tersedianya sistem perdagangan daerah	Jumlah	Tdk Ada	Tdk Ada	1	1	1	1	1	1
1.1.5	Penurunan angka pengangguran	%	3 Thn 2011	Tdk Ada	2.96	2.90	2.85	2.78	2.74	2.74
1.1.6	Pendapatan regional per kapita	%	9.37 Thn 2011	Juta	11.31	12.53	13.67	14.64	15.39	15.39028
1.1.7	Pertumbuhan PDRB	%	2.8 Thn 2011	Ada	2.90	3.10	3.30	3.50	3.70	3.7
1.1.8	Peningkatan nilai PDRB	%	5.11 Thn 2011	Ada	5.91	6.51	7.21	7.51	7.91	7.91
1.1.9	Persentase mendapat Informasi Jaringan Pasar Baik Lokal Maupun Nasional	%	Tdk Ada	Tdk Ada	20	30	40	50	60	60
1.2	Meningkatkan aktivitas perdagangan									
1.2.1	Angka kemiskinan	%	26.25 Thn 2010	Ada	24.35	23.95	23.35	22.65	21.85	21.85
1.2.2	Peningkatan nilai PDRB		5.11 Thn 2011	Ada	5.91	6.51	7.21	7.51	7.91	7.91
1.2.3	Angka Partisipasi Tenaga Kerja	%	78.31 Thn 2010	Ada	80.41	82.21	84.51	86.41	88.21	88.21

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Akhir pada Akhir Periode RPJMD
					2013	2014	2015	2016	2017	
1.2.4	Peningkatan nilai tambah produk bener meriah	%	2.89 Thn 2011	Tdk Ada	4.49	6.79	9.09	11.39	13.69	13.69
1.2.5	Pendapatan per kapita penduduk bener meriah	Rp	5.11 Thn 2011	Tdk Ada	5.51	5.91	6.31	6.71	7.11	7.11
1.2.6	Persentase Penyebarluasan Informasi Kepada Pelaku Usaha	%		Tdk Ada	15	30	45	60	75	75.00
1.2.8	Barang yang illegal	%		Tdk Ada	23	20	12	8	4	4.00
1.2.9	Persentase Bantuan Modal Kerja bagi Pedagang Ekonomi Lemah	%		Tdk Ada	10	20	30	45	60	60.00
1.2.10	Jumlah barang yang tersimpan pada gudang	%		Tdk Ada	30	33	36	39	42	42.00
1.2.11	%PDRB perdagangan	%	0.091 Thn 2011		10%	15%	20%	20%	20%	0.20
1.2.12	Persentase Pembinaan Para Pedagang Kaki Lima	%		Tdk Ada	10	25	35	50	65	65.00

Tabel 9.6 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017**Misi 6 : Mengembangkan Kemandirian dan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Energi**

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Akhir pada Akhir Periode RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
1	Mengupayakan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor energi								
1.1	Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan energi PLTMH sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan								
1.1.1	Jumlah PLTMH Terbangun	Unit	dtt	2	3	4	5	6	6
1.1.2	Luas cathment area	Ha	85.804	85.804	85.804	85.804	85.804	85.804	86
1.1.3	Jumlah ekspert/teknisi bidang PLTMH	orang	dtt	2	4	6	8	10	10
1.1.4	Jumlah PLTMH, PLTM, PLTA, PLT Panas Bumi (Geothermal), PLT Biomassa yang telah dimanfaatkan secara komersil	Unit	dtt	2	3	4	5	6	6
1.2	Mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan investor dalam pengembangan dan pengelolaan energi listrik geothermal, PLTM, PLTA, PLTS dan biomassa								
1.2.1	Lokakarya, seminar, deseminasasi, majalah atau leaflet tentang potensi dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan	keg./edisi	dtt	1	2	2	2	2	2
1.2.2	Jumlah regulasi sektor energi terbarukan yang diterbitkan	bah	dtt	0	1	0	0	1	1
1.2.3	Jumlah pembiayaan/investasi untuk proyek pengembangan, pemanfaatan, atau distribusi energi	Rp	dtt	5 Milyar	7.5 Milyar	10 Milyar	12.5 Milyar	15 Milyar	15 Milyar
1.2.4	Jumlah bank yang terlibat dalam pendanaan proyek pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan	bah	dtt	0	1	1	1	1	1
1.3	Memenuhi kebutuhan energi listrik dan energi konvensional lainnya								
1.3.1	Rasio elektrifikasi berdasarkan rumah tangga	%	91.44 (Thn)	92.00	94.00	96.00	98.00	100.00	100.00

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Akhir pada Akhir Periode RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
			2010)						
1.3.2	Volume/kualitas infrastruktur pendukung ketersediaan dan distribusi energi	Km/ Kondisi	dtt	2	2	2	2	2	2.00
1.3.3	Persentase masyarakat yang mendukung pengembangan energi terbarukan	%	dtt	20	40	60	80	100	100.00
1.3.4	Jumlah penurunan Gas Rumah Kaca yang diekuivalensikan dengan jumlah pemakaian energi terbarukan oleh seluruh elemen masyarakat BM	tCO2e	dtt	101,261	186,797	272,333	704,333	1,424,909	101,261

Tabel 9.7 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017

Misi 7 : Mengembangkan Pemeliharaan dan Pemanfaatan Hutan Yang Berkelanjutan

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Akhir pada Akhir Periode RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
1	Menjamin fungsi hutan								
1.1	Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya fungsi hutan								
1.1.1	Luas hutan lindung yang direhabilitasi	%	44.7	49.7	54.7	59.7	64.7	69.7	69.7
1.1.2	Peningkatan kawasan hijau kota	Ha	9.9	10	12	15	15	15	15
1.1.3	Pemahaman masyarakat terhadap bahaya bencana alam	%	0	20	40	60	80	100	100
1.1.4	Rekontruksi daerah bencana alam	%	0	64	73	82	91	100	100
1.1.5	Pelestarian luas hutan lindung	Ha x 1.000	85.804	85.80	85.80	85.80	85.80	85.80	86
1.1.6	Pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan	%	0.24(Thn 2011)	0.74	1.24	1.74	2.24	2.74	3
1.1.7	Jumlah lembaga adat yang terlibat dalam konservasi hutan	Σ		1	2	3	4	5	5
1.2	Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar fungsi hutan								
1.2.1	Pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan	%	0.24(Thn 2011)	0.74	1.24	1.74	2.24	2.74	2.74
1.2.2	Tersedianya forum koordinasi	ada/tidak		3	3	3	3	3	3
1.2.3	Adanya evaluasi	ada/tidak		1	1	1	1	1	1
1.2.4	Pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan	%	0.24(Thn 2011)	0.74	1.24	1.74	2.24	2.74	2.74
1.3	Peningkatan produktivitas hasil hutan								
1.3.1	Penurunan luas lahan Kritis	Ha	n.a						
1.3.2	Pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan	%	0.24(Thn 2011)	0.74	1.24	1.74	2.24	2.74	2.74

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Akhir pada Akhir Periode RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
1.4	Peningkatan pemanfaatan hasil hutan non kayu								
1.4.1	Pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan	%	0.24(Thn 2011)	0.74	1.24	1.74	2.24	2.74	2.74

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Guna Mengoptimalkan Kinerja Pemerintah dalam capaian pembangunan agar lebih efektif dan efisien Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama lima (5) tahun (2012-2017) sesuai dengan visi Kabupaten Bener Meriah “**Mewujudkan Bener Meriah Menjadi Kabupaten Madani**”. Serta untuk mewujudkan Visi diatas maka dirumuskan **Misi** sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera dilandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Mengembangkan tata kelola pertanian yang terpadu
4. Mengembangkan aktivitas sektor agroindustri
5. Meningkatkan akses dan jaringan perdagangan global
6. Mengembangkan kemandirian dan usaha pemanfaatan sumber daya energi
7. Mengembangkan pemeliharaan dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan

Dari Gambaran tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan pelaksanaan RPJM Kabupaten Bener Meriah tersebut tergantung pada sikap niat baik, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin serta komitmen bersama dari seluruh unsur *stakeholders*. Seluruh unsur perlu secara sungguh-sungguh melaksanakan program pembangunan yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Bener Meriah Tahun (2012-2017) yang dapat menyajikan dan menghasilkan tingkat Keimanan, pengetahuan dan Keterampilan juga mempunyai nilai tambah atas produk, dan jasa yang dihasilkan oleh **Misi** tersebut diatas yang memacu laju gerak penghasilan penduduk dan bakal terlihat pada penduduk yang tingkat ekonominya cenderung baik sehingga dapat dinikmati oleh lapisan masyarakat

Dokumen RPJM Kabupaten Bener Meriah merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Bener Meriah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah (RKPD) setiap tahunnya.

Selanjutnya, RPJM Kabupaten Bener Meriah menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah baik yang

dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta. Selain RPJM Kabupaten Bener Meriah menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam Kabupaten Bener Meriah.

10.1 PEDOMAN TRANSISI

Pada masa berakhirnya periode Pemerintah Kabupaten Bener Meriah (2012-2017) dan belum adanya dasar dokumen perencanaan tahun berikutnya maka RPJM Kabupaten Bener Meriah (2012-2017) dapat dijadikan pedoman pada masa transisi untuk menyusun program dan kegiatan prioritas sampai tersedianya dokumen RPJM Kabupaten Bener Meriah periode berikutnya terutama untuk program-program dan kegiatan prioritas yang capaiannya belum memenuhi target. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan cepat dan tepat dari hasil pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat/daerah maupun pihak swasta dimana dapat mendukung pertumbuhan di semua sektor yang merupakan langkah yang baik bagi kelangsungan pembangunan Kabupaten Bener Meriah di tahun-tahun berikutnya.

10.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017 ini menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPK, pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman bagi masyarakat dan dunia swasta dalam proses pembangunan. Untuk maksud tersebut maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berpedoman kepada RPJM Kabupaten Bener Meriah dan memuat visi dan misi,tujuan,strategi, kebijakan, program yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang berpedoman pada RPJM Kabupaten Bener Meriah Tahun (2012-2017) dan menjamin Konsistensinya antara RPJM Kabupaten Bener Meriah Tahun (2012-2017) dengan Rencana Strategi (Renstra) SKPD dan Renja SKPD . Renstra tersebut harus mendapat persetujuan Bappeda sebelum ditetapkan oleh kepala daerah dan penyusunan Renstra berpedoman pada Permendagri Nomor 54 tahun 2010.
2. RPJM Kabupaten Bener Meriah Tahun (2012-2017) sebagai bahan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan setiap tahun.

3. Dalam hal pelaksanaan RPJM Kabupaten Bener Meriah (2012-2017) harus dilakukan evaluasi setiap tahunnya terhadap capaian program dan kegiatan serta target yang telah ditetapkan. Selanjutnya bila diperlukan dapat dilakukan Evaluasi Paruh Waktu untuk penyesuaian atau revisi terhadap program dan kegiatan maupun target-target RPJM Kabupaten Bener Meriah yang telah ditetapkan. Dari hasil revisi RPJM Kabupaten Bener Meriah tersebut menjadi pedoman bagi SKPD dan Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan kembali Renstra dan RPJM Kabupaten Bener Meriah .
4. RPJM Kabupaten Bener Meriah 2012-2017 merupakan dasar penilaian terhadap kinerja tahunan dan lima tahunan Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi kinerja Kepala Daerah menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan daerah.
5. Untuk mengetahui pencapaian Visi dan Misi RPJM Kabupaten Bener Meriah perlu dilakukan evaluasi selambat-lambatnya satu tahun sebelum RPJM Kabupaten Bener Meriah berakhir.

BAB XI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bener Meriah 2012–2017 memuat maksud dan tujuan, landasan penyusunan, kondisi umum Kabupaten Bener Meriah, isu-isu strategis, visi dan misi pembangunan, arah kebijakan, program prioritas/kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. RPJM Kabupaten Bener Meriah 2012-2017 disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

RPJM Kabupaten Bener Meriah ini merupakan pedoman bagi pemerintahan dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun serta menjadi acuan untuk penyusunan Renstra SKPK, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bener Meriah (RKK).

Keberhasilan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah periode 2012-2017 dalam mewujudkan visi “**TERWUJUDNYA BENER MERIAH MENJADI KABUPATEN MADANI**” perlu dukungan dan komitmen bersama dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH